

BAB V

PROFIL MEDIA

A. Profil Surat Kabar Harian Republika

1. Sejarah Lahirnya Surat Kabar Harian Republika

Kelahiran surat kabar harian Republika tidak dapat dilepaskan dari rentetan perjuangan umat Islam Indonesia demi menyuarakan aspirasinya. Nama Republika sendiri adalah buah ide dari Presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto. Nama ini disampaikan Soeharto pada saat beberapa pengurus pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menghadap untuk menyampaikan rencana peluncuran harian umum. Harian ini sebelumnya akan diberi nama "Republik", kemudian Soeharto menambahkan "A" di belakangnya sehingga menjadi "Republika".

Republika adalah koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim bagi publik di Indonesia. Penerbitan tersebut berawal dari kesadaran tokoh ICMI untuk menyajikan yang terbaik sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Republika merupakan puncak dari upaya panjang perjuangan umat, khususnya para wartawan profesional muda yang telah menempuh berbagai langkah. Kelahiran Republika ini pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehadiran ICMI, karena Republika lahir sebagai perwujudan dari salah satu program ICMI yang dibentuk pada tanggal 5 Desember 1990.

Republika menjadi berkah bagi umat, sebab sebelum Republika hadir, aspirasi umat kurang mendapat tempat dalam wacana nasional. Kehadiran media

ini bukan hanya memberi saluran bagi aspirasi tersebut, namun juga menumbuhkan pluralisme informasi di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, kalangan umat antusias memberi dukungan, antara lain dengan membeli saham sebanyak satu lembar per orang.

Kehadiran penerbitan harian Republika ini didasarkan pada kehendak untuk mewujudkan media massa yang mampu mendorong bangsa menjadi kritis dan berkualitas. Bangsa yang sederajat dengan bangsa maju lainnya di dunia. Memegang nilai-nilai spiritualitas yang merupakan realisasi dari perwujudan Pancasila sebagai falsafah bangsa, serta memiliki arah dan gerak seperti digariskan UUD 1945.

Untuk mengelola harian umum komunitas muslim yang baru berdiri ini, ICMI mendirikan yayasan yang diberi nama Yayasan Abdi Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1992. Yayasan tersebut memiliki tiga program utama, yaitu:

- a. Pengembangan *Islamic Centre*
- b. Pengembangan CIDES (*Centre for Information and Development Studies*)
- c. Penerbitan Harian Umum Republika

Para pendiri Yayasan Abdi Bangsa berjumlah 48 orang, termasuk didalamnya beberapa menteri, pejabat tinggi negara dan pengusaha. Nama-nama seperti Ir. Drs. Ginanjar Kartasasmita, Ibnu Hutomo, Harmoko, Muhammad Hasan, Tien Soeharto, Probosutejo dan Abu Rizal Bakrie juga tergabung di dalamnya. Adapun Presiden RI, Soeharto berperan sebagai pelindung. Ketua

Badan Pembina Yayasan Abdi Bangsa diamanahkan kepada Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua Umum ICMI.

Yayasan Abdi Bangsa pada tanggal 28 November 1992 mendirikan PT Abdi Bangsa berdasarkan pada UU Pokok Pers bahwa penerbitan pers harus berbadan usaha. Satu bulan kemudian tepatnya tanggal 19 Desember 1992, Republika memperoleh SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) dari Departemen Penerangan RI No. 238/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992, untuk mendirikan harian umum Republika, dari situlah kemudian Republika resmi berdiri pada tanggal 4 Januari 1993.

2. Perkembangan Surat Kabar Harian Republika

Penerbitan Republika menjadi berkah bagi umat. Sebelum masa itu, aspirasi umat tidak mendapat tempat dalam wacana nasional. Kehadiran media ini bukan hanya memberi saluran bagi aspirasi tersebut, namun juga menumbuhkan pluralisme informasi di masyarakat. Karena itu kalangan umat antusias memberi dukungan, antara lain dengan membeli saham sebanyak satu lembar saham per orang. PT Abdi Bangsa Tbk sebagai penerbit Republika pun menjadi perusahaan media pertama yang menjadi perusahaan publik (PT Republika Media Mandiri et.al. dalam milis@iapkkt.org/msg05421.html).

Dalam usianya yang telah memasuki 20 tahun, Harian Republika berhasil menjadi surat kabar Muslim terbesar di Indonesia. Hal ini tentunya juga tidak lepas dari segala perjuangan yang dilakukan Republika demi meneguhkan eksistensinya di belantika media massa Indonesia. Dalam perkembangannya, PT Abdi Bangsa pada tahun 2002 merangkul semua kalangan dari komunitas Muslim untuk mengendalikan dan menanamkan sahamnya pada media ini. Pada tahun ini pula kelompok usaha Indopac Media, atau yang dikenal dengan Mahaka Media,

mengambil alih 40% saham. Selain itu, Mahaka Media juga mencatatkan sahamnya sebagai PT. Abdi Bangsa Tbk. di Bursa Efek Jakarta (BEJ), dan menjadikannya sebagai perusahaan penerbitan surat kabar pertama yang menjadi perseroan publik.

Hingga saat ini, Republika berada di bawah bendera PT Republika Media Mandiri, salah satu anak perusahaan PT. Abdi Bangsa. PT. Abdi Bangsa sendiri kemudian menjadi *holding company* di bawah bendera Mahaka Media, yang juga menerbitkan majalah Golf Digest Indonesia, Harian Indonesia, majalah Parents, majalah a+, Jak TV dan radio GEN FM. Selama tahapan ini, Republika tidak mengalami perubahan visi dan misi, hanya saja, nuansa bisnis dan independensinya menjadi lebih kuat.

Penjualan saham Republika bisa dikatakan tergolong unik, karena 1 lembar saham dijual kepada satu keluarga, sehingga penjualan saham pada publik ini menjadi sebuah terobosan baru dalam sejarah pers nasional. Dengan kata lain, Republika akan dimiliki sekurang-kurangnya 2,9 juta muslim di Indonesia. Apabila melihat fenomena yang ada, biasanya kepemilikan saham hanya dimiliki oleh penanam modal dan karyawan pers saja. Strategi penjualan saham yang berbeda, dengan melibatkan penjualan kepada publik ini, secara langsung maupun tidak langsung menciptakan *image* bahwa masyarakat muslim akan merasa memiliki koran tersebut.

Pada bulan Agustus 1993, penjualan Republika mencapai angka 125.000 eksemplar. Dengan pencapaian angka seperti itu, Partni Hadi selaku pemimpin Redaksi mengklaim bahwa sudah ada 1,3 juta lembar saham yang terjual. Pada

tahun yang sama dengan desain blok yang tidak lazim digunakan media pada umumnya, mengantarkan Republika menjadi juara pertama dalam Lomba Perwajahan Media Cetak. Sedang pada tahun 1995, Republika membuka situs web di internet dan pada tahun 1997 pertama kali mengoperasikan Sistem Cetak Jarak Jauh (SCJJ). Pendekatan juga dilakukan pada komunitas pembaca dengan menjadi salah satu koran pertama yang menerbitkan halaman khusus daerah.

Dalam jangka waktu dua tahun, harian ini telah mampu meningkatkan hasil penjualannya menjadi 160.000 eksemplar. Begitu juga dari sisi penghasilan iklannya, akibat oplah yang berkembang cukup dinamis sejumlah iklan besar pun banyak dipasang di harian Republika. Sementara iklan mini juga ikut menghiasi halaman secara teratur (Ahmad Bahar, dkk, et.al. (1996) dalam Safa'iyah (2006: 75). Untuk meningkatkan kualitasnya, Republika melakukan penyempurnaan dalam desain tampilan. Perwajahan Republika dirancang dengan konsep sederhana dan praktis, faktor penting dari konsep sederhana tersebut dapat diartikan bahwa Republika mudah dibaca dan peletakannya tidak membingungkan.

3. Visi dan Misi Republika

Secara eksplisit, visi dan misi Republika adalah sebagai berikut:

Visi Republika:

Menjadikan Republika sebagai koran umat yang terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuk, toleran, damai, cerdas, dan profesional, namun mempunyai prinsip dalam keterlibatannya menjaga persatuan Bangsa dan kepentingan umat Islam yang berdasarkan pemahaman Rahmatan Lil Alamin.

Misi Republika:

- a. Menjadikan Republika sebagai koran umat yang dikelola secara profesional, inovatif, dan menjadi pegangan kebenaran (berita) bagi masyarakat.
- b. Menjadikan Republika sebagai bagian dari elemen bangsa dan umat Islam yang memperjuangkan kemajuan, demokrasi, menjunjung HAM, *good governance*, kemakmuran, serta pencerdasan dan pencerahan masyarakat.
- c. Menjadikan Republika sebagai "rumah" yang nyaman bagi semua kelompok Islam dengan memberikan pembelaan, perlindungan, dan pelayanan terhadap kepentingan umat.
- d. Menjaga dan memperjuangkan keutuhan bangsa dan negara Indonesia.
- e. Memberikan manfaat kepada semua, memperjuangkan kebenaran, dan mencegah kemungkaran dengan sikap bijak (Fauziyah, 2009: 42-43).

4. Kebijakan-Kebijakan Republika

Untuk menjaga kelangsungan kebebasan pers dan memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat, diperlukan adanya landasan moral dan etika profesi bagi wartawan Indonesia. Hal tersebut diperlukan sebagai pedoman operasional dalam meneguhkan integritas pers. Oleh karena itulah, menurut wartawan senior Republika Yogyakarta, Heri Purwata, dalam korespondensi dengan periset, menyebutkan bahwa wartawan Republika berpegang pada Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ PWI) serta Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), sebagai berikut:

Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ PWI)

(Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2009: 304-310):

- a. Wartawan harus memiliki kepribadian dalam arti keutuhan dan jati diri, serta integritas dalam arti jujur, adil, arif, dan terpercaya.
- b. Wartawan menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini. Tulisan yang berisi interpretasi dan opini, disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.
- c. Wartawan menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita.
- d. Wartawan harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data, bukan opini.
- e. Wartawan menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan "*off the record*".

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) (Jakob Oetama, 2004: 81):

- a. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
- b. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.

- c. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat.
- d. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
- e. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.
- f. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai kesepakatan.
- g. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani Hak Jawab.

Selanjutnya, dalam korespondensi peneliti dengan wartawan senior Republika, Heri Purwata (Senin, 29 April 2013) menjelaskan bahwa lebih khusus lagi, jika dikaitkan dengan peran jurnalistik dalam ruang dakwah, maka Republika berperan sebagai berikut:

- a. Sebagai Pendidik (*Muaddib*)

Yaitu melaksanakan fungsi edukasi yang islami. Melalui media massa, Republika mendidik umat Islam agar melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Republika memikul tugas mulia untuk mencegah umat Islam dari perilaku menyimpang syariat Islam. Kemudian juga melindungi umat dari pengaruh buruk media massa non Islam yang anti Islam.

Implementasinya: Harian Umum Republika memuat rubrik Hikmah di halaman depan (*front page*). Juga menerbitkan tabloid Dialog Jumat yang menonjolkan nilai-nilai fiqih Islam.

b. Sebagai Pelurus Informasi (*Musaddid*)

Setidaknya mencakup tiga hal yang harus diluruskan oleh para jurnalis muslim. Pertama, informasi tentang ajaran dan umat Islam. Kedua, informasi tentang karya-karya atau prestasi umat Islam. Ketiga, lebih dari itu jurnalis muslim dituntut mampu menggali—melakukan *investigative reporting* — tentang kondisi umat Islam di berbagai penjuru dunia.

Peran *musaddid*, menjadi penting mengingat informasi tentang Islam dan umatnya yang datang dari pers Barat biasanya *biased* (menyimpang, berat sebelah) dan distorsif, manipulatif, alias penuh rekayasa untuk memojokkan Islam yang tidak disukainya. Di sini, jurnalis muslim dituntut berusaha mengikis fobi Islam (*Islamphobia*) yang merupakan produk propaganda pers Barat yang anti Islam.

Implementasinya: *pertama*, penerbitan rubrik Hikmah dan tabloid Dialog Jumat. *Kedua*, menerbitkan Khazanah (satu halaman), suplemen Islam Digest (12 halaman) yang menampilkan karya-karya dan prestasi umat Islam dalam ilmu pengetahuan. Tujuannya, membuka mata dunia bahwa banyak penemuan-penemuan yang dikembangkan Barat, berawal dari ilmuwan-ilmuwan Islam, mulai dari pengobatan, astronomi, sampai arsitektur. *Ketiga*, dalam suplemen Islam Digest diterbitkan rubrik Dunia Islam dengan tujuan

menepis pandangan-pandangan *bias* dari Barat. Ada pula rubrik Mualaf yang menyajikan cerita bagaimana seseorang non muslim beralih menjadi muslim.

Dalam terbitan regular, Harian Republika menerbitkan dua halaman Internasional. Pemberitaan di rubrik ini tak lain bertujuan menepis bias pemberitaan Barat. Ketika kartunis Denmark menghina Rasulullah SAW, Republika menjadi koran terdepan untuk menepis pemberitaan Barat yang bertameng kebebasan berpendapat. Begitu pula, saat anggota Parlemen Belanda menghina Islam dan Rasulullah SAW. Ketika di Indonesia terbit majalah Playboy dan terkait Undang-undang Anti Pornografi, Republika juga menjadi Koran terdepan yang menentang Playboy sekaligus mendukung terbitnya UU Anti Pornografi. Ketika terjadi perang di Jalur Gaza, Republika menerbitkan halaman khusus yang bertujuan mengimbangi *bias*-nya berita-berita Barat yang masuk ke kantor berita asing yang banyak dimuat di media nasional. Kemudian dalam terbitan regular (halaman 12), Republika menerbitkan satu halaman khusus tentang berita-berita terkait Islam, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

c. Sebagai Pembaru (*Mujaddid*)

Yakni penyebar paham pembaharuan akan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam (reformasi Islam). Jurnalis muslim hendaknya menjadi 'juru bicara' para pembaharu yang menyerukan umat Islam untuk memegang teguh Al Qur'an dan As Sunnah, memurnikan pemahaman tentang Islam dan pengamalannya (membersihkannya dari bid'ah, khurafat, tahayul, dan isme-

isme asing non Islam), dan menerapkannya dalam segala aspek kehidupan umat.

Implementasinya: suplemen tabloid Dialog Jumat, Hikmah, Islam Digest, serta rubrik khusus Islam di edisi reguler, semuanya mendorong agar umat memegang teguh Al Qur'an dan Sunnah, termasuk memurnikan pemahaman Islam. Republika menjadi koran terdepan yang menentang munculnya ajaran-ajaran sesat tentang Islam yang muncul dari pemahaman Islam yang keliru dan selalu bertameng hak asasi manusia (HAM) yang kerap didengungkan Barat.

d. Sebagai Pemersatu (*Muwahid*).

Yaitu harus mampu menjadi jembatan yang mempersatukan umat Islam. Karena itu, kode etik jurnalistik yang berupa *impartiality* (tidak memihak pada golongan tertentu dan menyajikan dua sisi dari setiap informasi (*cover both side*) harus ditegakkan.

Implementasi: menerapkan KEJ dan KEWI. Peran sebagai pemersatu sesuai pula dengan visi dan misi Republika sebagai Koran komunitas muslim yang *rahmatan lil 'alamin*. Jika terjadi perpecahan di kalangan organisasi Islam, pemberitaan Republika tidak akan masuk ke dalam konflik. Tetapi lebih pada upaya, mendamaikan sekaligus berharap bisa secepatnya mengakhiri konflik.

e. Sebagai Pejuang (*Mujahid*)

Yaitu sebagai pejuang-pembela Islam. Melalui media massa, jurnalis muslim berusaha keras membentuk pendapat umum yang mendorong

penegakkan nilai-nilai Islam, menyemarakkan syiar Islam, mempromosikan citra Islam yang positif dan *rahmatan lil 'alamin*, serta menanamkan *ruhul jihad* di kalangan umat.

Implementasi: inilah yang menjadi tujuan Republika. Setiap pemberitaan dan tulisan dari luar yang masuk ke redaksi akan diarahkan supaya sesuai dengan tujuan mendorong penegakan nilai Islam dan mempromosikan citra Islam yang positif. Terkait menyemarakkan syiar Islam, setiap Ramadhan, Republika menerbitkan majalah 'Cahaya Ramadhan.' Begitu pula ketika pelaksanaan ibadah haji, serta hari-hari besar lain Islam. Redaksi menyadari sepenuhnya apa yang sudah dilakukan masih memiliki banyak kekurangan dan tidak sempurna. Ini yang terus menerus diperjuangkan, dan tentunya dengan dukungan seluruh komunitas muslim (Wawancara dengan Heri Purwata, wartawan senior Republika tanggal 29 April 2013).

B. Profil Surat Kabar Harian Kompas

1. Sejarah Lahirnya Surat Kabar Kompas

Menurut Rizal Mallarangeng (2010: 50-51) Harian Kompas pertama kali terbit di Jakarta pada 28 Juni 1965. Pada terbitan awal, Kompas hanya menyajikan empat halaman, dengan berita utama pada edisi pertamanya berjudul "KAA II Ditunda Empat Bulan". Halaman pertama edisi ini memasang 11 berita luar negeri dan 7 berita dalam negeri. Tajuk rencana belum ada, dan iklan hanya enam buah, yang keseluruhannya mengambil tempat kurang dari setengah halaman. Oplah pertama Kompas sebanyak 4.800 eksemplar, dan kemudian dalam waktu tiga

bulan dengan cepat meningkat menjadi 8.003 eksemplar.

Harian ini diterbitkan oleh sejumlah wartawan yang saat itu bisa dikatakan cukup sukses menerbitkan majalah bulanan *Intisari*. Mereka antara lain P.K. Ojong dan Jakop Oetama, yang kemudian masing-masing menjadi Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Kompas. Staf redaksi dan wartawan pada awal harian ini terbit, antara lain Drs. J. Adisubrata, Marcel Beding, Threes Susilastuti, Lie Hwat Nio, Th. Purba dan August Parengkuan. Mulanya Kantor redaksi Kompas masih menumpang di rumah Jakop Oetama, kemudian berpindah menumpang di kantor redaksi *Intisari* di percetakan PT Kinta.

Kompas dilahirkan dalam situasi sejarah ketika "politik menjadi panglima". Partai politik diakui sebagai satu-satunya organisasi sosial yang boleh menyalurkan aspirasi politik masyarakat. Karena itu, setiap surat kabar yang terbit pada waktu itu diharuskan untuk mengaitkan dirinya (berafiliasi) dengan salah satu partai politik yang ada. Pada saat itu pula, partai komunis dan pers komunis menampakkan dirinya untuk melawan pemerintahan resmi Republik Indonesia. Adanya pers komunis ini kemudian menjadikan P.K. Ojong dan Jakop Oetama berinisiatif menerbitkan koran untuk melawan pers komunis tersebut (Mallarangeng, 2010: 51).

Dalam kondisi kekuasaan dalam genggaman partai politik ini, Kompas juga ikut berafiliasi dengan salah satu partai politik. Kala itu, Kompas memilih berafiliasi dengan Partai Katolik yang pada saat itu dipimpin oleh IJ. Kasimo (Mallarangeng, 2010: 51). Namun, setelah keharusan untuk berafiliasi dengan

partai politik ditiadakan, Kompas melepaskan diri dari Partai Katolik dan menjadi independen. Akan tetapi, nampaknya afiliasi Kompas dengan Partai Politik ini masih terus diingat oleh masyarakat, hingga ia masih dicitrakan sebagai korannya orang-orang Katolik.

Harian Kompas, yang mulanya diterbitkan untuk melawan pers komunis ini, juga sempat mengalami masa kritis walaupun tidak sampai dibredel oleh Pemerintah. Gerakan 30 September PKI (G30S) pada 1965 yang menimbulkan guncangan mendadak pada situasi politik masyarakat, menyebabkan Penguasa Pelaksana Perang Daerah (Papelrada) memerintahkan untuk menutup beberapa surat kabar, termasuk Kompas. Penutupan surat kabar pada 1 Oktober 1965 itu dilakukan lantaran dikhawatirkan akan menambah "kebingungan" masyarakat atas situasi politik kala itu, atau pun dikhawatirkan akan memihak PKI. Tapi lima hari kemudian, tepatnya pada 6 Oktober 1965, Kompas diizinkan untuk terbit kembali (Mallarangeng, 2010: 52).

Mallarangeng (2010: 52) dalam bukunya "Pers Orde Baru : Tinjauan Isi Kompas dan Sura Karya" juga menyebutkan akibat lain dari G30S ini. Meningkatnya suhu politik serta situasi politik yang tidak pasti menyebabkan masyarakat haus akan informasi, karena masyarakat membutuhkan informasi untuk mengurangi ketidakpastian. Kompas rupanya dapat memanfaatkan situasi seperti ini. Dalam suhu politik yang tinggi hingga akhir 1960an, oplah Kompas meningkat pesat. Dalam bulan-bulan pertama setelah peristiwa G30S oplah Kompas meningkat menjadi 23.268 eksemplar. Pada 1969, setelah peralihan kekuasaan secara resmi dari Orde Lama ke Orde Baru, oplah Kompas menembus

50.000 eksemplar.

2. Perkembangan Kompas Dari Masa ke Masa

Situasi konflik dan perubahan politik yang cepat dan terus berlangsung hingga tahun-tahun pertama 1970an mendorong oplah Kompas semakin meningkat pesat. Setelah peralihan kekuasaan, pola pembangunan kapitalis (sistem ekonomi pasar) adalah alternatif pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh rezim yang baru. Bagian substansial sistem ekonomi pasar adalah persaingan produk, promosi, dan periklanan. Dana iklan yang membengkak yang diterima oleh Kompas membuat surat kabar ini menata diri lebih profesional (Mallarangeng, 2010: 53).

Selain itu, sistem ekonomi pasar membawa perbaikan ekonomi yang pada akhirnya mempertinggi tingkat kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk pers. Karenanya, pada tahun-tahun awal 1970an, faktor politik dan faktor ekonomi sama-sama menjadi penentu perkembangan Kompas yang pesat. Pada akhir 1972 oplah Kompas telah menembus 100.000 eksemplar. Pada tahun ini pula Kompas mempunyai percetakan sendiri yang diberi nama PT Gramedia (Mallarangeng, 2010: 53).

Meski demikian, perkembangan Kompas yang lebih pesat lagi justru terjadi setelah 1972. Dari tahun ini hingga pertengahan 1980-an Kompas seolah hanya menampilkan cerita sukses suatu surat kabar. Pada 1986 oplah Kompas berhasil menembus 500.000 eksemplar (jumlah ini jauh di atas surat kabar nasional lainnya), dengan penyebaran produksi secara nasional. Tak perlu

dijelaskan lebih jauh bahwa sukses ini dimungkinkan oleh rangkaian peningkatan ekonomi masyarakat sejak awal 1970-an hingga pertengahan 1980-an (Mallarangeng, 2010: 53-54).

Cerita sukses ini hanya diselingi oleh pembredelan akibat suhu politik yang meningkat tinggi pada awal 1978. Menjelang Sidang Umum MPR, aksi-aksi mahasiswa semakin meningkat menentang pemilihan kembali Soeharto sebagai presiden. Hal ini mengakibatkan situasi konfliktual dan antagonistik dalam kehidupan politik. Pers pun lantas tergoda untuk menyajikan situasi demikian dalam pemberitaannya (Tjipta Lesmana, 1985: 7, dalam Rizal Mallarangeng, 2010: 54). Akibatnya, Kompas, bersama tujuh media terkemuka lainnya seperti Tempo, Merdeka, dan Sinar Harapan, oleh Kopkamtib dinyatakan ditutup untuk sementara. Ketujuh media ini baru boleh terbit lagi hampir tiga minggu kemudian (6 Februari) setelah menandatangani perjanjian dengan pemerintah.

Selama lebih dari dua dekade, oplah Kompas meningkat pesat. Akibatnya, Kompas semakin melebarkan perusahaan dan bisnisnya, baik dengan menerbitkan, membeli, atau pun bekerja sama dengan perusahaan pers lain, serta memasuki kawasan-kawasan bisnis non-pers. Tercatat Kompas telah memasuki sedikitnya enam jenis usaha yang berbeda (pers, penerbitan buku, percetakan, pasar swalayan, bank, dan tambak udang). Khusus bagi usaha pers, media yang telah berhasil dikembangkannya, antara lain: *Intisari* (majalah bulanan), *Bola* (majalah olah raga mingguan), *Jakarta-Jakarta* (majalah berita mingguan), *Bobo* (majalah bulanan anak-anak), *Hai* (majalah mingguan remaja), *Senang* (majalah hiburan), *Nova* (majalah wanita), dan *Monitor* (tabloid mingguan) (Mallarangeng,

2010: 58-59).

Selain delapan media tersebut, Kompas juga melebarkan sayapnya ke daerah, dengan mengembangkan harian *Sriwijaya Post* di Palembang, harian *Serambi Indonesia* di Aceh, harian *Surya* di Surabaya, dan harian *Berita Nasional* di Yogya. Singkat kata, Kompas telah menjadi konglomerat informasi. Faktor lain yang melatarbelakangi perilaku ekspansif seperti itu tidak hanya bersifat ekonomi tapi juga politik. Wakil Pimpinan Umum Kompas, P. Swantoro, pernah berkata "Kita tidak punya kepastian hukum. Kita sangat labil dari segi politik. Karena itu, kami harus melindungi nasib karyawan" (Mallarangeng, 2010: 59-60).

Setelah melalui masa perjuangan yang cukup melelahkan, memasuki abad 21, Kompas mulai berbenah diri baik dari segi tampilan, rubrik yang disajikan, maupun pelayanan pada pembacanya. Harian Kompas berhasil mempertahankan oplah hariannya dengan terbit rata-rata 500.000 eksemplar perhari, dengan tingkat keterbacaan sebanyak 1.850.000 perhari. Dari jumlah itu dapat diartikan bahwa, Kompas rata-rata dibaca oleh 1.850.000 orang perharinya (<http://kompasgramedia.com/business/newspapers/kompas>). Kemudian pada tahun 2010 tercatat, oplah cetak Kompas telah mencapai 508.000 eksemplar yang disebar ke 33 provinsi di Indonesia. Jumlah halamannya yang semula hanya 4 halaman, kini semakin diperbanyak hingga 50 halaman.

Sebagai salah satu koran nasional, Kompas juga hadir hampir di seluruh propinsi di Indonesia, dengan jumlah wartawan sebanyak 230 orang. Kompas menyajikan berita dari wartawannya yang ditempatkan di berbagai kota di Jawa,

Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi hingga Papua. Kompas juga menempatkan salah seorang wartawannya di Cairo, Mesir, khusus untuk mengikuti situasi dan perkembangan di kawasan Timur Tengah. Kompas juga akan mengirimkan wartawannya ke negara lain seperti Brussels, Washington, New York, Shanghai dan Canberra.

Pada 2009, Kompas meluncurkan rubrik baru yang diberi nama "Kompas Kita". Rubrik ini berisi tanya jawab antara seorang tokoh politik, olahragawan, atau selebritas lainnya, dengan para pembaca Kompas. Setiap Senin, Kompas membuat tulisan tematik yang mengangkat isu-isu tertentu dan digarap secara lebih terencana serta terancang. Sementara untuk isu-isu besar dan aktual serta perlu pemaparan secara komprehensif, Kompas menyajikan rubrik "Fokus" yang terbit setiap hari Jumat. Pada hari yang sama, pembaca juga mendapatkan halaman khusus olah raga yaitu "Sport". Selain itu, Kompas juga menyajikan lembar khusus iklan yang diberi nama "Klasika".

Tak hanya rubrik-rubrik berita yang disempurnakan oleh Kompas, namun juga desain dan perwajahan Kompas terus menerus diperbaiki. Seorang konsultan desain kelas dunia, Mario Garcia dari Amerika Serikat, sudah sejak tahun 2005 yang lalu diminta untuk mendandani dan memperbaiki wajah Kompas, sehingga Kompas tampil seperti yang sekarang ini. Konsep "Visual Thingking" merupakan isu utama dari konsep yang ditawarkan Mario Garcia. Gambar, infografik, dan ilustrasi, menjadi hal yang sangat penting dari keseluruhan wajah surat kabar. Seorang wartawan di lapangan, tak cukup hanya memikirkan isi berita yang akan dia tulis, tetapi wartawan sekaligus dituntut untuk membayangkan visual seperti

apa yang akan ditampilkan untuk memperkuat berita yang diperoleh.

Harian Kompas juga memperbaiki pelayanan pada pembacanya dengan mencetak harian Kompas sepagi mungkin. Semakin pagi waktu cetaknya, maka Kompas bisa diterima di tangan pelanggannya sebelum pukul 06.00 pagi. Hal ini tidak hanya berlaku untuk wilayah Jabodetabek. Karena Kompas memiliki sistem jarak jauh yang sudah dibangun didelapan kota, yaitu Bandung, Bawen-Jateng, Rungkut-Jatim, Bali, Medan, Palembang, Banjarmasin, dan Makassar. Forum Pembaca Kompas (FPK) juga disediakan oleh Kompas untuk mewadahi masukan dari para pembacanya. FPK ini ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogya, Surabaya, dan Medan.

3. Visi dan Misi Kompas

Visi "resmi" harian ini, yang oleh Jakop Oetama dikatakan menjadi dasar segala perilaku informasi Kompas, terangkum dalam slogan: "Ikut Mengembangkan Saling Pengertian dalam Masyarakat yang Majemuk" dan "Menghibur yang Papa dan Mengingatkan yang Mapan" (Jakop Oetama, Kompas, 1988 dalam Rizal Mallarangeng, 2010:51).

Visi Kompas, dalam tahun-tahun pertama terbitnya, dalam menyajikan informasi setidaknya juga dapat dilihat dari beberapa pandangan P.K. Ojong mengenai pers: "*...Secara intuitif setiap orang merasakan bahwa tugas utama dari pers ialah mengontrol dan kalau perlu mengecam pemerintah... Tugas pers bukanlah untuk menjilat yang berkuasa tapi untuk mengkritik yang sedang berkuasa... Mereka (penguasa itu) harus bekerja dengan pikiran bahwa selalu*

ada pentungan (*social control*) yang selalu siap sedia memukul mereka, kalau menyeleweng" (P.K. Ojong, *Kompasiana*. 1981 dalam Rizal Mallarangeng, 2010: 52).

Visi dan Misi Kompas juga dirumuskan berdasarkan 6 nilai yang disebut Nilai-Nilai Dasar Kompas, yaitu:

- a. Menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- b. Mengutamakan watak baik;
- c. Profesionalisme;
- d. Semangat kerja tim;
- e. Berorientasi pada kepuasan konsumen (pembaca, pengiklan, mitra kerja penerima proses), dan
- f. Tanggung jawab sosial.

Dari enam nilai dasar tersebut, kemudian dirumuskan visi dan misi Harian Kompas sebagai berikut.

Visi Kompas: "Menjadi Institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat, serta menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan".

Misi Kompas: "Mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara profesional, sekaligus memberi arah perubahan (*trendsetter*) dengan menyediakan dan menyebarkan informasi yang terpercaya" (St Sularto, et.al dalam Fauziah, 2009: 64-65).

Visi dan Misi Kompas yang dirumuskan pada tahun 2000 di atas, kemudian dirumuskan ulang pada tahun 2007. Tanpa meninggalkan enam nilai dasarnya, Kompas menyesuaikan kembali dan menyatukan visi dan misi tersebut, sekaligus diberi jangka waktu yakni antara tahun 2007-2008.

Visi dan Misi Kompas tahun 2007-2008:

Menjadi Agen Perubahan Dalam Membangun Komunitas Indonesia Yang Lebih Harmonis, Toleran, Aman & Sejahtera, dengan Mempertahankan Kompas Sebagai *Market Leader* Secara Nasional Melalui Optimalisasi Sumber Daya Serta Sinergi Bersama Mitra Strategis.

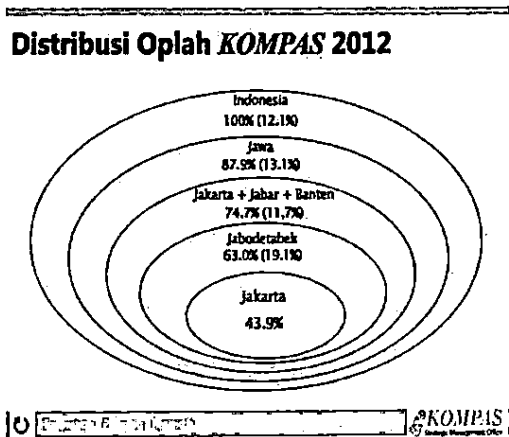
Visi dan misi tersebut menjadi panduan bagi seluruh elemen Kompas, yang kemudian akan ditinjau secara periodik untuk disesuaikan dengan perubahan dan tuntutan masyarakat.

4. Pembaca Kompas

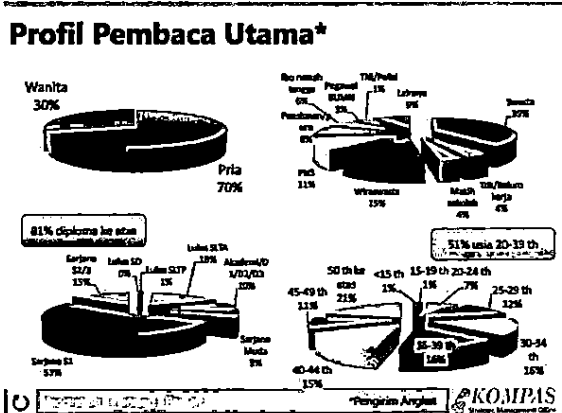
Pembaca terbesar Kompas adalah orang-orang terdidik, tetapi Kompas juga tidak melupakan kelompok pembaca muda dan anak-anak. Setiap pekan, Kompas menyediakan halaman khusus untuk kalangan anak muda usia 15-19 tahun. Kompas juga memiliki Forum Pembaca Kompas (FPK) yang berada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan. FPK tersebut ditujukan pada para pembaca Kompas untuk memberi masukan terhadap isi Kompas. Pertemuan secara berkala setiap tiga bulan sekali dilakukan secara bergilir di kota-kota tersebut. Di luar pertemuan itu, para pembaca Kompas masih bisa memberi masukan melalui email atau telepon (<http://kompasgramedia.com/business/newspapers/kompas>).

Adapun survey terakhir yang dilakukan Kompas pada tahun 2012, menunjukkan bahwa pembaca utama Kompas 81% adalah orang-orang yang berpendidikan diploma ke atas, dan 51% berusia diantara 20 hingga 39 tahun. Kemudian untuk total pembacanya, terdiri dari semua kalangan baik tamatan sekolah dasar hingga sarjana S2 dan S3, dari yang masih bersekolah, yang sudah bekerja ataupun yang belum bekerja, hingga pensiunan atau purnawirawan juga menjadi bagian dari pembaca Kompas.

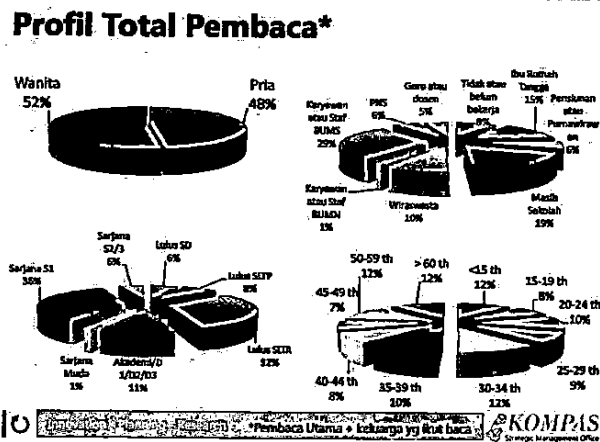
Berikut ini akan ditampilkan beberapa gambar mengenai distribusi Kompas serta profil pembaca Kompas.



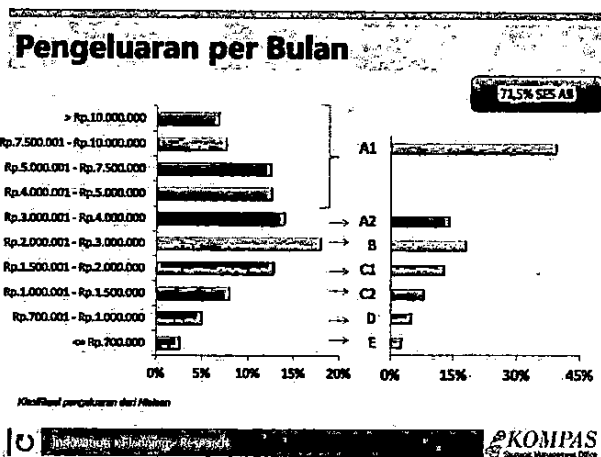
Gambar1: Distribusi Kompas di beberapa daerah di Indonesia, sumber Profil Kompas 2012



Gambar 2: Profil pembaca utama Kompas, sumber Profil Kompas 2012



Gambar 3: Profil total atau keseluruhan pembaca Kompas, sumber Profil Kompas 2012



Gambar 4: Tingkat pengeluaran perbulan pembaca Kompas, sumber Profil Kompas 2012

Sementara tahap kedua menyajikan perbandingan frame Republika dan Kompas dalam menyikapi kemunculan film “*Innocence of Muslims*” yang telah diinterpretasikan dengan teori peta ideologi Daniel Hallin. Perbandingan framing ini sendiri merupakan hasil dari *intersubjectivity analysis*, di mana semua pandangan, pendapat, atau pun data dari subjek penelitian, dalam hal ini periset utama, didialogkan dengan pandangan, pendapat, atau pun data dari subjek penelitian yang lain, yakni periset triangular. Dari perbandingan ini nantinya akan diketahui pula perbedaan antara Republika dan Kompas dalam membingkai berita film “*Innocence of Muslims*”.

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Film Innocence of Muslim

Film “*Innocence of Muslims*” mulanya adalah film yang berjudul “Desert Warrior”. Film “Desert Warrior” ini menceritakan kehidupan rakyat Mesir 2000 tahun lalu, dengan tokoh utamanya yang bernama Master George. Tidak ada yang aneh dalam film ini, hingga akhirnya cuplikan dari film ini ditampilkan di *youtube* dengan versi baru yang telah di-*dubbing*. Sebenarnya film ini telah dirilis di Amerika Serikat sejak bulan Juli 2012 yang lalu, bahkan sempat pula diputar di sebuah bioskop di Amerika. Tetapi karena dirilis secara terbatas, maka tidak banyak orang yang mengetahui dan menontonnya.

Setelah ketiadaan hasil dari pemutaran film itu di bioskop Amerika, cuplikan film itu pun kemudian ditampilkan di laman *youtube*. Awalnya tidak ada yang mengetahui maksud dari film tersebut. Namun, saat film yang telah diganti

nama menjadi "*Innocence of Muslims*" itu diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab, dan sempat ditayangkan di sebuah stasiun televisi di Mesir, barulah mereka menyadari maksud dan isi dari film tersebut.

Film "Desert Warrior" yang berganti nama menjadi "*Innocence of Muslims*" itu, telah di-*dubbing* (disulih ulang) oleh produser sekaligus sutradaranya. Para kru dan pemain film pun mengakui bahwa mereka dibayar untuk memainkan film berjudul "Desert Warrior" bukan "*Innocence of Muslims*". Akan tetapi, setelah *trailer* sepanjang 13 menit dari film tersebut ditampilkan di *Youtube* dan dilihat oleh salah seorang pemainnya, nyatanya ada beberapa bagian dialog film yang diganti dan disulih ulang. Tokoh Master George dan kata 'Tuhan' disulih ulang dengan memasukkan kata 'Muhammad'. Selain itu, ada pula bagian yang disulih ulang menjadi kata 'Alquran', 'Islam', dan 'Umar'.

Film "Desert Warrior" yang telah disulih ulang inilah yang kemudian menimbulkan protes di negara-negara berpenduduk Muslim. Bahkan dari protes itu juga menelan korban jiwa. Film yang awalnya mengisahkan kehidupan rakyat Mesir 2000 tahun lalu, telah berubah menjadi film yang menyerang agama, dalam hal ini agama Islam yang menjadi sasarannya. Dalam film itu agama Islam digambarkan sebagai agama yang penuh dengan kebencian dan kekerasan. Kemudian, Nabi Muhammad yang menjadi tokoh panutan umat Islam, digambarkan sebagai sosok yang haus kekuasaan, seks, serta sebagai pembunuh, perampok dan pemerias.

Film "Innocence of Muslimism" tersebut pada dasarnya berangkat dari

pemikiran sang sutradara yang tidak menyukai suatu kelompok Islam. Nakoula Basseley Nakoula atau Sam Bacile selaku sutradara dan produser film tersebut mengaku tidak menyukai Muslim radikal. Nakoula beranggapan bahwa Muslim radikal banyak membunuh orang tidak bersalah, sehingga menjadikannya berinisiatif untuk memproduksi film tersebut (Hazliansyah, 2012 dalam <http://www.republika.co.id>). Republika juga menyebutkan bahwa film itu dibuat terkait dengan kerusuhan yang menewaskan penganut Kristen Koptik di Mesir, beberapa waktu sebelum film tersebut dibuat (Republika, 14 September 2012: 11).

Cuplikan film sepanjang 13 menit yang telah tersebar luas melalui media *youtube* di internet ini, menyulut protes di berbagai negara. Media massa pun juga tidak ketinggalan memberitakan masalah kemunculan film “Innocence of Muslims” itu. Diantara sekian banyak media massa di Indonesia, surat kabar harian Republika merupakan media massa cetak berskala nasional yang mengikuti perkembangan isu ini secara intens. Demikian pula dengan Kompas, meski dalam segi jumlah pemberitaannya berbeda jauh dengan Republika. Oleh karena itu, periset melakukan penelitian mengenai film “Innocence of Muslims” ini, di samping karena melibatkan dua penganut agama (Kristen dan Islam), film ini juga memberikan dampak yang kurang positif bagi kerukunan antarumat beragama.

Periset mengamati pemberitaan kedua surat kabar itu pada edisi September 2012, bertepatan dengan tersebarnya film “Innocence of Muslims” di *youtube* dan proses hukum yang dijalani sutradara sekaligus produser film tersebut. Dari semua pemberitaan edisi September 2012 pada Republika dan Kompas, periset menemukan dua puluh tujuh item berita dari Republika dan sembilan item berita.

dari Kompas yang berhubungan dengan film "Innocence of Muslims".

2. Berita Republika dan Kompas mengenai film Innocence of Muslims

Harian Republika menyajikan berita mengenai film "Innocence of Muslims" sebanyak 27 berita. Adapun berita-berita tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Edisi	Halaman	Judul Berita
1	14 September 2012	Hal. 1	Pengakuan Awak Film The Innocence of Muslims
2	14 September 2012	Hal. 1	Hormati Prinsip Kesucian Beragama
3	14 September 2012	Hal. Internasional	Terry Jones Diminta Menahan Diri
4	14 September 2012	Hal. 11	Warga Sanaa Serbu Kedubes AS
5	14 September 2012	Hal. 10	Jangan Terpancing Provokasi Film Sampah
6	17 September 2012		AS Tarik Staf Kedubes di Sudan
7	17 September 2012	Hal. internasional	Kekerasan Tak Dibenarkan
8	17 September 2012	Hal. 1	Obama: AS Tak Setuju Upaya Hina Islam
9	19 September 2012	Hal. 1	AS Diminta Tegas
10	19 September 2012	Hal. Internasional	Tunjukkan Hormat Pada Muslim
11	20 September 2012	Hal. 1	Tokoh Agama Kecam Film yang Memprovokasi
12	21 September 2012	Hal. JIC	Cinta Rasul, Cinta Perdamaian
13	21 September 2012		Umat Diimbau tidak Anarkis
14	22 September 2012	Hal. 1	Muslim Prancis Tak Terprovokasi
15	23 September 2012	Hal. 1	SBY Usulkan Protokol Antipenistaan
16	24 September 2012	Hal. 12	Usul Indonesia Atas Protokol Antipenistaan Agama Positif
17	24 September 2012	Hal. 12	<i>Religion for Peace</i> Kutuk Penistaan Islam
18	25 September 2012	Hal. 10	Dubes Scot Didesak DPR
19	25 September 2012		Barat Perlu Peka pada Muslim
20	26 September 2012	Hal. 1	Dunia Butuh Aturan Antipenistaan
21	26 September 2012	Hal. 11	RI Harus Galang Dukungan
22	26 September 2012	Hal.	Hillary Clinton Harapkan

		Internasional	Toleransi
23	27 September 2012	Hal. 1	OKI Dorong Penista Agama Dihukum
24	27 September 2012	Hal. 14	Brasil Larang Film Anti Islam
25	27 September 2012	Hal. Publik	Wawancara Khusus: Scot A Marciel Dubes AS untuk Indonesia, AS Junjung Kebebasan Berekspresi
26	28 September 2012	Hal. 1	Melawan Poster Anti-Islam di New York
27	1 Oktober 2012	Hal. 12	Percepat Protokol Antipenistaan

Adapun keseluruhan item berita Kompas terpilih adalah sebagai berikut:

1	14 September 2012	Hal. Umum	AS Janjikan Investigasi Menyeluruh: Serangan di Benghazi Terencana
2	14 September 2012	Hal. Internasional	Unjuk Rasa di Kairo Berlanjut
3	15 September 2012	Hal. Internasional	Demonstrasi: FJP Tuduh Unjuk Rasa di Mesir Dipolitisasi
4	17 September 2012	Hal. internasional	Demonstran Bayaran di Kairo
5	19 September 2012	Hal. Politik & Hukum	Film Kontroversial: Galang Petisi Kecaman dan Penolakan
6	20 September 2012	Hal. Politik & Hukum	Film Kontroversial: Mahfud: Tidak Perlu Ditanggapi
7	27 September 2012	Hal. Internasional	Mesir Kampanyekan "Karikatur Lawan Karikatur"
8	27 September 2012	Hal. Internasional	Suriyah dan Iran Terus Ditekan, Yudhoyono Usulkan Protokol Cegah Kekerasan Berlatar Agama
9	29 September 2012	Hal. internasional	Pembuat Film Ditahan

B. Analisis Data

1. Frame Republika mengenai film "Innocence of Muslims"

Secara keseluruhan, dalam kasus beredarnya film "Innocence of Muslims", Republika membangun frame film "Innocence of Muslims" sebagai

film yang menistakan Islam. Dari dua puluh tujuh item berita yang diturunkan *Republika*, lima belas berita diantaranya, menempatkan film “*Innocence of Muslims*” sebagai film penista Islam, film yang menyerang Islam, menodai agama, memprovokasi, film sampah, film amatir dan film anti-Islam. Sementara dua belas berita lainnya memuat kecenderungan sikap dari Pemerintah AS atau Presiden Barack Obama, serta respon yang harus dikeluarkan oleh umat Muslim menghadapi film tersebut.

a. Frame *Republika* terhadap film

Protes dari umat Muslim dunia kembali muncul, kritikan halus bahkan juga yang tergolong keras juga ditemui. Usulan agar dibuat sebuah instrumen antipenistaan agama pun terlontar dari petinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beredarnya sebuah video trailer dari film “*Innocence of Muslims*” yang ditayangkan di situs *Youtube* internet, menuai kecaman dan kemarahan umat Muslim di hampir seluruh dunia. Inilah yang kemudian juga menyebabkan aksi kekerasan di sejumlah negara dalam memprotes film tersebut.

Beragam kata digunakan *Republika* untuk merepresentasikan film “*Innocence of Muslims*”. Sebagai salah satu koran nasional yang memiliki segmentasi pembaca terbanyak umat Muslim, *Republika* mencoba menjelaskan pada pembacanya bahwa film tersebut tidak sesuai dengan ajaran dan kepercayaan umat Muslim. Penggunaan kata-kata seperti “film yang menyerang Islam”, “film yang menodai agama”, “film amatir”, “film yang memprovokasi”, “film yang menghina Islam”, dan “film anti-Islam”, menunjukkan bahwa film “*Innocence of*

Muslims” dipandang sebagai film yang menistakan Islam, sehingga tidak layak untuk ditonton dan perlu dijadikan bahan pembelajaran agar tidak terulang kembali.

1) Film Penodaan Agama

Film “*Innocence of Muslims*” dikatakan sebagai sebuah isu sensitif penodaan agama. Republika menyebutkan hal ini pada lead berita yang diturunkan pada 19 September 2012 berjudul “AS Diminta Tegas”.

WASHINGTON DC – Amerika Serikat (AS) diminta bersikap tegas terhadap isu sensitif penodaan agama yang mencuat akibat peredaran film the Innocence of Muslims di laman Youtube. Duta Besar RI untuk AS Dino Patti Djalal mengatakan hal ini ketika bertemu dengan petinggi Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS di Washington DS, Senin (17/9) waktu setempat.

Isu sensitif masih tetap melekat pada segala hal yang berkaitan atau menyinggung suatu agama atau kepercayaan. Isu agama juga masih menjadi masalah yang paling sensitif, sebab agama bagi sebagian orang tergolong dalam sesuatu yang sakral karena datang dari Tuhan. Selain itu, kebenaran dalam agama adalah kebenaran tunggal, kebenaran pasti yang sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Karenanya, jika ada yang mencoba mengutak-atik agama dengan melakukan sesuatu, maka secara tidak langsung dia akan dicap sebagai orang yang salah, sesat, bahkan kafir.

Dari pernyataan yang dituliskan dalam berita ini, Republika banyak mengambil pernyataan dari orang-orang yang tidak suka dengan adanya film tersebut. Mereka adalah Duta Besar RI untuk AS, Dinno Patti Djalal, Kejaksaan Agung Rusia, Ketua Delegasi Indonesia di Sidang Umum ASEAN Inter

Parliamentary Assembly, Ketua Dewan Syura DPP PKB, Direktur the Wahid Institute, Menkominfo, bahkan juga sejumlah aktris Ibu Kota. Pernyataan dari mereka ini juga yang kemudian menguatkan bahwa, Republika memandang isu ini secara serius, karena hal itu tentunya juga bertentangan dengan ajaran Islam dan ideologi Islam yang dipegang oleh Republika.

2) Film Anti-Islam

Film "*Innocence of Muslims*" juga dikatakan sebagai film anti-Islam. Pengadilan negeri Sao Paulo, Brasil, menyebut film tersebut sebagai film anti-Islam. Oleh karena itulah, pengadilan meminta pihak pengelola *youtube* untuk menarik film tersebut dari lamannya. Pengadilan juga memberikan batas waktu selama 10 hari pada *youtube* untuk menarik film itu. Dalam lead berita yang diturunkan Republika pada 27 September 2012 berjudul "Brasil Larang Film Anti-Islam", dituliskan pernyataan putusan dari pengadilan negeri Sao Paulo tersebut.

BRASILIA – Pengadilan negeri Sao Paulo, Brasil, melarang film anti-Islam berjudul "the Innocence of Muslims", Selasa (25/9). "Youtube diberi tenggat selama sepuluh hari untuk menarik film yang dimaksud dari lamannya," demikian bunyi putusan pengadilan. Putusan keluar beberapa jam setelah Presiden Brasil Dilma Rouseff di sidang Majelis Umum PBB mengkritik suburanya Islamofobia di Barat.

Secara retorik, kata film anti-Islam menunjukkan bahwa film "*Innocence of Muslims*" itu membawa bibit-bibit yang bisa membuat penontonnya membenci Islam. Kemudian, kritikan yang diucapkan oleh Presiden Brasil itu menandakan masih adanya orang-orang Barat yang memiliki prasangka atau ketakutan atau anti terhadap Islam. Sikap semacam ini juga dikatakan semakin bertambah besar dan kuat. Istilah Islamofobia yang dilontarkan oleh Presiden Brasil tersebut,

sebenarnya sudah cukup lama muncul. Istilah ini merujuk pada suatu ketakutan atau sikap anti terhadap Islam. Sikap seperti ini muncul karena adanya kekerasan yang dicitrakan dan diidentikkan dengan Islam.

3) Film Amatir

Republika edisi 14 September 2012 yang menurunkan berita dengan judul “Pengakuan Awak Film The Innocence of Muslims”, menyebut film tersebut sebagai film amatir berdasar pernyataan Sarah Abdurrahman, yang telah melakukan analisis terhadap konten film. Dalam analisisnya, Sarah menemukan enam bagian dialog yang disulih ulang dengan memasukkan kata ‘Muhammad’ menggantikan kata ‘Tuhan’ dan ‘Master George’, serta ada pula yang disulih menjadi kata ‘Al-Quran’. Dalam temuannya itu pula, jika kata-kata yang disulih ulang itu dihilangkan, maka film “*Innocence of Muslims*” itu hanya film amatir biasa, yang sebenarnya tidak terkait dengan Islam dan Nabi Muhammad SAW.

Secara retorik, kata amatir yang ditujukan pada film “*Innocence of Muslims*” itu menunjukkan bahwa film itu dibuat oleh orang-orang yang tidak profesional. Film tersebut dibuat oleh orang-orang biasa yang mempelajari teknik-tekniknya secara otodidak. Selain itu, jika film itu disebut sebagai film amatir, maka akan terlihat bukan keuntungan berupa materi yang ingin didapatkan dari pemutaran film tersebut. Namun lebih pada adanya maksud tertentu dibalik pembuatannya, bisa jadi untuk membalas atau menyerang Islam.

Sebutan film amatir juga ditemui pada berita Republika terbitan 14 September 2012, dengan judul beritanya “Terry Jones Diminta Menahan Diri”.

Sebutan film amatir pada berita ini disandarkan pada Taliban yang mengajak warga Afghanistan untuk memerangi orang Amerika, dan mendesak kelompok-kelompok perlawanan bergerak menuntut balas dengan menyerang tentara AS. Ajakan disertai desakan dari Taliban tersebut karena beredarnya film "*Innocence of Muslims*".

Mereka berpotensi menjadi target kemarahan. Apalagi, pada Rabu (12/9) pagi Taliban mengajak warga Afghanistan mempersiapkan diri memerangi orang Amerika. Tak sebatas itu, Taliban mendesak kelompok-kelompok perlawanan bergerak menuntut balas dengan menyerang tentara AS atas beredarnya film amatir tersebut.

Secara tematik, sebutan 'film amatir' pada berita ini seperti menjadi sebutan langsung dari Taliban. Padahal dalam berita ini tidak dituliskan pernyataan langsung Taliban. Akan tetapi, karena sebutan itu disandingkan dengan kalimat sebelumnya yang menjelaskan ajakan dan desakan Taliban, maka sebutan itu seakan terucap pula dari Taliban. Hal ini menjadi penguat tersendiri bagi Republika, khususnya dalam membingkai berita mengenai film "*Innocence of Muslims*" ini. Sebab dengan begitu, pembaca akan percaya bahwa film itu memang film amatir, umat Islam di negara lain juga menyebutnya film amatir.

Selain itu, yang menarik pada berita edisi ini adanya beberapa gambar yang menjelaskan tentang penghinaan terhadap Islam. Dalam penjelasan di awal gambar, Republika menulis "Silih berganti penghinaan yang menargetkan Islam dan pribadi Nabi Muhammad bermunculan". Kalimat ini seakan menjelaskan pada pembacanya, bahwa penghinaan pada Islam masih terus bermunculan sering berjalannya waktu dan zaman. Adapun gambar dan penjelasan mengenai penghinaan pada Islam tersebut sebagai berikut:

- Novel Ayat-Ayat Setan karangan Salman Rushdie pada 1988 berisi pandangan miring mengenai kehidupan Nabi Muhammad. Kecaman dilancarkan kepada Rushdie karena dianggap melecehkan Nabi. Pada 1989, pemimpin spritual Iran Ayatollah Khomeini mengeluarkan fatwa yang menghendaki kematian Rushdie.
- Film Submission. Theo van Gogh membuat film yang menyudutkan Islam, terutama soal perlakuan Islam terhadap perempuan. Judul film itu Submission. Pada November 2004, ia tewas ditangan Mohammed Bouyeri berbuah balasan sekitar 170 serangan terhadap masjid dan gereja.
- Kartun Muhammad. September 2005, surat kabar Denmark, Jyllands-Posten menerbitkan kartun Nabi Muhammad yang menyebabkan gelombang protes di seluruh dunia. Puluhan orang tewas dalam protes di perwakilan Denmark di Suriah, Iran, Afghanistan, dan Lebanon. Denmark mengatakan kartun itu bagian dari kebebasan berekspresi.
- Hari Pembakaran Al-Quran. Terry Jones menyerukan hari pembakaran Al-Quran pada 2010, bertepatan dengan peringatan sembilan tahun peristiwa serangan 11 September 2001.
- Film The Innocence of Muslims. Sam Bacile menyutradarai film ini yang berisi pelecehan atas Islam, pribadi Nabi Muhammad, dan keluarga Nabi. Pada Selasa (11/9) malam protes terjadi di Benghazi Libya yang berakibat pada kematian Duta Besar AS untuk Libya, Chris Stevens.

4) Film yang Menyerang Islam

Pada 14 September 2012, Republika menurunkan berita berjudul "Pengakuan Awak Film The Innocence of Muslims". Berita yang diturunkan dua hari setelah film ini ditayangkan di *Youtube* ini, menjadi yang pertama kali mengulas mengenai produksi film "*Innocence of Muslims*". Keganjalan dalam proses produksinya juga dipaparkan pada berita ini berdasarkan penjelasan dari sejumlah pemain serta kru film. Dari penjelasan tersebut ditemukan bahwa, film "*Innocence of Muslims*" sudah disulih suara dengan memasukkan beberapa kata seperti kata "Muhammad" menggantikan kata "Tuhan" dan "Master George", serta ada pula yang disulih menjadi kata "Al-Quran. Akibatnya, isi film tersebut seakan menjelaskan mengenai kehidupan Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang dibawanya.

Akan tetapi, konten film yang seakan menceritakan kehidupan Nabi Muhammad dan Islam itu, tidak sesuai dengan keyakinan umat Muslim. Konten film dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dan perjalanan hidup pribadi Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya, Republika sebagai salah satu surat kabar Muslim, yang juga memiliki peran sebagai pelurus informasi, khususnya mengenai Islam, menyebut film tersebut dengan beberapa istilah kata untuk menunjukkan bahwa film itu menistakan Islam. Pada berita "Pengakuan Awak Film The Innocence of Muslims" ini, Republika memilih pernyataan dari salah seorang pemain film tersebut, yang mengatakan bahwa film itu menjadi alat propaganda menyerang Islam.

Cindy Lee Garcia, aktris Kalifornia yang mendapatkan peran kecil di film ini, mengaku tidak tahu-menahu filmnya jadi alat propaganda menyerang Islam. Cindy mengatakan sutradara memberitahu filmnya berjudul Desert Warrior mengisahkan kehidupan rakyat Mesir 2.000 tahun lalu.

"Itu seharusnya bukan film yang terkait dengan agama, Muhammad, Muslim, atau hal-hal sejenisnya," kata Garcia, seperti dikutip Gawker.com. Tokoh utama dalam film itu, kata Garcia, dan seperti iklan casting pemeran yang didapat dari Craigslist, adalah Master George, bukan Muhammad. Garcia mengaku beberapa bagian dari film yang ia tonton di Youtube diganti. Seperti kata 'Tuhan' yang diganti dengan 'Muhammad'.

Secara harfiah, propaganda memiliki arti penerangan mengenai paham atau pendapat dan sebagainya yang benar atau salah, yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang lain agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu. Maka dengan demikian, dapat dikatakan bahwa film "*Innocence of Muslims*" dianggap sebagai film yang dapat mengarahkan penontonnya untuk menyerang Islam. Film "*Innocence of Muslims*" dikatakan sebagai film propaganda Islam, karena dalam film ini terkait dengan agama Islam dan Nabi Muhammad. Selain itu, film ini juga melukiskan sosok fisik Nabi Muhammad serta menyentuh tema pedofilia dan homoseksual.

Seorang wartawan Mesir, dalam gugatan hukumnya juga mengatakan bahwa film yang dibuat oleh Sam Bacile itu film yang sengaja menyerang Islam. Gugatan wartawan Mesir ini seperti diberitakan Republika pada 14 September 2012 dengan judul berita "Jangan Terpancing Provokasi Film Sampah". Dalam berita ini pun disebutkan bahwa Pemerintah Mesir didesak untuk melepaskan kewarganegaraan orang-orang Mesir yang terlibat dalam film itu. Bahkan, film "*Innocence of Muslims*" itu, juga dikatakan sebagai film sampah yang tidak

pantas memancing emosi warga. Hal tersebut diutarakan oleh Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar.

Pernyataan senada juga disampaikan Duta Besar RI untuk AS, Dino Patti Djalal, Republika 19 September 2012 "AS Diminta Tegas". Saat ia bertemu dengan petinggi Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS di Washington DC, Senin (17/9) waktu setempat, ia mengatakan bahwa film yang dibuat di AS itu sangat menyerang dan menyinggung umat Islam. Isi film tersebut dinilai menghina Nabi Muhammad SAW. Ia juga mengatakan film "*Innocence of Muslims*" itu termasuk dalam kategori isu-isu sensitif penodaan agama.

Dalam pertemuan itu Dino menyampaikan film the Innocence of Muslims yang dibuat di AS sangat menyerang dan menyinggung umat Islam. Isi film itu menghina Nabi Muhammad SAW. "Indonesia meminta Pemerintah AS segera mengemukakan posisi yang tegas, keras, dan jelas terhadap isu-isu sensitif, seperti penodaan agama," kata Dino.

Di Gedung Putih, Dino ditemui Senior Director National Security Council Daniel Russel. Di Departemen Luar Negeri AS, Dino bertemu dengan Principal Deputy Assistant Secretary of State Joseph Y Yun. Kepada dua pejabat ini Dino menegaskan, demokrasi di AS bisa punya satu bentuk. Tapi, di Indonesia kebebasan berbicara tidak untuk menghina Nabi Muhammad.

Dari kutipan berita di atas, jelas bahwa Dino Patti Djalal mengatakan film "*Innocence of Muslims*" sebagai film yang sangat menyerang dan menyinggung umat Islam, lantaran film itu berisi penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Penggunaan kata 'sangat' juga menunjukkan bahwa film itu sungguh-sungguh telah menyerang dan menyinggung perasaan umat Islam. Demikian halnya, jika film "*Innocence of Muslims*" di dunia Barat dianggap sebagai film biasa yang tidak bersinggungan dengan agama, maka di negara Indonesia dan negara Timur Tengah menganggap film itu telah menghina Islam. Akibatnya, pecah protes dan

unjuk rasa mengancam film tersebut, bahkan tindakan anarkis juga sempat dijadikan alat dalam memprotes film itu.

Sebutan film sebagai hal yang ofensif atau menyerang, materi ekstrem dan menyerang pemeluk agama, juga tertuang pada *Republika* edisi 27 September 2012 dengan beritanya yang berjudul "Brasil Larang Film Anti-Islam". Dalam berita ini, hakim di pengadilan Brasil menyetujui gugatan National Islamic Union (NIU) yang menilai film itu ofensif dan melanggar hak kebebasan beragama. Pengadilan kemudian menyandingkan kebebasan berekspresi dan keperluan melindungi hak individu dan kelompok dari aksi yang berpotensi menyebabkan diskriminasi agama, sehingga dari sandingan ini ditemukan keputusan bahwa pihak *youtube* harus menarik film itu dari lamannya.

Selain itu, berita ini juga menyertakan tindakan tegas jaksa dan Menteri Komunikasi dari kabinet Rusia, Nikolai Nikiforov terhadap film. Kabinet Rusia menyatakan akan memblokir akses ke *youtube* jika laman ini tidak menerima permintaan dari kabinet untuk menghapus film "*Innocence of Muslims*" dari lamannya. Hal tersebut berdasarkan pada undang-undang media yang berlaku efektif pada 1 November, dan dirancang untuk melindungi kelompok minoritas dari para ekstremis dan materi berbahaya serta mengizinkan pemerintahnya untuk menutup sebuah laman yang dapat mengancam kelompok minoritas tersebut. Kemudian, para jaksa Rusia juga melayangkan permintaan pada pengadilan di Moskow, untuk menetapkan film "*Innocence of Muslims*" sebagai materi ekstrem dan menyerang pemeluk agama.

Dari tiga gugatan dan permintaan tersebut, terlihat dengan jelas bahwa

bukan hanya negara yang berpenduduk mayoritas Muslim di Timur Tengah, yang mengatakan film tersebut menyerang agama, yaitu Islam. Negara Brasil di Amerika Latin yang notabene termasuk negara Katolik terbesar di dunia, nyatanya menyetujui gugatan yang disampaikan oleh NIU. Rusia yang juga lebih dikenal sebagai negara komunis, ternyata juga memiliki kepedulian yang tinggi pada umat bergama. Namun hal ini tentunya tidak terlepas dari keberadaan umat Muslim di Rusia yang tumbuh sangat pesat, hingga mencapai 25 juta jiwa.

Demikianlah, jika film "*Innocence of Muslims*" disebut sebagai alat propaganda menyerang Islam, film yang ofensif, materi ekstrem dan menyerang, maka logikanya, konten film itu memang sengaja dibuat sedemikian rupa. Tujuannya agar penontonnya mengetahui kelemahan Islam, sehingga orang-orang yang tidak mengetahui tentang Islam akan tahu bahwa Islam dan Nabi Muhammad itu seperti yang digambarkan dalam film. Kemudian, orang-orang yang percaya pada konten film itu, akan menyerang dan memusuhi Islam lantaran menurut pandangan mereka, Islam tidak seindah yang didengungkan oleh para pendakwah Islam.

Sebutan untuk film "*Innocence of Muslims*" tersebut, serta gugatan dan permintaan dari negara lain mengenai film itu, semakin menguatkan frame Republika bahwa film itu memang film yang sengaja dibuat untuk menyerang Islam. Karena konten film jelas tidak sesuai dengan padangan umat Islam. Jika film ini sengaja dibuat untuk menyerang Islam, kemudian terjadi tindakan anarkis dan kekerasan dalam memprotes film ini, maka dapat diartikan bahwa itulah yang diinginkan oleh pihak pembuat dan yang mendanai film tersebut.

5) Film yang Memprovokasi

Kecaman terhadap film "*Innocence of Muslims*" ternyata tidak hanya datang dari umat Islam. Namun kecaman juga datang dari umat beragama lainnya, bahkan petinggi gereja Katolik Vatikan. Kali ini kecaman dari petinggi gereja Katolik tersebut menyebut film "*Innocence of Muslims*" sebagai film yang memprovokasi. Republika terbitan 14 September 2012 pada beritanya yang berjudul "Hormati Prinsip Kesucian Beragama", mengusung pernyataan dari petinggi gereja Katolik Vatikan pada lead beritanya.

VATICAN CITY – Takhta keuskupan gereja Katolik, Vatikan, mengecam provokasi yang dilancarkan film The Innocence of Muslims yang membuat kawasan Timur Tengah bergejolak lagi. "Konsekuensi serius dari aksi kekerasan dan provokasi atas sensitivitas kepercayaan Muslim terlihat jelas," kata juru bicara Vatikan, Federico Lombardi, dalam pernyataan persnya kepada Radio Vatikan, Kamis (13/9).

Secara tematik, adanya fakta yang diberitakan Republika mengenai pernyataan uskup gereja Katolik Vatikan, yang diletakkan pada bagian lead berita ini menunjukkan pentingnya fakta tersebut. Selain itu, peletakan fakta ini juga menjadikan pembacanya mengetahui isu hangat yang disampaikan Republika. Berita ini juga menjadi *headline* pada edisinya. Dengan begitu, jelas sekali terlihat bahwa isu ini menjadi isu utama yang diangkat Republika.

Kecaman terhadap film dan pembuat film juga disampaikan oleh beberapa tokoh agama. Ada pula yang menyebut film "*Innocence of Muslims*" sebagai film yang memprovokasi. Dari judul berita yang ditulis Republika 20 September 2012, "Tokoh Agama Kecam Film yang Memprovokasi", dapat diartikan bahwa para tokoh agama menganggap film "*Innocence of Muslims*" sebagai film yang memprovokasi. Masalah berapa orang yang menyebut film tersebut sebagai film

yang memprovokasi, hal itu dijelaskan lagi pada paragraf-paragraf berita. Akan tetapi nyatanya, diantara delapan tokoh agama hanya dua orang yang mengatakan film itu termasuk film yang memprovokasi.

Rais Syuriah PBNU KH Masdar Farid Mas'udi menekankan agar umat Islam bisa mengendalikan diri dalam peristiwa ini. Cara bijaksana menyikapi provokasi agama, kata dia, adalah mendiamkan. "Isilah masa-masa penuh hinaan itu dengan doa, meminta ampunan dan petunjuk pada Allah SWT ke yang bersangkutan (provokator)," kata Masdar.

... Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, heran mengapa umat Islam di seluruh dunia bisa mudah terpancing film murahan itu. Ia mengingatkan menista agama dan kekerasan atas nama agama sama-sama tidak dapat dibenarkan. Cara efektif menghadapi situasi seperti ini, kata dia, adalah dialog antarkelembagaan yang berbeda pendapat.

Secara bahasa, kata provokasi juga bermakna perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, penghasutan, atau pancingan. Dengan demikian, pernyataan guru besar UIN Syarif Hidayatullah di atas, yang menyatakan keheranannya karena umat Islam di seluruh dunia mudah terpancing film "Innocence of Muslims", dapat pula diartikan bahwa umat Islam di seluruh dunia mudah terprovokasi film tersebut.

Kata provokasi, umumnya selalu memiliki konotasi negatif. Perbuatan provokasi biasanya juga ditujukan untuk mendapatkan simpati dari orang lain atas ide atau gagasan yang didengungkan oleh provokator (orang yang melakukan provokasi). Dari simpati itu kemudian muncul rasa empati yang ditunjukkan dalam bentuk upaya, perbuatan dan kegiatan. Jika kemudian kata provokasi ini disandingkan dengan agama, maka dapat diartikan bahwa provokator melontarkan ide dan gagasannya terhadap suatu agama tertentu. Selain itu, karena kata provokasi ini berkonotasi negatif, maka barang tentu yang dimaksud provokasi

agama adalah ide-ide atau gagasan yang menyudutkan atau menjelekkan agama tersebut.

Tidak jarang pula dari perbuatan provokasi, justru menimbulkan kemarahan atau kekerasan. Munculnya film *"Innocence of Muslims"* ini bagi sebagian orang dinilai sebagai film yang memprovokasi, atau provokasi agama. Karenanya banyak diantara mereka yang menyarankan untuk mendiamkan atau berhati-hati dalam merespon film tersebut. Hal ini seperti diberitakan Republika dalam beritanya yang berjudul "Jangan Terpancing Provokasi Film Sampah" edisi 14 September 2012.

JAKARTA – Menteri Agama Suryadharma Ali mengimbau umat Islam di Indonesia tidak terprovokasi film "The Innocence of Muslims". Menurut dia, kemunculan film itu bisa jadi upaya adu domba dan memecah belah sekaligus ajang mendiskreditkan Muslim di seluruh dunia. "Saya berharap, masyarakat dalam negeri berhati-hati merespon film itu," ujar Menag saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/9).

... Ia kembali menegaskan kalau kekerasan bukanlah ajaran Islam.

... Kementerian Agama meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk segera menyeleksi film-film yang berbau sadisme, kekerasan, dan hasutan antaragama agar tidak masuk Indonesia. Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, film "The Innocence of Muslims" yang diunggah di Youtube adalah film sampah. Film jenis itu, kata dia, tidak pantas memancing emosi warga.

... Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Amidhan Saberah juga menyerukan agar umat Muslim di Indonesia tak terpancing dengan melancarkan protes keras....

Secara retorik, ada beberapa kalimat yang menjadi kata kunci pada kutipan berita di atas. Kalimat *"...tidak terprovokasi film "The Innocence of Muslims"*, pernyataan yang dikeluarkan oleh Suryadharma Ali ini menunjukkan bahwa film *Innocence of Muslims* dianggap sebagai film yang memprovokasi, dan Republika setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini dapat terbukti dengan diletakkannya

kalimat itu pada bagian lead berita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Provokasi* memiliki arti perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, atau tindakan menghasut. Sedangkan *Terprovokasi* maksudnya adalah terpancing atau terpengaruh untuk melakukan perbuatan negatif, semisal perusakan.

Kemudian kalimat "*upaya adu domba*", pernyataan yang masih dikeluarkan oleh Menteri Agama ini juga mendukung kalimat sebelumnya, yang menyatakan untuk tidak terprovokasi dengan adanya film itu. Kemunculan film "*Innocence of Muslims*" dikhawatirkan sebagai upaya pihak lain untuk membuat perselisihan di kalangan umat Muslim sendiri. Kata "*mendiskreditkan*" pada lead ini juga menunjukkan bahwa film itu dianggap sebagai upaya untuk menjelekkan atau melemahkan kewibawaan suatu pihak tertentu, dalam hal ini pihak yang dianggap didiskreditkan adalah Islam.

Selain itu, film "*Innocence of Muslims*" juga dianggap sebagai film sampah. Oleh sebab itulah, film ini seharusnya tidak memancing emosi warga atau umat Islam untuk meresponnya dengan melakukan protes keras atau tindakan kekerasan lainnya. Karena, sekali lagi, film ini dinilai sebagai film sampah, atau dengan kata lain, film ini tidak berharga dan tidak bernilai sama sekali.

Himbauan untuk tidak terpancing atau terprovokasi dengan adanya film "*Innocence of Muslims*" ini, disampaikan pula oleh Dewan Hubungan Islam-Amerika (CAIR). Mereka mengajak umat Islam di seluruh dunia untuk tidak termakan provokasi kemunculan film tersebut. Direktur Eksekutif CAIR juga mengharap pada semua umat Muslim untuk tidak terprovokasi. Karena

menurutnya, jika umat Islam sampai terprovokasi dengan adanya film itu, maka secara tidak langsung umat Islam telah menyuguhkan publikasi gratis bagi ekstermis yang berada di balik pembuatan film.

Jika demikian halnya, boleh jadi, itulah yang diinginkan oleh pembuat film. Karena itulah, dalam pernyataan penutupnya, Direktur Eksekutif CAIR ini menyarankan untuk menggandakan upaya rasa saling memahami dan dialog antarkeyakinan serta dengan meminggirkan ekstermis, dalam merespon adanya upaya provokasi. Adanya kalimat penutup dari pernyataan Nihad Awad tersebut menunjukkan bahwa Republika pada edisi 14 September 2012 “Terry Jones Diminta Menahan Diri”, juga menyayangkan adanya tindakan anarkis dalam memprotes film “*Innocence of Muslims*”. Pernyataan dari Awad tersebut juga bisa menjadi solusi atau saran bagi umat Islam di Indonesia dalam merespon film tersebut.

6) Film menistakan Islam

Kata nista atau menistakan dapat pula bermakna menghinakan atau merendahkan sesuatu. Jika dilihat dalam konteks penyebutan film “*Innocence of Muslims*” sebagai film yang menistakan Islam, maka hal itu berarti film “*Innocence of Muslims*” adalah film yang isinya menghina Islam. Beberapa berita yang diturunkan Republika terkait pemberitaan film ini, beberapa diantaranya ada yang menggunakan sebutan film yang menistakan Islam dan menghina Islam. Akan tetapi, dari segi bahasa, kata menistakan dan menghina, sama-sama memiliki konotasi negatif.

Berita Republika yang berjudul “Kekerasan Tak Dibenarkan”, yang diturunkan pada 17 September 2012, terdapat tiga kali penyebutan mengenai film “*Innocence of Muslims*” sebagai film yang menghina Nabi Muhammad dan tindakan penghinaan terhadap Nabi. Bahkan dalam berita ini disebutkan pula pernyataan dari Mufti Arab Saudi yang meminta kepada pemerintah dan badan internasional untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut.

Secara retorik, kata “*kriminalisasi*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Republika menyetujui pernyataan yang dilontarkan oleh Mufti Arab Saudi tersebut. Orang yang melakukan tindakan penghinaan terhadap Nabi Muhammad, digolongkan sebagai pelaku pidana. Jika ditetapkan sebagai pelaku pidana, maka secara hukum orang tersebut bisa dikenai sanksi hukuman.

Pada berita Republika edisi 19 September 2012 yang berjudul “Tunjukkan Hormat pada Muslim”, ada penyebutan kata ‘menghina Islam’ sebanyak dua kali, ‘menghina Nabi Muhammad’ sebanyak dua kali, serta ‘menistakan Nabi’ dan ‘penistaan terhadap Islam’ masing-masing satu kali. Intensitas penyebutan dua kata (menghina dan menistakan) tersebut, secara jelas pula memperlihatkan bahwa Republika kembali memandang film “*Innocence of Muslims*” sebagai film yang menghina atau menistakan Islam dan Nabi Muhammad. Pandangan Republika ini tentunya juga didukung dengan adanya pernyataan dari beberapa

sumber berita, yakni pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei dan beberapa demonstran Lebanon.

Pengulangan kata ‘penghinaan’ dan ‘menghina’ Nabi Muhammad juga ditemui pada berita Republika yang diturunkan pada 22 September 2012 berjudul “Muslim Prancis tak Terprovokasi”. Pada berita ini kata ‘penghinaan’ dan ‘menghina’ Nabi Muhammad diulang sebanyak lima kali. Namun kali ini, berita mengenai penghinaan terhadap Nabi Muhammad tidak hanya melalui film “*Innocence of Muslims*”, tapi juga karena terbitnya kartun Nabi Muhammad di majalah *Charlie Hebdo* Prancis.

Pada berita ini juga diketengahkan pernyataan dari Perdana Menteri Pakistan, Raja Pervez Ashraf, yang mengatakan bahwa penghinaan terhadap Nabi Muhammad merupakan penghinaan terhadap 1,5 miliar Muslim. Hal itu menurut Ashraf merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima. Adanya pernyataan tersebut seakan menguatkan alasan terjadinya protes menentang film “*Innocence of Muslims*” di sejumlah negara. Sebagaimana diketahui, lantaran merasa Nabinya dihina oleh orang lain melalui sebuah film yang berjudul “*Innocence of Muslims*”, umat Muslims di seluruh dunia melancarkan protes atas film tersebut. Umat Islam meminta penghinaan dihentikan dengan tidak menayangkan lagi film itu di *youtube* serta menuntut agar pembuat filmnya dihukum.

Pada berita ini dan juga beberapa berita lainnya, Republika juga menuliskan bahwa pelecehan atau penghinaan terhadap suatu agama, bukan bagian dari kebebasan berekspresi. Dari berita-berita yang disajikan Republika terlihat bahwa kebebasan berekspresi seharusnya tidak dijadikan alasan dalam

peredaran film "*Innocence of Muslims*". Kebebasan berekspresi juga tidak seharusnya dijadikan dalih untuk melecehkan suatu agama tertentu. Sebab jika hal itu masih terjadi, maka akibatnya akan memunculkan sentimen antarumat beragama.

Selain itu, orang-orang yang tergabung dalam *Religion for Peace* juga mengeluarkan pernyataan bahwa, mereka menyesalkan beredarnya film "*Innocence of Muslims*". Berita yang diturunkan Republika pada 24 September 2012 berjudul "*Religion for Peace* Kutuk Penistaan Islam", dengan jelas mengartikan, mereka juga sependapat bahwa film itu menistakan Islam.

Dua paragraf pertama berita ini menyertakan pendapat Sekretaris Jenderal *Religion for Peace*, William F Vendley, yang mengatakan film "*Innocence of Muslims*" telah menyakiti hati umat Islam seluruh dunia. Ia juga mengatakan, dalam menyikapi kejadian yang menyangkut penistaan terhadap Nabi Muhammad, ia bersama para pemuka agama yang tergabung dalam kelompoknya, menyepakati film itu sebagai film yang menghina Nabi Muhammad. Mereka juga sepakat tidak boleh ada orang yang menghina kepercayaan iman orang lain.

Kemudian pada berita yang diturunkan Republika pada 25 September 2012 yang berjudul "Dubes Scot Didesak DPR", terdapat kalimat "menghina Nabi Muhammad" yang disebutkan sebanyak dua kali. Pada paragraf penutup berita ini dituliskan bahwa, sejumlah restoran cepat saji di Jalan Sultan Alauddin, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Jalan Urip Sumoharjo, serta jalan lainnya disegel mahasiswa. Penyegehan itu sebagai bentuk protes mereka terhadap film "*Innocence of Muslims*" yang menghina Nabi Muhammad SAW.

Tetapi Republika juga menuliskan kalimat itu pada *caption* foto berita yang di tempatkan pada bagian atas sebelum tulisan beritanya. *Caption* foto tersebut berbunyi:

“Dubes AS Datangi DPR Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel dijaga ketat oleh pihak Pamdal DPR dan protokoler Kedutaan AS saat meninggalkan Gedung Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/9). Kedatangan Dubes AS tersebut untuk memenuhi undangan Komisi VIII DPR terkait film ‘Innocence of Muslims’ yang menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW”.

Penempatan kalimat “menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW” itu, bisa jadi merupakan strategi Republika dalam menyampaikan pesannya pada pembaca. Kalimat itu jika diletakkan pada bagian akhir atau penutup berita, akan jarang dibaca oleh pembacanya. Namun jika kalimat itu disertakan pula dalam *caption* foto yang mendukung berita, maka pembaca pun akan segera menangkap bahwa film ‘*Innocence of Muslims*’ itu film yang menghina Islam dan Nabi Muhammad. Karena umumnya, orang akan lebih tertarik pada berita yang memiliki gambar, dan gambar atau foto itulah yang kemudian mereka lihat dan baca pertama kali, sebelum membaca artikel beritanya secara utuh.

Selain itu, Republika juga mengetengahkan pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam edisinya 26 September 2012, Republika mengangkat berita yang berjudul “Dunia Butuh Aturan Antipenistaan”. Presiden SBY yang menyampaikan usulan dibentuknya aturan antipenistaan agama di sidang PBB, menyebut film “*Innocence of Muslims*” sebagai film yang menistakan agama. SBY menyebut film itu saat menyampaikan pidatonya mengenai masih adanya penghinaan, permusuhan, maupun kekerasan atas nama

agama atau keyakinan. SBY kemudian mencontohkan film "*Innocence of Muslims*" sebagai kasus penistaan agama.

Adanya pernyataan dari Presiden SBY ini tentunya semakin memperkuat frame Republika dalam memandang film "*Innocence of Muslims*". Frame ini juga akan berdampak pada pembacanya yang mayoritas beragama Islam serta warga negara Indonesia. Sebab, orang nomor 1 di Indonesia yang menjadi sumber berita itu, juga menganggap film "*Innocence of Muslims*" sebagai film yang menistakan Islam.

Kemudian pada 28 September 2012, Republika juga kembali menurunkan berita yang berkaitan dengan film "*Innocence of Muslims*". Sekalipun berita yang berjudul "Melawan Poster Anti-Islam di New York" ini menceritakan tentang penangkapan seorang jurnalis Amerika keturunan Mesir oleh Aparat AS, tapi dalam berita ini juga sedikit disinggung mengenai film "*Innocence of Muslims*". Berita mengenai film ini dituliskan atau tepatnya diselipkan pada satu paragraf berita dalam alinea ke-5 dari keseluruhan alinea yang berjumlah 11 alinea.

"Aksi Eltahawy ini memperlihatkan bagaimana realitas kebijakan Pemerintah AS terhadap Islam. Karena berdekatan dengan aksi Eltahawy, publik masih ingat bagaimana video the Innocence of Muslims menghina Islam dan menimbulkan kerusuhan di berbagai negara. Bedanya, Elthawy ditangkap polisi karena mencoret poster anti-Islam. Sementara pembuat film the Innocence of Muslims hingga kini bebas melenggang."

Satu paragraf di atas, cukup mengingatkan memori pembacanya akan adanya film yang isinya menghina Islam. Setelah pembaca membaca rentetan kalimat yang menceritakan penangkapan Eltahawy, jurnalis asal Amerika keturunan Mesir itu, pada pertengahan cerita, pembaca kemudian disuguhkan dengan berita mengenai film "*Innocence of Muslims*". Disuguhkannya kembali

berita ini, seakan mengingatkan pembacanya untuk tidak melupakan masalah yang timbul akibat film itu, film yang dinilai menghina Islam dan Nabi Muhammad. Ada beberapa kalimat pada berita ini yang juga menyinggung kebijakan kebebasan berekspresi AS, yang Republika katakan telah bias. Karena adanya perlakuan berbeda terhadap orang yang mengatakan atau melakukan sesuatu berdasar kebebasan berekspresi.

Pernyataan senada juga keluar dari beberapa orang yang melakukan demonstrasi memprotes beredarnya film "*Innocence of Muslims*". Menurut para demonstran yang tertulis dalam berita 1 Oktober 2012 berjudul "Percepat Protokol Antipenistaan", pembuatan film itu berlindung di balik kebebasan berekspresi. Sedang hal itu menurut para demonstran, merupakan bentuk penghinaan terhadap agama Islam. Karena itulah mereka melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap film itu. Demonstrasi itu juga sebagai bentuk protes keras dan keberatan atas penghinaan pada agama Islam yang ditampilkan melalui film.

Selain itu, Republika juga menyertakan sebuah gambar atau foto pada berita ini. Foto ini disertai *caption* yang menjelaskan tentang aksi demonstrasi dari ribuan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Dalam *caption* juga dijelaskan, para demonstran itu mengecam penistaan agama melalui film "*Innocence of Muslims*", mengutuk pelakunya, dan mengecam Pemerintah AS yang lamban menghukum pelaku tindakan tersebut. Dari sini kembali terlihat, bahwa film "*Innocence of Muslims*" tetap dianggap sebagai film yang menghina atau menistakan Islam.

b. AS dan Obama Cenderung Berpihak pada Pembuat Film

Pada item berita 14 September 2012 “Warga Sanaa Serbu Kedubes AS”, Republika mengangkat aksi demonstrasi yang terjadi di Sanaa, Yaman. Sejak pertama kali berita mengenai sikap atas film “*Innocence of Muslims*” diturunkan, Republika telah menyebutkan bahwa asal muasal terjadinya demonstrasi atau protes disebabkan oleh beredarnya film tersebut. Hal itu tercermin dalam *lead* berita

Ratusan orang menyerbu Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Sanaa, Yaman, memprotes film yang menghina Nabi Muhammad, Kamis (13/9). Petugas keamanan berusaha menghambat langkah mereka dengan menembakkan senjata ke udara. Pengunjuk rasa yang kebanyakan anak-anak muda itu memecahkan jendela pos keamanan yang berada di luar kedutaan dengan batu.

Secara sintaksis, periset utama melihat Republika menyebutkan latar belakang terjadinya protes di Sanaa, Yaman, dipicu oleh film yang menghina Nabi Muhammad. Walau pun pada *lead* tidak disebutkan bahwa film yang dimaksud adalah “*Innocence of Muslims*”, tiga item berita lainnya yang diturunkan pada hari yang sama telah menyebutkan bahwa film “*Innocence of Muslims*” adalah film yang menghina Nabi Muhammad. Periset triangular juga melihat kemunculan film “*Innocence of Muslims*” sebagai masalah besar yang mengakibatkan terjadinya protes tersebut.

Akan tetapi, secara tematik, Republika yang juga mengetengahkan sikap Presiden Amerika Serikat (AS) Barrack Obama dan Pemerintahnya, tidak satu pun memuat sikap yang tertuju pada film “*Innocence of Muslims*”. Republika hanya menyebutkan Obama dan AS berniat untuk menyelidiki serangan yang terjadi di Benghazi, Libya. Tiga paragraf berita menjelaskan hal tersebut:

“...Ini serangan yang hampir sama pada Kedubes AS di Kairo serta di Konsulat di Benghazi, Libya, pada Selasa (11/9) malam. Amerika Serikat (AS) dan Libya sepakat bekerja sama menyelidiki serangan mematikan di konsulat di Benghazi.

Gedung Putih menyatakan, Presiden Barrack Obama dan Mohamed Magarief melakukan pembicaraan mengenai hal itu pada Rabu (12/9) malam. Obama menegaskan, AS akan bermitra dengan Libya untuk menghadirkan keadilan pada korban yang meninggal dan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku pembunuhan.

Demi menjaga keamanan, Pemerintah AS memerintahkan evakuasi seluruh personel perwakilannya dari Benghazi ke Tripoli. Sejumlah pejabat AS menyatakan, dua kapal penghancur siap dikirimkan ke pantai Libya agar memudahkan menyerang sasaran. Tim keamanan antiteroris dari marinir diberangkatkan untuk membantu meningkatkan keamanan di Libya.”

Pernyataan Obama tersebut jelas mengesankan bahwa dirinya lebih memandang serius pada siapa yang menyebabkan kematian Duta Besarnya di Libya, serta yang menyerang kantor kedutaan dan konsulat AS.

Pada 17 September 2012 Republika menurunkan berita berjudul “AS Tarik Staf Kedubes di Sudan”. Menurut periset utama, berita ini seolah menunjukkan kelemahan AS yang tidak mampu menjaga keamanan warganya, karena terjadinya protes anti-Amerika. Di samping itu, judul berita ini diinterpretasikan oleh periset triangular bahwa AS takut hal serupa seperti yang terjadi di konsulat AS di Benghazi, Libya, terulang kembali dan menelan korban jiwa dari pihak AS.

Secara tematik, berita ini juga mengangkat tiga isu berbeda, *pertama* mengenai permintaan Pemerintah AS kepada semua warga, keluarga dan staf kedutaan AS yang berada di Sudan dan Tunisia untuk meninggalkan dua negara tersebut. Hal ini untuk menghindari kemarahan para demonstran. *Kedua*, penolakan pemerintah Sudan pada pemerintah AS yang ingin mengirimkan tim

elite marinerinya, guna menjaga keamanan warga dan duta besarnya. Akan tetapi Sudan menolaknya dengan alasan pemerintahnya mampu melindungi semua misi diplomatik yang ada di negara tersebut.

Ketiga, Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton menekankan permasalahan pada penegakan hukum bagi penyerang konsulat di Benghazi.

Menurut Victoria Nuland, Hillary berbicara dengan perdana menteri Libya, presiden Somalia, dan menteri luar negeri (menlu) Inggris, Mesir, Prancis, Arab Saudi, dan Turki. Saat menelepon Perdana Menteri Libya Mustafa Abu Shagour, Hillary menekankan pentingnya penegakan hukum pada penyerang konsulat di Benghazi. Shagour meyakinkan hal itu akan terwujud dan pemerintahnya sudah bertindak. Libya mengidentifikasi 50 orang terlibat dalam penyerangan selain empat orang yang sudah ditahan.

Berita ini menempatkan pernyataan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, pada paragraf penutup. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan Hillary dipandang sebagai hal yang kurang penting, jika dibandingkan dengan lima paragraf sebelumnya, yang menceritakan permintaan Pemerintah AS untuk menarik anggota keluarga serta staf kedutaan besarnya di Sudan dan Tunisia.

Namun, yang perlu digaris bawahi pada paragraf penutup tersebut dan satu kalimat terakhir paragraf kelima, menyebutkan bahwa Hillary Clinton melakukan pembicaraan dengan tujuh pejabat negara mengenai aksi unjuk rasa terhadap perwakilan AS dan pentingnya penegakan hukum pada penyerang konsulat di Benghazi. Bahkan pada paragraf penutup itu juga dituliskan kalimat "*Hillary menekankan pentingnya penegakan hukum pada penyerang konsulat di Benghazi*". Dari kalimat tersebut jelas menunjukkan bahwa Pemerintah AS

memang lebih mementingkan penegakan hukum pada pelaku serangan di konsulat AS di Benghazi daripada pembuat film yang memicu terjadinya serangan tersebut.

Sikap Obama berikutnya ditunjukkan pada berita 17 September 2012 berjudul "Obama: AS tak Setuju Upaya Hina Islam". Sekilas dari judul berita menunjukkan bahwa Obama memang tidak menghendaki adanya penghinaan terhadap Islam. Periset triangular juga berpendapat, judul tersebut hanya sebatas menunjukkan alibi (alasan) Obama. Obama berkata bahwa dirinya tidak setuju adanya upaya penghinaan terhadap Islam, namun Obama masih belum bisa menentukan sikap tegas pada orang yang menghina Islam tersebut. Lead dan paragraf pertama berita juga menjelaskan hal tersebut

Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, mengeluarkan pernyataan soal film the Innocence of Muslims yang memicu kerusuhan di Timur Tengah dan mengakibatkan empat diplomat AS meninggal. Obama, meski tidak menyebut judul film dan motif sutradaranya, mengatakan tidak setuju dengan upaya-upaya mencemarkan nama baik Islam.

"Saya katakan dengan tegas, AS sangat menghormati umat beragama, apa pun," kata Obama dalam pernyataan di radio, Ahad (16/9). Ia menambahkan, dengan demikian, seharusnya tidak ada justifikasi apa pun untuk kekerasan terhadap kedutaan besar AS dan konsulat di beberapa negara.

Dalam pernyataan Obama di atas dikatakan bahwa dirinya tidak meyetujui adanya upaya-upaya menghina Islam atau pun agama lain. Karena AS sangat menghormati umat beragama apa pun. Akan tetapi, ada pernyataan lain yang mengatakan bahwa dirinya juga tidak setuju jika ada aksi kekerasan yang dilakukan terhadap kedutaan besar AS dan konsulatnya. Hal ini seakan menunjukkan kerancuan dari pernyataan Obama sendiri.

Obama mengaku tidak setuju dengan upaya penghinaan terhadap agama,

namun jika ada yang melakukan aksi dengan cara kekerasan untuk menolak penghinaan tersebut Obama tidak menyetujuinya. Bahkan Obama mengatakan tidak ada justifikasi apa pun. Ini mengartikan, bahwa dalam merespon tindak kekerasan yang dilakukan karena penghinaan agama, tidak ada alasan atau putusan yang bisa dilakukan oleh AS berdasarkan hati nurani. Tapi tetap harus diputuskan melalui hukum. Sementara untuk pelaku yang melakukan penghinaan, Obama tidak memberikan pernyataannya.

Pada berita ini, peristiwa beredarnya film "*Innocence of Muslims*" yang menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW juga dikaitkan dengan politik.

Isu film ini dan aksi rusuh di beberapa kedubes AS di sejumlah negara menjadi bulan-bulanan politisi di AS karena terjadi menjelang pemilihan presiden. Rival Obama dari Partai Republik, Mitt Romney, memanfaatkan isu film dan kerusuhan dengan mengatakan reaksi Obama terhadap peristiwa itu justru memperlihatkan kelemahan AS.

Dengan isu seperti itu mengindikasikan bahwa AS pada masa rezim Obama terlihat inconsistent (tidak konsisten) dengan prinsip demokrasi yang mereka anut. Sementara itu, demokrasi yang dijunjung di AS sendiri telah menjadi asas bagi warganya untuk saling toleransi dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Akan tetapi, dengan munculnya film yang menghina Islam itu, seolah memperlihatkan AS lupa akan prinsip demonstrasinya. Mitt Romney, sebagai rival kampanye pemilihan President di AS telah mengambil kesempatan dengan beredarnya isu tersebut untuk memojokkan Obama. Karena peristiwa itu terjadi menjelang pemilu AS.

Kemudian pada paragraf keenam berita ini juga sedikit disinggung mengenai sikap AS terhadap pembuat film "*Innocence of Muslims*".

Nakoula, kata Whitmore, membantah keterlibatannya dalam film berdurasi 13 menit yang diunggah di Youtube sejak 2 Juli lalu. Pejabat AS mengatakan, mereka tidak menginvestigasi secara langsung tentang film itu meski jelas dampaknya memicu kerusuhan. Ini karena mereka berpatokan pada kebebasan berekspresi (termasuk memproduksi film) tidak masuk dalam kategori kriminal di AS. Pejabat AS menyelidiki Nakoula lewat dugaan pelanggaran masa percobaan.

Dalam prinsip demokrasi yang dianut oleh AS, ada aturan yang juga menyatakan bahwa AS menghormati kebebasan berekspresi warganya. Jadi, apa pun yang ditampilkan oleh warga negaranya, selama itu berada dalam ranah ekspresi atau seni, maka hal itu tidak tergolong tindak kriminal, termasuk pula di dalamnya memproduksi film. Selain itu, AS juga menganggap kebebasan berekspresi itu sebagai salah satu dari HAM, karena mereka juga menganut paham Liberalisme.

Itulah sebabnya, AS tidak bisa mengeluarkan sikap tegas pada pembuat film yang jelas-jelas menimbulkan kerusuhan di berbagai negara. Akhirnya, sutradara itu pun diselidiki melalui dugaan pelanggaran masa percobaan, bukan atas tuduhan menghina agama lain yang memicu kekerasan dan korban jiwa. Padahal, hampir dari semua negara-negara yang melakukan aksi protes atas film "*Innocence of Muslims*" tersebut, juga menuntut agar pembuat film dihukum atau ditahan atas tuduhan penghinaan pada agama lain. Unikny lagi, dengan klaim-klaimnya sebagai penegak sistem demokrasi dan kebebasan dunia, Amerika terkadang justru melakukan berbagai pelanggaran HAM dengan dalih terorisme. Sementara kata terorisme selalu dialamatkan pada umat Islam, disebabkan terjadinya peristiwa 11 September 2001.

Hal ini pula yang kemudian seolah menunjukkan bahwa AS lebih memihak pembuat film. Selain karena sikap tegasnya yang belum juga diputuskan, pembuat film hanya ditahan atas tuduhan pelanggaran hukuman masa percobaan selama lima tahun, terhitung sejak tahun 2010. Menurut periset triangular, isu dari film ini juga mengandung unsur politik. Mengingat yang menjadi musuh Barat saat ini adalah Islam, “perang” opini dalam film “*Innocence of Muslims*” juga terlihat, sehingga penonton seolah didoktrin dengan anggapan bahwa Islam itu jelek.

Pada berita edisi 21 September 2012 yang berjudul “Cinta Rasul, Cinta Perdamaian”, sikap Menteri Luar Negeri AS juga disertakan dalam tulisan berita yang berbentuk *feature* ini. Mulanya, penulis berita menyebutkan bahwa Hillary Clinton juga tidak menyetujui munculnya film “*Innocence of Muslims*”, seperti yang tertulis pada lead berita ini:

Film “Innocence of Muslims” memicu aksi-aksi protes dan kecaman dari kaum Muslimin di berbagai belahan dunia. Kecaman juga datang dari para pemimpin dunia non-Muslim, bahkan dari negeri asal pembuat dan penyebar film tersebut, Amerika Serikat (AS). Dari kantornya, Kamis (13/9), Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, menyebut film “Innocence of Muslims” yang dibuat Sam Bacile alias Nakoula Basseley Nakoula, warga Amerika Serikat berdarah Mesir, sebagai video yang menjijikkan dan tercela.

Kata “*menjijikkan*” dan “*tercela*” pada kalimat di atas, menunjukkan bahwa film “*Innocence of Muslims*” itu tidak layak ditonton. Kata *menjijikkan* berasal dari kata *jijik* yang biasanya digunakan sebagai kata seru untuk menyatakan rasa tidak suka karena keji, kotor, dan sebagainya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Menlu AS sendiri di sini dikategorikan sebagai orang yang juga tidak menyukai adanya film tersebut. Demikian pula dengan kata *tercela*

dalam kalimat di atas, juga menunjukkan bahwa film itu adalah film yang tidak pantas untuk dilihat.

Akan tetapi, pada alinea kedua berita ini dituliskan mengenai sikap lain Menlu AS tersebut pada pembuat film, sekalipun dalam pernyataannya Hillary tidak menyebutkan secara langsung pembuat dan produser film "*Innocence of Muslims*".

Namun, AS tampak tak berdaya untuk menindak para pembuat film tersebut. Ini karena adanya ketentuan tentang kebebasan yang dilindungi dalam konstitusi negara AS dan telah ada sejak lama. "Saya tahu sulit bagi sebagian orang untuk memahami bahwa AS tak bisa atau tidak begitu saja mencegah video tercela seperti ini muncul ke permukaan. Dunia saat ini dengan teknologi terkini, hal itu mustahil. Bahkan walaupun mungkin, negara kami punya tradisi panjang kebebasan berekspresi yang dilindungi dalam konsitusi dan hukum kami, dan kami tidak bisa menghentikan setiap warga negara yang mengekspresikan pandangan mereka sekalipun itu tidak disukai," kata Hillary.

Sikap yang ditunjukkan Hillary melalui pernyataannya tersebut seolah memberikan pemahaman, bahwa pembuat film itu tidak bersalah menurut hukum dan ketentuan konstitusi AS. Terlebih lagi dengan adanya pernyataan dari Hillary yang berkata "*Bahkan walaupun mungkin, negara kami punya tradisi panjang kebebasan berekspresi yang dilindungi dalam konsitusi dan hukum kami, dan kami tidak bisa menghentikan setiap warga negara yang mengekspresikan pandangan mereka sekalipun itu tidak disukai,*" semakin menggambarkan bahwa AS seolah menerapkan standar ganda dalam sistem demokrasinya, khususnya kepada Islam dan kaum Muslimin. Selain itu, pernyataan Hillary itu sama saja artinya dengan merestui dan membiarkan tindakan warga negaranya untuk melecehkan dan menghina umat Islam, al-Quran, serta Nabi Muhammad.

Selasa, 25 September 2012, Republika kembali menurunkan berita yang secara tersirat menggambarkan bahwa AS masih belum bersikap tegas pada pembuat film "*Innocence of Muslims*". Pada edisi ini, berita yang diangkat mengenai desakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) kepada Pemerintah Amerika Serikat, yang dalam hal ini diwakili oleh Duta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel.

Di dalam ruang pertemuan, Komisi VIII, sikap tegas Pemerintah AS terhadap pembuat film penista Nabi itu akan mencerminkan sikap AS yang pro-perdamaian. Sikap tegas juga akan meminimalisasi sikap diskriminasi rasial di Amerika Serikat.

Komisi VIII mengatakan AS harus berperan menciptakan perdamaian dunia. Komisi juga meminta agar Pemerintah AS melalui dubesnya menjelaskan posisi Pemerintah AS, terkait kontroversi film yang menimbulkan gejolak dan demonstrasi pada masyarakat luas, termasuk di Indonesia itu. "Sampai sekarang kami belum tahu, apakah sang sutradara akan dihukum atau tidak?" kata Jazuli.

Berita di atas seakan memberikan kesan jika Pemerintah AS dapat bersikap tegas dalam masalah kontroversi film "*Innocence of Muslims*", hal itu juga akan berdampak positif bagi citra mereka. Masyarakat luas akan percaya bahwa AS pro-perdamaian, seperti yang sering dikatakan oleh Pemerintah AS. Selain itu, permintaan Pemerintah Indonesia pada Pemerintah AS untuk menjelaskan posisi AS terkait kontroversi film tersebut, juga seakan menunjukkan bahwa Pemerintah AS masih belum mengambil sikap tegas dalam menyikapi film dan pembuat film. Hal ini diperkuat kembali dengan adanya pernyataan Wakil Ketua Komisi Agama (VIII) DPR, Jazuli Juwani, yang mengatakan bahwa mereka belum mengetahui apakah sutradara film tersebut akan dihukum atau tidak.

Sehari kemudian, tepatnya 26 September 2012, Republika menurunkan dua berita yang berisi sikap Presiden Obama dan Menteri Luar Negeri AS, Hillary

Clinton, dalam menyikapi munculnya film "*Innocence of Muslims*". Berita pertama yang dijadikan *headline* berjudul "Dunia Butuh Aturan Antipenistaan". Pada berita ini terdapat *taiching* (satu kalimat yang mencerminkan isi berita atau bagian terpenting dari berita) yang berbunyi "Presiden Obama enggan menghukum pembuat film penista Nabi". *Taiching* ini di tempatkan di bawah judul berita. Selain memberitakan usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk membuat aturan antipenistaan agama, adanya kalimat itu sebenarnya juga mencerminkan isi terpenting dari berita yang disampaikan.

Dari kalimat itu, pembaca semakin mendapat pemahaman bahwa Presiden Obama lebih memihak pada pembuat film. Sikap Obama yang mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengambil tindakan terhadap pembuat film, karena AS masih berpegang pada kebebasan berekspresi yang ada dalam konstitusinya. Selain itu, pernyataan Obama yang berbunyi "Tapi, saya tidak bisa mencegah mereka melakukan itu. Saya membela hak mereka mengatakan itu," semakin memperkuat keberpihakan Obama. Apalagi dalam tulisan berita pada edisi ini diceritakan pula, bahwa pernyataan Obama tersebut mendapat sambutan tepuk tangan dari peserta sidang PBB.

Berita kedua yang turun pada hari yang sama berjudul "Hillary Clinton Harapkan Toleransi". Dari berita ini, terdapat dua sudut pandang berbeda dari tiga narasumber berita, dalam menyikapi film "*Innocence of Muslims*". Pada satu sisi yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, mengharapkan dan menekankan toleransi dalam upaya protes yang dilakukan terhadap film yang menistakan Islam dan Nabi Muhammad itu. Namun di sisi lain yang diwakili oleh

ulama dari Gaza Palestina, Syekh Hisham Akram, dan Direktur Center for Muslim-Christian Understanding, John Voll, mengatakan toleransi tidak akan ada gunanya, jika garis batas yang telah ditentukan itu dilanggar atau diterabas.

New York – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton berharap, Muslim menunjukkan kehormatannya dan tak melakukan kekerasan dalam memprotes film yang dianggap menghina. Ia menekankan toleransi di antara perbedaan. Namun, umat Islam mempertanyakan bagaimana toleransi bisa tercapai jika satu pihak telah melanggar batas.

Berbicara sebelum bertemu presiden Afghanistan, Mesir, Libya, dan Pakistan, Senin (24/9), Hillary menyatakan, AS akan selalu menghargai kebebasan berpendapat. Lontaran protes tetap akan dihormati selama dilakukan secara damai. Menurut dia, kehormatan tak datang dari tindakan mencemooh pihak lainnya, tetapi lahir melalui tanggung jawab dan mengembangkan nilai kemanusiaan.

Secara tematik, adanya pernyataan tambahan “*Namun, umat Islam mempertanyakan bagaimana toleransi bisa tercapai jika satu pihak telah melanggar batas*” sebenarnya bukan pernyataan dari Hillary sendiri. Meski demikian, adanya pernyataan tambahan tersebut seakan menunjukkan bahwa yang dimaksud satu pihak telah melanggar batas itu adalah pihak AS. Ini karena beredarnya film yang sekali lagi menggemparkan umat Islam di dunia ini--sebelumnya ada film Fitna yang juga menghina Islam melalui ayat-ayat Al-Quran yang diubah arti dan maksudnya--diproduksi serta disebar oleh Nakoula Basseley Nakoula atau Sam Bacile, warga Kristen Koptik AS.

Dari pernyataan Hillary yang terangkum dalam empat paragraf dalam berita ini, tidak ditemukan pernyataan Hillary mengenai pembuat film “*Innocence of Muslims*”. Akan tetapi, Hillary lebih menitik beratkan pernyataannya terhadap apa yang diakibatkan oleh film tersebut. Ia menyatakan bahwa kekerasan dalam

menyikapi film itu tidak dapat membantu dalam peningkatan standar hidup, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pembangunan masyarakat. Dalam pernyataannya itu, secara tersirat Hillary justru terlihat menyalahkan orang-orang yang memprotes adanya film "*Innocence of Muslims*" itu. Hal ini karena, ada beberapa kalimat Hillary yang lebih terkesan menyindir orang-orang yang melakukan protes dengan kekerasan.

Satu lagi berita yang memuat sikap Pemerintah AS terdapat pada berita edisi 27 September 2012 berjudul "AS Junjung Kebebasan Berekspresi". Berita yang merupakan wawancara khusus wartawan Republika dengan Dubes AS untuk Indonesia Scot A Marciel ini, ternyata juga lebih melihat kasus film "*Innocence of Muslims*" dari perspektif kebebasan berekspresi. Pemerintah AS yang diwakili oleh Duta Besarnya di Indonesia, Scot Marciel, juga menyatakan bahwa Presiden Obama tetap menolak pesan film itu karena menghina Muslim. Namun demikian, Pemerintah AS juga tetap menjunjung kebebasan berekspresi.

Beberapa poin jawaban dalam wawancara khusus itu dan mengarah pada sikap AS yang cenderung berpihak pada pembuat film, diantaranya :

- Sayangnya di era teknologi seperti sekarang ini, akan selalu ada orang yang mengatakan hal-hal yang menyinggung orang, tidak hanya tentang Islam, tapi juga hal lain. Di sisi lain, kami juga percaya dengan kemerdekaan mengutarakan pendapat. Karena kalau Anda mulai membatasi kemerdekaan mengutarakan pendapat, tanpa disadari Anda akan membatasi kemerdekaan-kemerdekaan lain, seperti kemerdekaan memeluk agama.
- Langkah kami menolak pesan yang disampaikan film ini dan kita akan

terus membangun jembatan yang telah terjalin dengan masyarakat Muslim. Meskipun, sesuai konstitusi, kami wajib melindungi orang-orang yang mengungkapkan ekspresinya walau pendapat mereka tidak kita setujui.

- Di negara demokrasi maupun nondemokrasi, akan selalu ada orang yang menghina perbedaan, baik kelompok maupun etnis yang berbeda. Bagian dari demokrasi adalah membolehkan semua orang bebas berekspresi. Pengalaman kami hampir 250 tahun sebagai bangsa, kemerdekaan untuk berekspresi bersama dengan kemerdekaan lain dalam sebuah hukum, akan memperkuat demokrasi.
- Saya tidak yakin kalau orang menghina agama lain berdasarkan demokrasi. Saya kira sudah jelas Presiden Obama dan banyak orang lain di Amerika menolak pesan yang menghina tersebut. Meski untuk memastikan kemerdekaan yang lain, kami tidak bisa membatasi kebebasan yang tidak disukai orang.
- Kami tidak punya standar ganda sama sekali. Bahkan, kami melindungi kebebasan berekspresi. Sayangnya, seandainya terdapat pidato-pidato yang menghina Kristen, Yahudi, dan Islam, konstitusi kami menerapkan hal itu tergolong kebebasan berekspresi. Jadi, tidak ada perlakuan yang berbeda mengenai pernyataan apa pun tentang Islam maupun agama lain.

Pada berita ini, terlihat kembali bagaimana AS memandang dan menyikapi fenomena penghinaan agama melalui film "*Innocence of Muslims*". Demokrasi yang diyakini oleh bangsa Amerika sebagai prinsip dasar pembangunan watak bangsa, jika dilihat dari berita-berita yang diturunkan Republika, demokrasi itu seakan hanya milik orang-orang tertentu. Kebebasan beragama yang menjadi isu cukup hangat di tengah masyarakat Amerika yang cenderung sekuler, sepanjang abad ke-19 bahkan hingga abad ke-21, masih belum mendapatkan fokus perhatian utama dari para petinggi pemerintahnya. Hal ini juga dapat dilihat kembali dari

peristiwa beredarnya film “*Innocence of Muslims*” yang isinya menghina Islam, namun Pemerintah AS tidak menentukan sikap tegas pada pembuat film, karena berpatokan pada kebebasan berekspresi yang ditetapkan oleh konstitusi.

c. Umat Islam Dilarang Anarkis

Beredarnya film “*Innocence of Muslims*” memang menyulut banyak aksi protes dan demonstrasi di sejumlah negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Tidak sedikit pula ujung dari aksi protes dan demonstrasi tersebut berakhir ricuh, anarkis atau dengan kekerasan. Karenanya, banyak pula pihak serta tokoh-tokoh Islam yang menghimbau agar umat Islam tidak melakukan aksinya dengan kekerasan atau anarkis. Republika pun merangkum pernyataan dan himbauan tokoh-tokoh Muslim tersebut dalam pemberitaannya.

Baru enam hari film “*Innocence of Muslims*” beredar di *youtube*, protes sudah terjadi di sepuluh negara dunia, yaitu Libya, Sudan, Tunisia, Lebanon, Yaman, Mesir, Iran, Kuwait, Prancis, dan Australia. Begitulah yang dijelaskan dalam poin-poin berita Republika terbitan 17 September 2012. Berita pada edisi ini berjudul “Kekerasan Tak Dibenarkan”, dengan warna huruf pada judulnya yang berwarna merah, jelas sekali terlihat bahwa Republika tidak menghendaki adanya aksi kekerasan dalam memprotes film yang dinilai menistakan Islam tersebut.

Secara tematik, koherensi yang menunjukkan bahwa kekerasan tidak dibenarkan dalam aksi unjuk rasa umat Islam terdapat pada paragraf pertama hingga ketujuh. Adapun koherensi tersebut terangkum dalam poin-poin di bawah

ini:

- Paragraf 1: Mufti Arab Saudi Sheikh Abdulaziz bin Abdullah al-Sheikh menyarankan agar umat Islam tidak melakukan kekerasan dalam protes film yang menghina Nabi Muhammad.
- Paragraf 2: pernyataan Mufti Arab Saudi bahwa demonstrasi dengan kekerasan secara tidak sadar justru membenarkan apa yang ada dalam film.
- Paragraf 3: agama melarang kekerasan dalam menghukum orang-orang tak berdosa dan bersalah.
- Paragraf 4: Mufti Al Azhar Sheikh Ahmed al-Tayeb meminta PBB untuk bertindak tegas pada ekspresi yang mengandung kebencian pada Islam.
- Paragraf 5: pembelaan pada Nabi Muhammad tidak hanya melalui unjuk rasa.
- Paragraf 6: Presiden Burkina Faso Blaise Compaore meminta Muslim untuk menghentikan kekerasan.
- Paragraf 7: pernyataan Compaore, kekerasan tidak semestinya menjadi pilihan Muslim dalam merespons provokasi.

Kemudian pada item berita edisi 21 September 2012 berjudul “Cinta Rasul, Cinta Perdamaian”, Republika menampilkannya sebagai berita yang tergolong soft news atau sebagai feature news. Berita feature biasanya lebih menampilkan sisi humanis dan mengandung pesan moral. Dalam berita feature ini, penulisnya merupakan Koordinator Pengkajian Jakarta Islamic Centre (JIC). Penulisnya mengajak umat Muslim untuk tidak berlaku atau memprotes penghinaan kepada Nabi Muhammad dengan cara anarkis. Ia juga menyertakan

pendapat dari Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dan Pimpinan Majelis Rasulullah, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa.

Secara retorik, judul pada berita ini sebenarnya telah mengisyaratkan pada umat Muslim, bahwa jika ia mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW maka seharusnya ia juga mencintai perdamaian. Jika diimplikasikan pada peristiwa beredarnya film yang dikatakan sebagai film menghina Nabi Muhammad SAW, maka judul berita ini memiliki makna umat Muslim yang mengaku mencintai Nabinya sepatutnya tidak melakukan aksi kekerasan untuk menentang film tersebut. Sebab aksi kekerasan bertolak belakang dengan aksi damai.

Dalam berita ini penulisnya juga mengutip pernyataan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Majelis Ulama Rasulullah, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, untuk dijadikan pegangan bagi umat Muslim saat menyikapi berbagai produk dan penghinaan terhadap Rasulullah. *Pertama*, gembira dan bangga dengan bangkitnya semangat Muslimin di seluruh dunia, yang membela Nabi dari penghinaan orang-orang yang menghina. *Kedua*, berkewajiban mengambil tindakan, namun bukan sebatas demo dan ribut tidak menentu. Tetapi membela Nabi melalui pemberian pemahaman yang utuh tentang Nabi Muhammad, baik tentang keluhuran ajarannya, budi pekertinya yang tinggi, atau pun kelembutannya.

Kemudian poin *ketiga*, kejadian seperti itu bisa jadi merupakan kesengajaan untuk memancing kemarahan umat Muslim guna mengetahui titik kelemahannya. Karenanya, kejadian seperti itu merupakan cambuk bagi umat

Muslim sendiri agar lebih giat lagi dalam mengenalkan kemuliaan, keindahan, dan kesempurnaan ajaran Nabi Muhammad. Hal itu pun bisa dilakukan dengan menguasai atau memanfaatkan media dan jejaring sosial serta dunia maya untuk memperkenalkan pada publik tentang Nabi Muhammad. Dari ketiga poin tersebut, dapat terlihat dengan jelas bahwa di sini penulisnya tidak mendukung perbuatan anarkis atau kekerasan dalam menyikapi film “Innocence of Muslims”.

Akhirulakal, mari kita menyambut baik tanggapan yang disampaikan oleh Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Lakukanlah aksi-aksi untuk mengenalkan kepada masyarakat dunia tentang sosok Muhammad. Ini akan menjadi pembelaan yang elegan. Tidak ada gunanya api dilawan dengan api, kemarahan dilawan dengan kemarahan, biar air yang menghadapi dan memadamkan api. Protes-protes tertib dan jauh dari anarkis serta kerja-kerja dakwah menyiarkan keagungan Nabi akan membawa dampak yang lebih positif dan menarik simpati masyarakat dunia.

Inilah yang menjadi inti pesan dalam berita *feature* yang berjudul “Cinta Rasul, Cinta Perdamaian” ini. Satu paragraf sebelum paragraf terakhir ini, menyampaikan pesan pada pembacanya bahwa tindakan yang jauh dari anarkislah yang harusnya dilakukan umat Muslim, jika ada penghinaan yang ditujukan pada agamanya, Nabinya, serta keluarga dan sahabat Nabinya.

Pada tanggal 21 September 2012 ini, Republika juga menurunkan berita berjudul “Umat Diimbau tidak anarkis”. Dari judul berita ini, Republika kembali menjelaskan pada umat Muslim untuk tidak menyikapi film “*Innocence of Muslims*” dengan anarkis. Dalam lead berita ini dijelaskan jika tindakan anarkis itu tidak tepat sasaran.

Umat Islam diimbau tidak bertindak anarkis dalam memprotes film “Innocence of Muslims” (IOM). Tindakan anarkis dipandang tidak tepat sasaran.

Pada berita ini, Republika juga mengambil dua narasumber yang keduanya sama-sama menolak aksi anarkis dalam menyikapi film. Keduanya adalah Ketua Tanfidziah pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Abdullah Syamsul Arifin dan Ketua Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al Hurriyah Institut Pertanian Bogor (IPB), Khairil Anwar. Selain itu, berita ini jika dilihat dari segi skrip atau penggunaan 5 W 1 H, akan terlihat lebih menonjolkan sisi “*Why*”, yaitu mengapa ada himbauan untuk tidak bertindak anarkis.

Pada berita ini, Republika menggambarkan unsur “*Why*” tersebut melalui pernyataan-pernyataan dari kedua narasumbernya. Tujuh poin yang menjadi unsur “*Why*” pada berita ini, yakni tindakan anarkis dipandang tidak tepat sasaran; merusak dan menimbulkan korban jiwa; sudah ada pernyataan sikap dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengecam film “*Innocence of Muslims*”, sehingga yang dibutuhkan hanya permintaan sikap tegas pada Pemerintah AS dan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, bukan masyarakat; tindakan anarkis tidak ada gunanya; protes sebaiknya disampaikan dengan cara baik untuk menunjukkan pada dunia bahwa Islam cinta damai; film tidak akan berpengaruh pada dakwah Islam; dan masih ada cara lain yang bisa dilakukan, seperti menggalang suara untuk menolak film tersebut.

...Tindakan anarkis dipandang tidak tepat sasaran.

Ketua Tanfidziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Abdullah Syamsul Arifin mengatakan umat Muslim pantas marah dengan film itu. Namun, kemarahan itu tidak perlu berlebihan hingga merusak atau menimbulkan korban jiwa.

Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan sikapnya mengecam film anti-Islam tersebut. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga harus menekan pemerintah Amerika Serikat untuk

bertindak tegas pada terhadap pembuat film kontroversial itu. "Tidak perlu demo anarkis, apalagi sampai terjadi korban, baik dari pihak aparat kepolisian maupun pengunjung rasa," tutur anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember itu, Kamis (20/9), seperti dikutip Antara. Hal itu, kata dia, tidak ada gunanya.

... "Kita tentu sangat terusik dan tidak terima dengan film karya Sam Bacile itu. Namun, saya berharap agar protes disampaikan dengan cara yang baik dan tertib, supaya kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Islam cinta damai," katanya.

Pria yang akrab disapa Gus Aab itu optimistis film IOM tidak akan berpengaruh pada dakwah Islam yang dilakukan para ulama di seluruh dunia...

...Karena itu, bersama mahasiswa lainnya, para aktivis masjid IPB menggalang suara menolak film tersebut.

Secara tematik, berita ini seolah menunjukkan keterkaitan antara pernyataan yang dikeluarkan oleh Abdullah Syamsul Arifin, Ketua Tanfidziah PCNU Jember, dengan Khairil Azhar, Ketua LDK Al Hurriyah IPB. Padahal jika diperhatikan, kedua narasumber tersebut berada di tempat yang berjauhan. Akan tetapi, penempatan pernyataan dari kedua narasumber itulah yang menjadikan keduanya seakan berada pada satu tempat dan saling berkomentar. Pernyataan dari Khairil Azhar seolah menjadi jawaban atas pernyataan dan harapan Abdullah Syamsul Arifin, yang tidak menyetujui adanya aksi atau protes secara anarkis dalam menyikapi film "Innocence of Muslims".

Ketua Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al Hurriyah Institut Pertanian Bogor (IPB) Khairil Azhar menyatakan tidak akan melakukan aksi anarkis apalagi terprovokasi oleh film itu. "Tapi, kita tidak tinggal diam saja," tuturnya, Kamis (20/9).

Dia mengatakan, umat Islam tidak bisa menolerir pelecehan yang ditujukan kepada seorang manusia mulia serta suci, Rasulullah. Karena itu, bersama mahasiswa lainnya, para aktivis masjid IPB menggalang suara menolak film tersebut.

Pernyataan dari Khairil Azhar ini, diletakkan pada dua paragraf terakhir berita setelah enam paragraf sebelumnya yang berisi pernyataan Abdullah Syamsul Arifin. Inilah yang kemudian menjadikan pernyataan Khairil Azhar seakan menjadi jawaban atas pernyataan Abdullah Syamsul Arifin.

"*Religions for Peace* Kutuk Penistaan Islam", berita yang diterbitkan pada 24 September 2012 ini selain mengutuk upaya memecah belah kerukunan antarumat beragama di dunia, akibat beredarnya film "*Innocence of Muslims*", juga meminta semua pihak, termasuk umat Islam, untuk tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan kekerasan. William F Vendley, Sekretaris Jenderal *Religions for Peace*, yang menjadi narasumber pertama berita ini juga mengusulkan adanya dialog serta meningkatkan kerjasama antaragama, agar tidak ada lagi penghinaan agama atau upaya memecah belah kerukunan antarumat beragama yang telah terjalin.

d. Dukungan Untuk Protokol Antipenistaan Agama

Selain menyetujui adanya himbauan untuk tidak bertindak anarkis dalam menyikapi film "*Innocence of Muslims*", Republika juga mendukung adanya usulan agar dibentuk protokol antipenistaan agama. Hal ini dapat terlihat dari beberapa berita yang diturunkan oleh Republika mengenai usulan yang dicetuskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini. Pada edisi 24 September 2012, Republika menurunkan berita berjudul "Usul Indonesia Atas Protokol Antipenistaan Agama Positif". Dari judul berita ini terlihat dengan jelas bahwa Republika juga mendukung adanya usulan tersebut.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof Dr Hikmahanto Juwana menilai, usulan Indonesia atas Protokol Antipenistaan Agama di PBB sangat positif.

Dari lead berita di atas, dapat terlihat bahwa Republika juga memandang bahwa isu penodaan agama melalui film "*Innocence of Muslims*" juga termasuk dalam ranah hukum. Hal ini dibuktikan dengan pemilihan narasumber serta penyebutan secara langsung atas gelar dan kedudukan sumber berita. Selain itu, peristiwa yang diakibatkan dari beredarnya film tersebut juga menelan korban jiwa, karena adanya aksi kekerasan dalam memprotes film itu. Sementara segala hal yang menyangkut hidup dan mati seseorang itu juga berada dalam ranah hukum.

Istilah penistaan agama juga terkadang dianggap sebagai kebebasan berpendapat dan berekspresi, bukan sebagai tindakan kriminal. Inilah yang kemudian menjadikan Prof. Dr. Hikmahanto Juwana menilai positif usulan protokol antipenistaan agama. Tujuannya agar ada persamaan definisi mengenai istilah penistaan.

Presiden, atas nama Indonesia, berencana akan mengusulkan Protokol Antipenistaan Agama. "Ide ini tentu sangat positif dan perlu disampaikan secara konkret," ucapnya.

Presiden perlu menyampaikan bahwa protokol ini harus diwadahi dalam bentuk perjanjian internasional yang selanjutnya diikuti oleh para anggota PBB. "Inti dari protokol ini adalah setiap negara harus mempunyai definisi sama atas istilah penistaan."

...Kedua, dalam protokol perlu ditentukan bahwa pemerintah negara Barat wajib untuk sensitif ketika warganya melakukan penistaan agama.

Penggunaan kata "konkret" dalam berita di atas menunjukkan, usulan protokol antipenistaan agama tersebut diharapkan menjadi usulan yang nyata dan benar-benar ada. Selain itu usulan itu juga dapat terwujud, bukan hanya sekedar

wacana atau retorika. Demikian halnya dengan kata “wajib” yang menyertai pendapat ahli hukum internasional tersebut, bahwa negara Barat juga perlu sensitif dalam menanggapi hal yang berbau penistaan terhadap suatu agama, menunjukkan bahwa hal itu sangat penting dan harus dilakukan oleh negara Barat. Negara Barat, tidak boleh tidak melaksanakan atau menerapkan sensitivitasnya ketika mengetahui ada warganya yang melakukan penistaan agama, sehingga perbuatan penistaan itu tidak lagi tergolong dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat, karena hal itu melukai perasaan umat beragama.

Secara tematik, detail berita ini hanya mengambil satu sudut pandang, yakni dari segi hukum. Meski demikian, menurut narasumber ada dua hal yang menjadikan usulan protokol antipenistaan agama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, dinilai sangat positif dan perlu disampaikan. *Pertama*, karena belum adanya persamaan definisi atas istilah penistaan, sehingga negara-negara Barat dalam ketentuan konstitusi dan perundang-undangannya, masih menganggap “penistaan” sebagai kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, serta tidak tergolong dalam tindakan kriminal. Sementara itu, negara-negara Non-Barat beranggapan sebaliknya atas istilah “penistaan” ini.

Kedua, karena kurangnya sensitivitas negara Barat, sehingga mereka kerap kali tidak mau dan tidak mampu bertindak ketika warganya melakukan penistaan agama. Ini disebabkan anggapan bahwa perbuatan itu masih berada dalam ranah kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Akibatnya, negara-negara yang publiknya merasa agamanya dinista, harus

menanggung kerugian akibat penistaan agama yang dilakukan. Hal ini disebutkan pada paragraf penutup berita.

Di negara-negara ini aparat harus bentrok dengan masyarakat dan terkadang jatuh korban jiwa. Belum lagi dana dan energi yang harus dikeluarkan sangat luar biasa untuk mengamankan kepentingan negara Barat, termasuk kedubesnya.

Alinea terakhir berita ini seakan menjelaskan jika Barat masih memandang perbuatan menista agama sebagai sebuah kebebasan berekspresi, maka kerugiannya akan menimpa negara yang warganya merasa agamanya dinista. Kerugian tersebut bisa seperti bentrokan antara aparat dan masyarakat yang kemudian juga menimbulkan korban jiwa, penggunaan dan pengeluaran energi serta dana untuk mengamankan kepentingan negara Barat. Karena pada akhirnya, yang akan menjadi sasaran perusakan adalah segala atribut atau gedung milik negara Barat yang berada di negara itu.

“RI Harus Galang Dukungan” yang menjadi judul berita pada 26 September 2012, juga tertuju pada usulan protokol antipenistaan agama. Isi berita atau bagian terpenting dari berita ini tercermin dari adanya *taiching* yang berbunyi “*Tidak terlihat ada penggalangan suara dukungan.*” Akan tetapi, sekalipun isi beritanya memuat tidak adanya penggalangan suara dari negara-negara lain untuk mendukung usulan protokol antipenistaan agama tersebut, namun judul berita mengatakan bahwa Indonesia harus menggalang dukungan. Maka, dengan begitu dapat terlihat bahwa Republika mendukung jika Indonesia tetap memberikan dukungan terlaksananya protokol antipenistaan agama, sekalipun masih tidak terlihat dukungan dari negara-negara lain.

Setelah menurunkan berita mengenai belum adanya dukungan atas usulan protokol antipenistaan agama, Republika pada 27 September 2012 menurunkan berita berjudul "OKI Dorong Penista Agama Dihukum". Dari kalimat pertama pada lead berita ini menunjukkan bahwa, dukungan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terhadap usulan itu juga dinantikan oleh Islam, khususnya Republika. Hal ini tergambar dari kalimat pertamanya yang berbunyi,

Gayung bersambut di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal perlunya instrumen internasional antipenistaan mendapat tanggapan positif dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Mereka juga menyeru agar penista agama bisa dihukum.

Setelah mendapat tanggapan dingin dari mayoritas anggota PBB, akhirnya ada juga tanggapan positif dari negara-negara anggota OKI yang juga ikut mendukung usulan protokol antipenistaan tersebut. Itulah maksud dari lead berita di atas. Alasan mereka ikut mendukung usulan tersebut karena, negara-negara lain juga membatasi perilaku anti-Semit dan penyangkalan *holocaust*. Negara-negara anggota OKI yang juga tergabung dalam anggota PBB menerima usulan protokol antipenistaan agama tersebut. Mereka juga mengusulkan agar dibentuk batasan formal mana yang masuk dalam kategori kebebasan berekspresi, dan mana yang penistaan serta penghasutan agama. Dengan demikian, inti dari isi usulan protokol antipenistaan agama tersebut sebenarnya juga sama halnya seperti pembatasan perilaku anti semit.

Perbedaannya, pembatasan perilaku anti-Semit dimaksudkan untuk memberikan batasan pada hal-hal seperti apa yang dikatakan sebagai perilaku anti-Yahudi, tujuannya agar tidak banyak orang-orang yang anti pada Yahudi.

Sementara itu, protokol antipenistaan agama ini merupakan konsensus dari negara-negara di dunia yang akan menjadi acuan bila timbul penistaan agama. Sekalipun hal itu dilakukan dengan dalih kebebasan, namun pada dasarnya kebebasan itu tetap memiliki batas, bukan tanpa batas. Kebebasan yang dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia) sebenarnya juga membatasi penggunaan hak kebebasan, karena tidak ada kebebasan yang absolut, yang benar-benar bebas semaunya sendiri (SKH Republika, 2 Oktober 2012, *Protokol Antipenistaan*).

Pada berita “OKI Dorong Penista Agama Dihukum” ini, tanggapan dan dukungan dari negara-negara anggota OKI terhadap usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, diwakili oleh tiga petinggi negara Islam, yaitu Pakistan, Mesir, dan Afghanistan. Duta Besar Pakistan, Zamir Akram, menyampaikan beberapa hal terkait dukungannya tersebut, yakni menegaskan bahwa kehadiran instrumen internasional antipenistaan agama adalah hal yang sangat mendesak, ajakan pada 190 negara yang tergabung dalam anggota PBB untuk menerima dan membentuk batasan formal, mana yang masuk dalam ranah kebebasan berekspresi, dan mana yang tergolong penistaan agama, serta penghasutan agama, dan terakhir ia tidak menyetujui penolakan AS untuk menghukum pelaku penistaan, karena menurutnya hal itu menyakiti masyarakat Muslim dunia.

Kemudian Presiden Mesir, Mohammed Mursi juga menegaskan dua hal terkait dukungannya, yaitu bahwa pada dasarnya, kebebasan berekspresi yang dianut oleh suatu negara tetap mengandung tanggung jawab, agar perdamaian dan

stabilitas sosial tetap terjaga; dan tetap harus ada instrumen kerja sama internasional yang membalut sikap menghormati sesama umat penganut agama. Terakhir, pernyataan dari Presiden Afghanistan, Hamid Karzai, yang juga menyambut baik ide usulan instrumen pengaturan tersebut. Karena menurutnya, menghina 1,5 milyar Muslim di seluruh dunia adalah sikap fanatik yang bobrok. Ia juga menyatakan bahwa tersiarnya video film “*Innocence of Muslims*” tidak pernah dapat dibenarkan sebagai anggapan kebebasan berbicara atau berekspresi.

Secara tematik, berita ini menyuguhkan informasi bahwa protokol antipenistaan agama itu penting dan perlu untuk dirumuskan serta disetujui. Selain itu, produser sekaligus sutradara film “*Innocence of Muslims*” itu sebaiknya dihukum, karena dari film yang dibuatnya itu menimbulkan kekerasan di hampir seluruh negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Jika pembuat film tersebut tidak dihukum dengan alasan karena mengacu pada kebebasan berekspresi, maka hal itu menyakiti masyarakat Muslim dunia. Deklarasi HAM sedunia juga menggarisbawahi bahwa dalam menerapkan kebebasan berekspresi, setiap orang tetap harus memperhatikan moralitas dan tatanan publik.

Frame Republika : Film Innocence Of Muslims Menistakan Islam	
Elemen	Strategi Penulisan
Sintaksis	Film <i>Innocence of Muslims</i> adalah film yang menistakan Islam. Beberapa tokoh dunia, bahkan Tahta Keuskupan Gereja Katolik, Vatikan, juga mengancam film tersebut. Republika mengambil banyak judul berita yang mengarah pada penjelasan mengenai film itu, dan

	<p>mengarahkan pembacanya untuk berpikir bahwa film itu adalah film yang menistakan atau menghina agama Islam. Republika juga menempatkan pendapat dari kalangan umat beragama yang tidak menyetujui adanya penghinaan terhadap Islam melalui film tersebut. Selain itu, Republika juga menempatkan pendapat dari kalangan ahli hukum, pendidikan, bahkan yang memiliki jabatan khusus baik di dalam atau pun luar negeri, yang tidak menyetujui dan menganggap film <i>Innocence of Muslims</i> sebagai film yang menghina dan menyerang Islam.</p>
Skrip	<p>Intensitas yang tinggi dalam pemberitaan Republika mengenai film <i>Innocence of Muslims</i>, menjadi titik penekanan dalam segi waktu. Selama rentang waktu 28 hari pada 14 September – 1 Oktober, Republika banyak menerbitkan pemberitaan mengenai film <i>Innocence of Muslims</i>, dan ada 27 berita yang menjadi objek pada penelitian ini. Penekanan pada aspek <i>Why</i> (mengapa) dalam pemberitaannya menguatkan frame mengapa ada atau terjadi demokrasi dengan kekerasan, dan mengapa Obama serta pemerintah AS diminta untuk bersikap tegas dalam menangani film <i>Innocence of Muslims</i> ini. Terjadinya aksi kekerasan dan desakan pada pemerintah AS itu tidak lain karena beredarnya film <i>Innocence of Muslims</i> yang menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, film ini juga dianggap menyerang agama dan umat Islam.</p>

Tematik	<p>Secara keseluruhan, jika diruntutkan berita mengenai film <i>Innocence of Muslims</i> ini, maka runtutan pemberitaannya ditulis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan awal mengenai film <i>Innocence of Muslims</i> sebagai film yang memprovokasi, film yang menghina Nabi Muhammad, film yang mengadu domba dan sebagai ajang mendiskreditkan umat Muslim di seluruh dunia. 2. Pengakuan dari awak film <i>Innocence of Muslims</i>, yang semakin memperjelas bahwa film <i>Innocence of Muslims</i> memang sengaja diproduksi untuk menghina atau memprovokasi umat Muslim di seluruh dunia. 3. Terjadinya aksi unjuk rasa dengan kekerasan. Unjuk rasa terjadi karena beredarnya film <i>Innocence of Muslims</i>, umat Muslim tidak menerima agama dan Nabinya dihina dan dilecehkan melalui film tersebut. Aksi unjuk rasa menelan korban jiwa dan beberapa fasilitas milik AS rusak. 4. AS mulai menarik staf kedutaan besarnya di beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim. 5. Pernyataan Obama yang mengatakan AS tidak menyetujui adanya upaya menghina Islam melalui film <i>Innocence of Muslims</i>. 6. Pembuat film <i>Innocence of Muslims</i> mulai diinvestigasi, namun bukan tentang film itu, meskipun dampaknya secara jelas
---------	--

	<p>memicu kerusuhan. Pembuat film diinvestigasi karena melanggar klausul masa percobaan tahanannya.</p> <p>7. Desakan dan permintaan pada pemerintah AS untuk mengusut dan bersikap tegas pada pembuat film <i>Innocence of Muslims</i>. Karena film itu masuk dalam ranah isu sensitif penodaan agama.</p> <p>8. Tokoh-tokoh agama, baik dari kalangan umat Muslim, Kristiani, Katolik, dan Buddha mengecam film <i>Innocence of Muslims</i> yang dinilai memprovokasi.</p> <p>9. Himbauan pada umat Muslim di dunia pada umumnya, dan khususnya di Indonesia, untuk tidak berbuat anarkis dalam memprotes film <i>Innocence of Muslims</i>.</p> <p>10. Dicetuskannya usulan penyusunan protokol atau aturan antipenistaan agama oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Umat Islam di Indonesia dan negara-negara anggota OKI menyetujui usulan tersebut, namun AS dan negara anggota PBB lainnya belum menyetujui, karena masih mempertimbangkan adanya kebebasan berekspresi dalam konstitusi AS.</p>
Retoris	<p>Penggunaan kata-kata tertentu yang menggambarkan film <i>Innocence of Muslims</i> sebagai film yang menyerang Islam. Selain itu, ada pula kata-kata tertentu untuk menggambarkan sikap AS dalam menghadapi dan merespon film ini. Namun, ada satu berita yang bisa dijadikan rujukan bahwa penggambaran sifat Nabi Muhammad SAW dalam</p>

film *Innocence of Muslims* itu tidak sesuai dengan keyakinan umat Muslim. Pada salah satu berita itu terdapat tujuh kata ganti yang digunakan oleh penulisnya untuk menunjukkan sifat Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya. Penulis tersebut ingin mematahkan pendapat yang dibuat oleh sutradara film *Innocence of Muslims*.

2. Frame Kompas mengenai film “Innocence of Muslims”

Ditelisik lebih jauh, selain dari segi jumlah pemberitaan yang berbeda, frame yang dibangun oleh Kompas dalam memberitakan film “Innocence of Muslims” juga berbeda dengan frame Republika. Harian Kompas lebih melihat film itu sebagai film yang kontroversial. Selain itu, Kompas juga menilai film tersebut sebagai film sampah, memprovokasi, anti-Islam, dan film yang menghina. Kompas juga mengangkat sikap pemerintah AS dan Indonesia dalam menyikapi film itu.

a. Frame Kompas terhadap film

Dalam jumlah pemberitaannya yang relatif lebih sedikit dibandingkan Republika, Harian Kompas memiliki frame berbeda dalam melihat dan menilai beredarnya film “*Innocence of Muslims*”. Pada berita-berita yang diterbitkannya, terdapat beberapa kata atau istilah yang digunakan untuk menggambarkan film itu. Film sampah, memprovokasi, anti-Islam, menghina, dan kontroversial, menjadi kata-kata yang dapat ditemui saat membaca 9 item berita yang disajikan.

1) Film Sampah

Pada lead berita Kompas edisi 20 September 2012 yang berjudul “Film Kontroversial, Mahfud: Tidak Perlu Ditanggapi”, ada kalimat yang menunjukkan pada film “*Innocence of Muslims*”. Kalimat itu menunjukkan film tersebut sebagai film yang tidak bermutu, atau film sampah dan dibuat oleh orang gila. Pernyataan itu diucapkan oleh Mahfud MD yang ketika itu masih menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Jakarta, Kompas – Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, film Innocence of Muslims tidak perlu ditanggapi, apalagi dengan kekerasan. Film itu tidak bermutu atau sampah dan dibuat oleh orang gila.

Pernyataan dari Mahfud MD di atas, merupakan bagian lead berita. Lead atau teras berita pada berita ini bersifat *introduktif*. Pokok persoalan yang menjadi titik fokus pada berita ini terletak pada himbauan Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD mengatakan untuk tidak menanggapi film itu dengan kekerasan. Namun, pada lead ini juga terdapat kata-kata yang menjadikan lead di atas berfungsi *atraktif* (membangkitkan minat baca khalayak). Adanya kalimat ‘*Film itu tidak bermutu atau sampah dan dibuat oleh orang gila*’ inilah yang menjadikan berita ini bisa menarik minat baca khalayak, terlebih yang menolak adanya film itu.

2) Film Anti-Islam

Harian Kompas juga menilai film “*Innocence of Muslims*” sebagai film yang anti-Islam. Pada berita terbitan 29 September 2012 berjudul “Pembuat Film Ditahan”, Kompas memberikan keterangan bahwa orang yang diduga sebagai

pembuat film "*Innocence of Muslims*" ditangkap di California, AS. Kompas pada lead beritanya ini, menyebut film "*Innocence of Muslims*" sebagai film anti-Islam.

LOS ANGELES, JUMAT – Seorang warga Amerika Serikat keturunan Mesir, yang diduga berada di balik pembuatan film anti-Islam yang telah menyulut protes di banyak negara, ditangkap hari Kamis (27/9), di California, AS, atas dakwaan melanggar hukuman percobaannya. Seorang hakim federal memerintahkan orang tersebut ditahan tanpa jaminan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, secara retoris, kata film anti-Islam menunjukkan bahwa film "*Innocence of Muslims*" itu membawa pengaruh yang bisa membuat penontonnya membenci Islam. Adanya kata 'film anti-Islam' pada lead berita Kompas, menandakan bahwa Kompas memiliki pandangan atau pendapat yang sama dengan Republika mengenai film tersebut. Kompas juga menyadari bahwa film itulah yang menyulut protes di banyak negara.

3) Film yang Memprovokasi

Pada Rabu, 19 September 2012, Kompas menulis dalam beritanya yang berjudul "Galang Petisi Kecaman dan Penolakan", provokasi memecah belah hubungan antaragama terjadi melalui sebuah film berjudul "*Innocence of Muslims*". Film itu dikatakan sebagai film yang memprovokasi, karena respon atas film tersebut memancing aksi-aksi kekerasan. Selain itu, munculnya film "*Innocence of Muslims*" juga berakibat pada kematian dan perusakan pada sejumlah bangunan. Lima narasumber berita yang ada pada berita ini, tiga diantaranya mengatakan provokasi itu muncul dari film "*Innocence of Muslims*".

Terkait dengan provokasi melalui film itu, Yenny berharap umat Islam tidak terpancing dengan aksi-aksi kekerasan...

Greg Barton mengatakan, film ini menyebabkan peristiwa tragis. Prinsip paling penting dari film ini adalah provokasi yang responsnya membuat kematian dan perusakan...

Henry mengatakan, PGI mengancam keras pembuatan film yang mendorong perpecahan hubungan antaragama. PGI juga menolak respons atas film yang melahirkan kekerasan.

Selain tiga narasumber pada berita di atas, pada berita Kompas lainnya yang diturunkan pada 20 September 2012 “Mahfud: Tidak Perlu Ditanggapi”, juga ada narasumber berita yang menganggap film “*Innocence of Muslims*” sebagai film yang memprovokasi. Berita yang diangkat dari hasil dialog antaragama terkait film “*Innocence of Muslims*” ini, menyebutkan salah satu pembicaranya mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh terpancing dengan adanya provokasi kebencian terhadap agama. Menurutnya, jika ada orang yang memprovokasi dengan kebencian terhadap agama, maka sebaiknya tidak perlu dilayani tapi didoakan saja.

Pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga disertai pada berita ini. Dalam sub judul beritanya yang berbunyi “Jangan terprovokasi”, sumber berita dalam sub judul ini kesemuanya berasal dari MUI. Adanya sumber berita dari MUI ini tentunya juga mendukung frame Kompas dalam melihat film “*Innocence of Muslims*”. Pada berita ini frame Kompas dalam menilai film itu adalah film yang memprovokasi, selain menyebutnya sebagai film kontroversial. Karena film itu dinilai sebagai film yang memprovokasi, banyak pihak dan juga MUI yang menghimbau pada umat Islam agar tidak terpancing dengan munculnya film tersebut.

Beberapa pernyataan mengenai film “*Innocence of Muslims*” pada berita-berita di atas, menunjukkan bahwa Kompas sama halnya dengan Republika yang juga menyebut film tersebut film yang memprovokasi. Film yang memprovokasi

ini mengartikan bahwa film itu bisa menimbulkan kebencian antarumat beragama. Meskipun efeknya tidak langsung terlihat, namun lambat laun jika film-film seperti itu masih muncul, kebencian dan perpecahan antarumat beragama bisa terjadi. Karena itulah, dalam berita-berita yang disajikan baik Kompas maupun Republika mengatakan untuk tidak terpancing dan terbawa emosi dalam menanggapi beredarnya film "*Innocence of Muslims*" tersebut.

4) Film Menghina Agama

Ada yang menarik pada Kompas edisi 20 September 2012. Dalam beritanya yang berjudul "Film Kontroversial, Mahfud: Tidak Perlu Ditanggapi", Kompas menyertakan pendapat dari pendeta Albertus Patti dalam menanggapi munculnya film "*Innocence of Muslims*". Albertus yang mengaku dirinya sebagai orang kristen, dalam berita ini, ternyata ia juga menilai film itu sebagai film yang menghina umat Islam.

Albertus memahami kemarahan umat Islam terhadap pembuatan film tersebut. "Sebagai orang Kristen, saya pun marah dengan film yang menghina umat Islam," katanya.

Adanya pernyataan dari pendeta Albertus di atas, rasanya memang dibutuhkan, mengingat segmen pembaca Kompas yang lebih umum. Dari pembaca-pembacanya tersebut mungkin pula ada pembaca yang bukan dari umat Islam. Pernyataan Albertus tersebut akan menjadi semacam pesan bagi pemeluk agama lain, atau yang sama dengan dirinya untuk menganggap film "*Innocence of Muslims*" sebagai film yang menghina umat Islam.

Sementara itu, pemeluk agama Islam yang juga menjadi segmen pembaca Kompas pun akan mengetahui, bahwa bukan hanya dirinya dan saudara

seimannya saja, yang menilai film *"Innocence of Muslims"* sebagai film yang menghina agamanya. Pembaca dari kalangan umat Muslim akan mengetahui bahwa umat bergama lainnya pun menyadari film itu adalah film yang menghina agama Islam. Pada berita ini, terlihat peran Kompas yang lebih moderat dan netral, dengan menyampaikan pendapat dari kalangan umat Kristen yang diwakili oleh Pendeta Albertus, bahwa mereka juga menilai film itu sebagai film yang menghina umat Islam.

Adanya pernyataan dari pendeta Albertus itu walaupun hanya ada dalam satu paragraf, namun hal tersebut cukup menjadi penengah saat umat Muslim marah atas munculnya film itu. Umat Muslim juga marah pada pembuat film yang diketahui bahwa dia adalah penganut Kristen Koptik. Pernyataan dari pendeta itu kemudian seakan memberikan perkecualian bagi umat Muslim, bahwa sekalipun pembuat film itu beragama Kristen Koptik, namun tidak semua umat Kristen yang mau atau senang dengan beredarnya film *"Innocence of Muslims"* itu.

Kemudian pada sub judul berita ini, Kompas juga menjelaskan mengenai film *"Innocence of Muslims"* pada satu paragrafnya. Kompas menuliskan, film yang dibuat oleh sutradara Nakoula Basseley Nakoula, warga Amerika Serikat itu mengguncang dunia, khususnya dunia Islam. Film itu bisa mengguncang kembali dunia Islam karena isinya dinilai menghina agama Islam, Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat Nabi. Dari sekelumit penjelasan itu dapat diketahui bahwa Kompas juga menilai film *"Innocence of Muslims"* sebagai film yang menghina agama Islam.

Selain berita di atas, dua berita lainnya juga menyebut film "*Innocence of Muslims*" sebagai film yang menghina Islam. Pada berita kilas luar negeri yang diterbitkan Kompas pada 27 September 2012, terdapat dua baris kalimat yang menjelaskan hal itu. Beritanya yang berjudul "Mesir Kampanyekan 'Karikatur Lawan Karikatur'" ini, berisi mengenai adanya surat kabar Mesir yang diluncurkan untuk menentang karikatur kontroversial yang menghina Nabi Muhammad, yang diterbitkan majalah Perancis, *Charlie Hebdo*. Karikatur pada majalah *Charlie Hebdo* itu muncul di tengah keriuhan umat beragama, khususnya umat Muslim dalam menentang beredarnya film "*Innocence of Muslims*".

Kompas juga memberikan penjelasan bahwa film "*Innocence of Muslims*" yang disebutkan juga sebagai film yang menghina Islam, telah menimbulkan protes di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Hal itu dijelaskan Kompas pada beritanya yang diturunkan 29 September 2012 berjudul "Pembuat Film Ditahan". Secara tematik, berita ini sebenarnya tidak begitu banyak menjelaskan kenapa Kompas menyebutnya juga sebagai film yang menghina Islam. Pada berita ini, yang lebih banyak mendapatkan porsi dalam pemberitaan adalah mengenai ditahannya pembuat film "*Innocence of Muslims*".

5) Film Kontroversial

Sejak pertama kali Kompas menurunkan berita mengenai film "*Innocence of Muslims*", yakni pada tanggal 14 September 2012, Kompas telah menyebutnya sebagai film kontroversial. Dalam dua paragraf berita yang berjudul "Unjuk Rasa di Kairo Berlanjut", Kompas menulis:

Sebaliknya, untuk meredam kemarahan massa, Pemerintah Mesir meminta AS menindak pihak yang bertanggung jawab atas produksi film kontroversial itu. Mursi menginstruksikan Kedubes Mesir di Washington melakukan upaya hukum terhadap oknum yang memproduksi film kontroversial tersebut.

Jaksa penuntut umum Mesir, Abdel Majid Mahmud, menetapkan 10 nama yang diduga terlibat dalam produksi film kontroversial itu dalam daftar hitam, dan akan ditangkap jika masuk Mesir. Mereka adalah sembilan warga Mesir dan satu warga AS.

Pada dua paragraf berita di atas, terdapat tiga kali penyebutan film kontroversial. Film kontroversial yang dimaksudkan adalah film “*Innocence of Muslims*”. Namun, pada berita ini tidak ditemukan nama film yang disebut sebagai film kontroversial tersebut. Kompas hanya menuliskan bahwa itu adalah film yang dibuat di AS dan dianggap melecehkan Nabi Muhammad SAW.

Kemudian pada dua berita lainnya, Kompas secara jelas menuliskan sebuah kalimat sebelum judul beritanya yang berbunyi “Film Kontroversial”. Hal ini seakan menunjukkan bahwa Kompas memang benar menilai film “*Innocence of Muslims*” sebagai film kontroversial. Adanya kalimat itu juga menjadi bagian dari penarik minat pembaca saat melihat berita tersebut. Karena pada umumnya, pembaca akan terlebih dahulu melihat judul beritanya. Jika sebelum judul berita ada kalimat yang berbunyi semacam itu, maka pembaca pun berpendapat bahwa Kompas menilai film itu kontroversial.

Selain itu, kalimat “Film Kontroversial” tentunya juga akan menarik minat baca pembaca. Karena mereka akan merasa ingin tahu tentang film seperti apa yang disebut Kompas sebagai film kontroversial. Kalimat “Film Kontroversial” yang diletakkan Kompas sebelum judul beritanya ada pada berita edisi 19

September 2012 “Galang Petisi Kecamatan dan Penolakan” dan 20 September 2012 “Mahfud: Tidak Perlu Ditanggapi”. Jika kalimat “Film Kontroversial” itu disandingkan dengan berita Kompas yang berjudul “Mahfud: Tidak Perlu Ditanggapi”, maka kalimat itu juga seakan keluar dari pernyataan Mahfud MD.

Film *‘Innocence of Muslims’* dikatakan film kontroversi, lantaran menimbulkan banyak protes bahkan hingga menelan korban jiwa. Kompas banyak menjelaskan dalam beritanya mengenai akibat yang ditimbulkan oleh film itu. Selain itu, jika diperhatikan dari berita-beritanya, Kompas cenderung mengatakan film itu kontroversi karena banyak pendapat berbeda dalam menyebut film itu, seperti film yang mengandung provokasi dan melecehkan Islam serta Nabi Muhammad SAW.

Secara bahasa, kata kontroversi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perdebatan; persengketaan; atau pertentangan. Kontroversial berarti bersifat menimbulkan perdebatan. Dengan begitu, jika Kompas menyebut film *‘Innocence of Muslims’* sebagai film kontroversial, hal ini karena menurut Kompas film itu masih menimbulkan banyak perdebatan. Dari berita-berita yang diturunkannya, dapat terlihat Kompas menyertakan berbagai pendapat dari narasumbernya yang mengatakan film itu memprovokasi, melecehkan, kemudian sikap umat Islam yang harusnya tidak terpancing, dan sikap dari pihak AS yang merasa dirugikan karena staf dan diplomatnya menjadi korban dalam aksi protes melawan film itu.

b. AS dan Obama Cenderung Dirugikan

Pandangan Kompas yang menempatkan kerugian pihak AS dan Obama saat beredarnya film "*Innocence of Muslims*" dapat dilihat pada beberapa item berita yang diterbitkannya. Berita-berita tersebut yaitu yang terbit pada 14 September 2012 "AS Janjikan Investigasi Menyeluruh", 17 September 2012 "Demonstran Bayaran di Kairo", 19 September 2012 "Galang Petisi Kecaman dan Penolakan, serta 27 September 2012 "Suriah dan Iran Terus Ditekan: Yudhoyono Usulkan Protokol Cegah Kekerasan Berlatar Agama".

Pada berita-beritanya, Kompas cenderung menempatkan AS sebagai pihak yang cenderung dirugikan dengan adanya protes atau unjuk rasa yang dilakukan umat Islam. Secara tematik, porsi pemberitaannya mengenai kerugian AS ini lebih banyak menampilkan akibat dari aksi demonstrasi. Sementara untuk alasan mengapa umat Islam melakukan demonstrasi, masih minim disentuh, bahkan hanya dijelaskan pada satu paragraf di satu berita saja.

Pada beritanya yang diturunkan tanggal 14 September 2012 berjudul "AS Janjikan Investigasi Menyeluruh", porsi pemberitaan lebih banyak menjelaskan mengenai aksi pengunjuk rasa yang menewaskan Duta Besar AS dan tiga anggota staf kedubes AS. Dijelaskan bahwa menurut beberapa petinggi AS kejadian itu sebagai sebuah serangan yang terencana, untuk itu Pemerintah AS bertekad melakukan investigasi menyeluruh. Investigasi menyeluruh juga melibatkan Pemerintah Libya, negara dimana Dubes AS Christopher Stevens dan tiga stafnya bertugas. Sebanyak enam belas paragraf pada berita ini menjelaskan hal tersebut.

Sementara itu, hanya pada satu paragraf saja yang menjelaskan alasan adanya aksi demonstrasi tersebut. Pada paragraf keempat itu dituliskan,

“Massa memprotes beredarnya film berisi penghujatan terhadap nabi di AS dan situs sosial Youtube. Smith ditemukan tewas di lokasi, sedangkan Stevens diketahui tewas di rumah sakit”

Dari satu paragraf di atas terlihat bagaimana Kompas membingkai beritanya yang berjudul “AS Janjikan Investigasi Menyeluruh” ini. Dari sisi 5 W 1 H, Kompas lebih banyak memberitakan mengenai sisi How, bagaimana demonstrasi itu terjadi yang kemudian menewaskan Dubes AS dan tiga staf kedubesnya. Sedangkan untuk sisi Why yang menyentuh pada alasan terjadinya demonstrasi atau serangan, Kompas hanya menuliskannya pada satu paragraf dengan satu kalimat saja.

Kompas juga lebih menekankan pada investigasi yang akan dilakukan AS, karena adanya serangan itu. Dari sisi ini, periset triangular juga melihat bahwa, seakan-akan yang bersalah adalah orang-orang yang melakukan demonstrasi disertai serangan ke kantor konsulat AS tersebut. Penulisan berita ini juga seolah menunjukkan bahwa pihak Barat atau AS tidak bersalah. Padahal penyebab serangan itu lantaran ada pemantik dari film *“Innocence of Muslims”*.

Secara sintaksis, periset triangular juga melihat, pemberitaan Kompas pada edisi ini seolah-olah hanya memberitakan naasnya kematian Dubes AS. Selain itu, resolusi konflik yang disampaikan Obama pada berita, tidak sampai ke akar. Karena semestinya jika memang mau dilihat atau dianggap memiliki kuasa oleh dunia, Obama selayaknya bisa mengadili pembuat film yang tidak lain juga warga negaranya sendiri. Selain itu, Kompas seharusnya juga memberitakan dengan

porsi yang sama, mengapa umat Islam marah hingga menyerang kantor konsulat AS atau bangunan-bangunan lainnya yang menjadi milik AS.

Pada berita lainnya yang diturunkan tanggal 17 September 2012 berjudul “Demonstran Bayaran di Kairo”, Kompas menuliskan pernyataan dari Perdana Menteri Mesir, Hisham Kandil, yang mengatakan ada pengunjung rasa di Kairo yang menerima bayaran. Adanya pernyataan itu seakan menunjukkan bahwa memang ada pihak yang sengaja ingin menyerang AS. Karenanya AS meminta kepada Pemerintah Mesir, Sudan dan Yaman untuk mengirimkan satuan marinir antiterornya untuk menjaga gedung kedubes AS serta fasilitas lainnya.

Pada berita Kompas edisi 19 September 2012 “Galang Petisi Kecamatan dan Penolakan”, juga terdapat satu pernyataan narasumber beritanya yang mendukung agar AS bersikap serius atas kematian dubes dan stafnya. Dalam berita itu dituliskan, *terkait dampak atas film itu, Usman Hamid aktivis Kontras menegaskan bahwa kematian seorang duta besar seharusnya menjadi perkara serius bagi pemerintah AS.* Pernyataan tersebut bisa jadi mengesankan bahwa seharusnya yang mesti diselesaikan itu adalah mencari pelaku unjuk rasa yang menyebabkan kematian seorang duta besar negara.

Hal itu jelas menunjukkan bahwa Kompas juga cenderung memiliki keberpihakannya pada AS. Pernyataan dari Usman Hamid tersebut secara tidak langsung juga menyebutkan kerugian lain yang diderita AS, dengan adanya film “*Innocence of Muslims*” itu dan unjuk rasa memprotes film tersebut. Ia bahkan mengatakan kematian duta besar AS adalah masalah serius. Ini mengartikan pula

bahwa hal itu harus ditangani secara serius, dicari pelakunya, dan diselesaikan baik itu secara budaya (kekeluargaan) atau pun hukum.

Kemudian pada berita lain, yang menjadi bagian dari berita utama mengenai Suriah dan Iran, Kompas juga memberitakan mengenai pidato Obama yang menyinggung masalah film "*Innocence of Muslims*". Dalam paragraf pertama sub berita itu dituliskan,

Gelombang protes dan kekerasan di sejumlah negara Islam terkait beredarnya film Innocence of Muslims juga diangkat dalam pidato sejumlah kepala negara. Meski menyatakan film itu juga menyakiti hati warga AS, Obama menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak dapat dihalangi oleh siapa pun.

Setelah pernyataan dari Obama ini, Kompas kemudian menyajikan pernyataan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan yang disampaikan bertolak belakang dengan pernyataan Obama. SBY mengusulkan untuk dibentuknya sebuah konsensus internasional, yang mengatur batasan dari kebebasan berekspresi, terutama yang menyangkut agama. Pada penutup beritanya, Kompas juga menuliskan pernyataan SBY yang berbunyi,

Menurut Presiden, Deklarasi Hak Asasi Manusia menekankan, dalam menjalankan kebebasan berekspresi, orang harus memperhatikan ketertiban umum. Karena itu, kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak. Budaya toleran dan saling menghormati yang universal juga perlu dikembangkan.

Jika diperhatikan, dua pernyataan dari dua Presiden negara itu memang seolah saling bertentangan. Pernyataan Presiden Obama "*kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak dapat dihalangi oleh siapa pun*", menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat yang sudah dilindungi oleh konstitusi Pemerintah AS itu, sudah menjadi ketetapan dan tidak bisa diganggu oleh siapa

pun, sekalipun itu seorang presiden atau yang memiliki jabatan tinggi dan terhormat. Sementara pernyataan SBY yang mengatakan, “*kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak*”, menggambarkan bahwa kata bebas bukan berarti tanpa ada batasan, karena dia tidak bersifat absolut (tidak terbatas).

Beredarnya film “*Innocence of Muslims*” ini memang berdampak pada Pemerintahan AS. Gelombang protes dan kekerasan seperti yang dituliskan Kompas di awal paragraf berita ini, menunjukkan bahwa protes dan kekerasan yang terjadi karena beredarnya film *Innocence of Muslims* itu bergerak secara beruntun. Karena hampir di setiap negara berpenduduk Muslim, melakukan protes atas film tersebut. Sasaran protesnya pun bangunan dan fasilitas-fasilitas milik AS.

Namun, pernyataan Obama di atas, sebenarnya juga bisa memantik protes-protes berikutnya. Sebab bisa jadi, para demonstiran itu pun beralasan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Bentuk ekspresi dan pendapat itu, mereka tunjukkan dalam bentuk protes, bahkan juga ada yang disertai dengan kekerasan. Jika para demonstiran tersebut juga beralasan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat, maka sebenarnya AS juga bisa menghargai ekspresi dan pendapat para demonstiran, bukan hanya pada pembuat film.

c. Umat Islam Jangan Terprovokasi

Himbauan-himbauan kepada umat Islam agar tidak terprovokasi oleh film “*Innocence of Muslims*”, juga diberitakan oleh Kompas. Beberapa item berita Kompas yang menunjukkan hal ini ada pada beritanya yang terbit tanggal 14

September 2012 “Unjuk Rasa di Kairo Berlanjut”, 15 September 2012 “FJP Tuduh Unjuk Rasa di Mesir Dipolitisasi”, 19 September 2012 “Galang Petisi Kecamatan dan Penolakan”, dan 20 September 2012 “Mahfud: Tidak Perlu Ditanggapi”.

Hari pertama Kompas menurunkan berita mengenai film “*Innocence of Muslims*”, pembaca Kompas langsung disambut dengan topik berita mengenai unjuk rasa di Mesir. Secara tematik, pada berita Kompas yang berjudul “Unjuk Rasa di Kairo Berlanjut”, lima paragraf pertamanya menceritakan tentang kronologi terjadinya unjuk rasa di Mesir menentang film “*Innocence of Muslims*”. Kompas juga menuliskan akibat-akibat yang ditimbulkan dari aksi unjuk rasa itu.

Saling dorong dan lempar batu terjadi antara pengunjung rasa dan petugas keamanan. Sedikitnya 20 demonstran dan 11 petugas luka-luka dalam bentrokan itu. Dua kendaraan petugas juga terbakar akibat lemparan bom molotov itu, seperti dilaporkan wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, dari Kairo.

... Pengunjuk rasa di kota Sana'a, Yaman, mendobrak gedung Kedubes AS setelah berhasil menjebol pintu gerbang masuk gedung tersebut. Mereka kemudian membakar mobil yang diparkir di halaman dalam. Terjadi bentrokan dengan petugas keamanan yang melepas tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan pengunjung rasa.

Bukan tidak mungkin, wartawan Kompas itu menuliskan akibat dari unjuk rasa tersebut dengan maksud tertentu. Penyebutan jumlah korban dan fasilitas-fasilitas yang dirusak itu, menunjukkan bahwa Kompas bersikap kontra dan tidak menyetujui adanya unjuk rasa tersebut. Selain itu, wartawan Kompas ini juga menuliskan pada bagian beritanya, pernyataan dari Ketua Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) dan Sekretaris Moderate Muslim Society. Keduanya

sependapat jika umat Islam tidak boleh terpancing melakukan aksi-aksi kekerasan dalam memprotes film itu, seperti yang terjadi di Libya, Mesir atau pun Sana'a.

Pada berita ini, wartawan Kompas memilih untuk menuliskan lebih dahulu mengenai kronologi unjuk rasa di Kairo, Mesir dan Sana'a. Kemudian pada sub judul yang diberi judul "Protes Bermartabat", wartawan Kompas ini menyusulkan fakta tersebut dengan pernyataan dari Ketua Syuriah PBNU dan Sekretaris Moderate Muslism Society. Penulisan berita semacam ini akan memberikan kesan pada pembacanya, bahwa selayaknya umat Islam di Indonesia tidak melakukan unjuk rasa seperti di Mesir dan Sana'a. Karena hal itu juga akan merugikan pihak yang melakukan unjuk rasa dan petugas keamanan, bahkan rakyat sipil setempat.

Hari berikutnya, 15 September 2012 Kompas menurunkan berita yang berjudul "FJP Tuduh Unjuk Rasa di Mesir Dipolitisasi". Dari judul berita ini dapat diketahui bahwa ada kemungkinan unsur politik dalam aksi unjuk rasa yang terjadi di Mesir. Lead berita ini menyebutkan bahwa Partai Kebebasan dan Keadilan atau FJP, sayap politik Ikhwanul Muslimin, yang menuduh adanya unsur politisasi pada aksi unjuk rasa di sekitar Kedutaan Besar AS di Mesir.

Mesir dan AS memang dikenal memiliki hubungan yang baik antara keduanya. Pada berita ini pun dijelaskan bahwa Mesir dan AS memang memiliki hubungan strategis. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Ikhwanul Muslimin, yang juga mengatakan massa memanfaatkan beredarnya film "*Innocence of Muslims*" sebagai jalan untuk melakukan aksi protes terhadap AS. Frasa "*ada elemen di Mesir ataupun AS yang ingin merusak hubungan strategis*

Mesir-AS”, yang tertuang pada berita ini menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi diduga sebagai aksi untuk merusak hubungan strategis antara Mesir dengan AS. Hubungan strategis itu adalah hubungan diplomasi Mesir dan AS, terutama hubungan ekonomi, budaya, politik luar negeri, dan sebagainya.

Pada berita ini pun dapat kita lihat adanya sub berita yang juga diangkat menanggapi beredarnya film *“Innocence of Muslims”*. Hal terpenting dari sub berita ini adalah kembali mengenai himbauan kepada umat Islam di Indonesia. Umat Islam Indonesia boleh mengecam atau melakukan protes atas film itu. Namun pada sub berita ini tetap memberikan penjelasan lain bahwa, kecaman boleh dilakukan asal dengan kepala dingin. Protes pun boleh dilakukan asal tetap mengikuti aturan hukum, norma etika, dan kesusilaan.

Dari sub berita ini kita juga melihat bagaimana peran serta dari Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Untung S Rajab (aparatur keamanan pemerintah). Ketiganya yang dijadikan narasumber berita oleh Kompas, dianggap telah mewakili umat Islam Indonesia. Karenanya, pesan yang diterima pembaca dari penulisan berita itu adalah himbauan untuk tidak terpancing atau terprovokasi oleh film *“Innocence of Muslims”* tersebut, dengan melakukan aksi kekerasan atau merusak.

Himbau agar tidak terprovokasi oleh film itu juga bisa kita temukan pada dua berita Kompas lainnya. Pada 19 September 2012, Kompas yang mengangkat berita terkait film itu memilih memberikan judul beritanya dengan

“Galang Petisi Kecaman dan Penolakan”. Dari pemilihan judul berita ini pembaca sebenarnya sudah dapat menebak arah berita yang tertulis. Judul tersebut sudah mencerminkan Kompas memilih untuk tidak mendukung aksi demonstrasi atau unjuk rasa, terlebih lagi protes dengan kekerasan terhadap film “*Innocence of Muslims*”.

Kata ‘petisi’ pada judul itu pun lebih mengarah pada pengumpulan dukungan dari warga atau umat Islam, untuk memprotes keras film, namun dengan cara yang halus atau berbudaya. Frasa “*petisi kecaman dan penolakan*” di atas juga menunjukkan bahwa ada upaya dari kelompok Islam untuk membuat surat permohonan resmi pada pemerintah yang berisi kecaman dan penolakan terhadap film *Innocence of Muslims* yang telah memicu unjuk rasa dan kekerasan.

Dari setiap pernyataan yang diungkapkan dan ditulis pada berita ini, mendukung pandangan Kompas yang tidak menyetujui adanya provokasi atau respon dengan cara kekerasan terhadap film *Innocence of Muslims*.

- Yenny Zannuba Wahid, pendiri Wahid Institute, berharap umat Islam tidak terpancing dengan aksi-aksi kekerasan. Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan, menurutnya, hanya akan menjadikan Islam dipandang sebagai agama kekerasan dan brutal.
- Usman Hamid, aktivis KontraS, menegaskan kematian seorang duta besar

- Greg Barton, peneliti Islam dari Australia, mengatakan prinsip paling penting dari film *Innocence of Muslims* tersebut adalah provokasi yang responnya membuat kematian dan perusakan.
- Henry Lokra, Kepala Biro Penelitian dan Komunikasi Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), mengancam pembuatan film yang mendorong perpecahan hubungan antaragama, dan menolak respon atas film yang melahirkan kekerasan baru.
- Hendaridi, Ketua Setara Institute, mengatakan membalas karya seni dengan ekspresi kemarahan adalah kontraproduktif karena hanya akan membuat senang orang-orang yang sengaja membuatnya. Ia juga melihat secara hukum, bahwa kasus film tersebut merupakan kejahatan. Diplomasi kebudayaan, HAM, dan keagamaan adalah jalan terbaik, yang menurutnya dapat ditempuh dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Kemudian pada berita lainnya, Kompas juga mengambil sudut pandang yang sama. Warga Muslim dihimbau untuk tidak terpancing atau terprovokasi oleh film "*Innocence of Muslims*". Penjelasan dan pernyataan dari beberapa tokoh juga menjadi penguat Kompas. Tokoh tersebut diantaranya seperti Mahfud MD mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Masdar Mas'udi, Pendeta Albertus Patti, Musdah Mulia, dan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI KH Muhyidin Djunaidi.

Dari 5 tokoh tersebut, semuanya mempunyai pendapat yang sama terkait film "*Innocence of Muslims*". Mahfud MD mengatakan, film itu tidak perlu

ditanggapi, apalagi dengan kekerasan, karena film itu tidak bermutu atau sampah dan dibuat oleh orang gila. Masdar Mas'udi mengatakan, jika orang memprovokasi dengan kebencian terhadap agama, sebaiknya tidak dilayani dan didoakan saja. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terpancing melakukan aksi-aksi kekerasan dalam menentang film itu.

Kemudian, Musdah Mulia mengatakan bahwa umat Islam harus mampu menyelesaikan persoalan dengan damai dan senyum, bukan dengan otot atau urat leher keluar (gambaran orang sedang marah). Begitu pula dengan KH Muhyidin Djunaidi yang mengatakan, walaupun agama Islam sudah direndahkan dan dilecehkan, tapi umat Islam tetap harus wasapada dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah, serta tidak terpancing oleh provokasi pihak lain. Umat Islam juga diminta untuk tetap menjaga ketertiban umum.

Benang merah dari lima pernyataan tokoh tersebut, secara jelas mengarah pada ketidaksetujuan Kompas dengan aksi protes terhadap film melalui jalan kekerasan. Kata lainnya, bisa jadi hal itu merupakan kebijakan Kompas untuk lebih memilih pemberitaan semacam itu. Karena dengan begitu, film "*Innocence of Muslims*" itu akan dianggap film amatir tau film sampah, bukan film yang menghina agama. Sehingga, tidak ada aksi kekerasan atau menimbulkan bibit permusuhan antar umat beragama.

Framing Kompas: Film Innocence of Muslims Kontroversial	
Elemen	Strategi Penulisan

Sintaksis	<p>Kompas menempatkan pemberitaan mengenai film <i>Innocence of Muslims</i> pada halaman internasional. Dalam kurun waktu yang hampir sama, sejak tanggal 14 – 29 September 2012 Kompas hanya memuat berita mengenai film ini sebanyak 9 berita. Dalam penulisan headline atau judul beritanya, Kompas lebih banyak menekankan pada aksi demonstrasi yang terjadi dalam memprotes dan menanggapi beredarnya film <i>Innocence of Muslims</i>. Film <i>Innocence of Muslims</i> dinilai sebagai film yang kontroversial. Kompas cenderung mengatakan film itu kontroversi karena banyak pendapat berbeda dalam menyebut film itu, seperti film yang mengandung provokasi, film sampah, film anti-Islam dan melecehkan Islam serta Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan dari pemerintah Mesir juga penempatan kata tersebut pada dua headline beritanya.</p>
Skrip	<p>Penekanan dalam segi <i>how</i> (bagaimana) dan <i>why</i> (mengapa). Kompas lebih menekankan aspek <i>how</i> karena lebih banyak menampilkan berita mengenai aksi unjuk rasa atau protes terhadap film <i>Innocence of Muslims</i>. Sedangkan penekanan pada aspek <i>why</i> hanya ditemukan pada dua berita. Aspek ini menjawab pertanyaan dari mengapa unjuk rasa di Mesir dipolitisasi dan mengapa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, mengusulkan dibentuknya instrumen atau protokol internasional.</p>

Tematik	<p>Runtutan faktanya dituliskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AS akan melakukan investigasi dan mengidentifikasi pelaku terkait insiden serangan di kantor konsulat Benghazi, Libya yang menewaskan seorang Duta Besarnya dan tiga staf konsulatnya. Serangan di Benghazi ini juga dinilai sebagai serangan yang terencana. 2. Aksi unjuk rasa dan demonstrasi di beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim yang memprotes beredarnya film <i>Innocence of Muslims</i>. Namun aksi itu dinilai sebagai aksi yang dipolitisasi dan ada demonstran bayarannya. 3. Respon terhadap film <i>Innocence of Muslims</i> dari berbagai kalangan seperti akademisi, aktivis, peneliti, tokoh agama, ahli hukum, dan hubungan luar negeri, serta salah satu surat kabar di Mesir. Semuanya menolak dan tidak menyetujui adanya film itu, namun penolakan tetap harus dilakukan secara baik dan damai. Sementara untuk salah satu majalah Mesir lebih memilih menyampaikan protesnya dengan cara menerbitkan karikatur untuk melawan film <i>Innocence of Muslims</i> dan karikatur di majalah Charlie Hebdo. 4. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan pembuatan protokol internasional untuk mencegah kekerasan berlatar agama. 5. Pembuat film ditahan.
---------	--

Retoris	<p>Penggunaan kata-kata tertentu yang menunjukkan bahwa film <i>Innocence of Muslims</i> masih menjadi isu yang kontroversial. Merujuk pada banyaknya pendapat berbeda yang dilontarkan berbagai kalangan dalam merespon adanya film tersebut. Selain itu, adanya demonstrasi menolak film yang juga dinilai masih kental dengan unsur politik serta kepentingan pihak tertentu. Sementara itu, pihak AS yang cenderung di tempatkan pada posisi yang dirugikan karena adanya demonstrasi itu, dan AS tidak bisa menghukum pembuat film karena membuat film dalam AS masuk dalam ranah kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi.</p>
---------	---

3. Perbandingan Framing Republika dan Kompas

Beredarnya film *Innocence of Muslims* menuai banyak kritik, protes, bahkan kecaman dari sejumlah pihak dan umat Muslim di seluruh penjuru dunia. Isi dari film tersebut dinilai oleh banyak pihak sebagai film yang tidak pantas ditonton, menghina, memprovokasi dan menyerang agama Islam. Ada pula yang menilai film ini masih kontroversial, lantaran masih mengandung perdebatan dari beberapa kalangan, khususnya negara asal dari pembuat film.

Respon dan tanggapan atas beredarnya film *Innocence of Muslims* pun beragam. Beberapa pihak melakukan perlawanan dengan cara demonstrasi atau unjuk rasa, beberapa pihak menyarankan untuk melakukan protes secara damai atau dengan perundingan atau dialog antaragama, beberapa lagi menyarankan untuk mendingkan saja dan tidak menggubrisnya. Bahkan, ada pula yang

menyatakan bahwa jika hanya diprotes melalui jalan demonstrasi atau dialog saja itu belum cukup, karena menurut pandangan mereka hal itu belum sebanding dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Kemudian jika kita kembali menengok visi, misi serta kebijakan Republika dan Kompas, tentunya kita akan dapati perbedaan yang cukup menonjol dari keduanya. Republika memiliki ideologi ke-Islaman, sementara Kompas berideologi nasional. Republika mengusung visi, misi serta kebijakannya sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan dalam pemberitaannya pun selalu dihadirkan nuansa ke-Islaman yang disesuaikan dengan al-Quran dan as-Sunnah. Sedang Kompas, mengusung visi dan misinya bukan berdasarkan agama tertentu. Karena ia ingin menjadi surat kabar nasional yang bisa merangkul semua kalangan, dan tidak membedakannya berdasarkan pada agama pembacanya.

Di samping itu, Republika juga secara khusus memiliki peran yang cukup istimewa jika disandingkan dengan kegiatan dakwah Islam. Republika sebagai koran komunitas nasional Muslim pertama di Indonesia, menjadikan peran khususnya tersebut sebagai penopang dan pendukung dakwah Islam. Melihat fenomena munculnya film *Innocence of Muslim* tersebut, tentunya Republika tidak akan tinggal diam dan 'duduk manis' tanpa berbuat apa-apa. Lebih-lebih telah diketahui bersama bahwa film *Innoecne of Muslims* itu menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW. Kemunculan film itulah yang kemudian menjadikan peran dakwah Republika kembali terlihat sangat menonjol dibandingkan dengan surat kabar nasional lainnya.

Republika juga memainkan dua peran dakwahnya dalam memberitakan film *Innocence of Muslims*. Peran tersebut yaitu *Musaddid* (pelurus informasi) dan *Mujahid* (penjuang). Republika berperan sebagai pelurus informasi karena menurut Republika, film *Innocence of Muslims* tersebut telah menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Selain itu, film tersebut juga dinilai telah melecehkan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di seluruh dunia. Kemudian, peran Republika yang berikutnya bertujuan untuk memperjuangkan dan membela agama Islam dari serangan orang-orang yang tidak menyukai Islam. Melalui peran inilah kemudian Republika menuntut para jurnalis Muslim agar berusaha keras membentuk pendapat umum yang mendorong penegakan nilai-nilai Islam, menyemarakkan syiar Islam, mempromosikan citra Islam yang positif dan *rahmatan lil 'alamin*, serta menanamkan *ruhul jihad* di kalangan umat Islam.

Peran yang dijalankan oleh Republika tersebut merupakan kebijakan yang Republika buat dalam proses pemberitaannya. Sementara itu, ideologi Republika tercermin dalam visi dan misinya. Akan tetapi, keberadaan peran-peran tersebut tentunya juga sangat mendukung ideologi yang Republika bangun. Ideologi ke-Islamannya justru sangat terlihat dalam peran-peran yang dijalankan oleh Republika. Karena itulah, saat film *Innocence of Muslims* yang menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW ini muncul, Republika menjadi koran nasional yang sangat intens dan detail memberitakan tentang segala hal terkait film tersebut.

Ideologi Republika yang Islami tersebut, ternyata juga cukup jelas untuk bisa dilihat dalam pemberitaannya. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya Republika mengambil acuan dan sumber berita dari tokoh-tokoh agama Islam baik dari

dalam maupun luar negeri, untuk membangun frame atas film *Innocence of Muslims* sebagai film yang menistakan Islam. Dalam menceritakan film ini pun, Republika juga banyak mengambil pernyataan dari tokoh-tokoh yang memandangi film tersebut telah menistakan Islam. Selain itu, banyaknya pernyataan narasumber berita yang menyatakan film itu sebagai film yang menistakan Islam, juga dibingkai oleh Republika ke dalam beberapa judul atau *headline* beritanya.

Sementara itu, Kompas yang mempunyai ideologi nasionalis dan bersifat umum, serta ingin merangkul semua kalangan pembacanya tanpa membedakan berdasarkan agamanya, membangun frame bahwa film *Innocence of Muslims* adalah film kontroversial. Kompas menekankannya pada kalimat "Film Kontroversial" yang diletakkan pada dua *headline* beritanya. Framing film kontroversial ini juga didukung oleh pernyataan dari pimpinan Mesir. Kompas pun menempatkannya pada berita yang diturunkannya pertama kali sejak beredarnya film *Innocence of Muslims*.

Hal tersebut bisa dimengerti lantaran Kompas dalam visi dan misinya ingin membangun masyarakat Indonesia yang lebih harmonis, toleran, aman dan sejahtera. Karena itu, pemberitaan yang diangkat pun berkenaan dengan fakta yang terjadi setelah munculnya film *Innocence of Muslims* tersebut. Kompas lebih banyak menyajikan pemberitaan mengenai maraknya demonstrasi di berbagai negara yang menolak film tersebut. Hal ini pun didasarkan pada sumber berita dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga menolak kehadiran film itu. Pemberitaan Kompas mengenai demonstrasi tersebut bukan berarti mendukung

adanya aksi tersebut, akan tetapi ia menolak adanya aksi protes secara berlebihan yang banyak dilakukan di negara-negara lain.

Selain itu, menurut Kompas, sekalipun Kompas menghargai perbedaan atau pluralisme, namun munculnya film *Innocence of Muslims* itu dikhawatirkan juga akan berdampak pada perpecahan bangsa. Karena itu dalam pemberitaannya, Kompas juga menjelaskan mengenai akibat yang terjadi karena munculnya film tersebut, seperti adanya demonstrasi yang berujung anarkis dan merusak. Itulah yang kemudian menjadi alasan bagi Kompas untuk tidak banyak memberitakan perihal film tersebut serta siapa yang bertanggungjawab atas munculnya film itu. Sebab jika yang diberitakan adalah hal itu, maka demonstrasi yang terjadi akan berlangsung lebih lama. Untuk itulah, sesuai dengan slogannya “Amanat Hati Nurani Rakyat”, Kompas memilih untuk tetap mengedepankan persatuan nasional di atas segalanya (Wawancara dengan Mohammad Bakir, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas, tanggal 4 Juli 2013).

Adapun secara spesifik, hasil perbandingan analisis framing dari setiap elemen Pan dan Kosicki dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Elemen Sintaksis

Elemen ini berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa ke dalam bentuk susunan umum berita. Framing berita dalam elemen ini dapat dilihat dari pernyataan, opini, kutipan, sumber berita, *headline* atau judul, *lead* yang diambil, ataupun latar berita. Dari sisi sintaksis ini, ada empat hal yang cukup membedakan antara Republika dan Kompas dalam memberitakan film

Innocence of Muslims. Tiga hal tersebut yakni jumlah atau intensitas berita yang terbit, penempatan berita, *headline* dan sumber berita.

Republika yang menganggap film *Innocence of Muslims* sebagai film yang menistakan Islam, banyak menerbitkan pemberitaan tentang segala hal terkait film ini. Sebanyak 27 berita diterbitkan oleh Republika selama kurun waktu 14 September 2012 hingga 1 Oktober 2012. Namun ke-27 berita tersebut adalah berita-berita yang telah dipilih oleh penulis sebagai objek penelitian pada penelitian ini. Selebihnya, seperti tajuk rencana dan resonansi mengenai film ini tidak masuk dalam 27 berita tersebut.

Berita-berita tersebut diterbitkan secara berkala oleh Republika. Dalam sehari, Republika bisa mengeluarkan 2 hingga 5 berita sekaligus. Secara terperinci Republika menerbitkan berita tentang film ini pada 14 September 2012 sebanyak 5 berita, 17 September 3 berita, 19 September 2 berita, 20 September 1 berita, 21 September 2 berita, 22 September 1 berita, 23 September 1 berita, 24 September 2 berita, 25 September 2 berita, 26 September 3 berita, 27 September 3 berita, 28 September 1 berita, dan 1 Oktober 2012 sebanyak 1 berita. Dengan demikian, intensitas berita yang sering diterbitkan oleh Republika ini menunjukkan bahwa peristiwa itu penting. Beredarnya film *Innocence of Muslims* harus diketahui oleh khalayak, agar mereka mengetahui bahwa film ini telah menistakan Islam.

Sementara itu, dalam jangka waktu yang hampir relatif sama, Kompas hanya menerbitkan 9 berita mengenai film *Innocence of Muslims*. Kompas juga mengawali pemberitaan mengenai film ini pada tanggal 14 September 2012,

namun berakhir pada 29 September 2012. Selain itu, Kompas juga menerbitkan pemberitaan ini tidak berkala layaknya Republika yang setiap harinya bisa mengeluarkan 2 hingga 5 berita sekaligus mengenai film ini.

Dalam kurun waktu 16 hari itu, Kompas menurunkan berita tentang film *Innocence of Muslims* pada tanggal 14 September 2012 sebanyak 2 berita, 15 September 2012 sebanyak 1 berita, 17 September 2012 sebanyak 1 berita, 19 September 2012 sebanyak 1 berita, 20 September 2012 sebanyak 1 berita, 27 September 2012 sebanyak 2 berita, dan 29 September 2012 sebanyak 1 berita. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa beredarnya film *Innocence of Muslims* tersebut bukan menjadi hal penting untuk diberitakan. Pemberitaan mengenai film ini hanya sebagai informasi bagi khalayak pembaca dan umat beragama di Indonesia.

Pada segi penempatan berita, Republika lebih banyak menempatkan berita mengenai film *Innocence of Muslims* ini pada halaman pertama. Republika sebagai surat kabar harian yang memiliki khalayak pembaca umat Muslim, berusaha menunjukkan bahwa beredarnya film *Innocence of Muslims* ini merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui umat Muslim Indonesia. Karena itulah, sepuluh dari dua puluh tujuh beritanya ditempatkan pada halaman satu surat kabar. Penempatan tersebut mengesankan bahwa peristiwa beredarnya film *Innocence of Muslims* bukan masalah kebebasan berekspresi semata, namun hal itu menjadi masalah bersama umat Muslim di seluruh dunia.

Hal ini dapat dipahami karena dari kacamata ideologis Republika, film *Innocence of Muslims* jelas bukan film yang dibuat atas dasar kebebasan

berekspresi saja. Film ini telah menistkan Islam dan Nabi Muhammad SAW, dan ada unsur propaganda untuk menyerang Islam. Oleh karena itulah, Republika melihat adanya kemuliaan Islam dan Nabi Muhammad SAW yang dinodai oleh film *Innocence of Muslims*. Karenanya, Republika menentang keras beredarnya film ini, dan menunjukkannya secara gamblang pada dua berita yang menjadi berita utama pada halaman satu beritanya. Pada 14 September 2012 inilah Republika menurunkan dua berita utamanya yang mengupas tentang produksi film *Innocence of Muslims*, serta tanggapan tokoh umat beragama atas film ini.

Republika sebagai salah satu surat kabar Muslim, yang juga memiliki peran sebagai pelurus informasi, memandang film *Innocence of Muslims* bertentangan dengan ideologi Islam. Adanya unsur ideologis pada beritanya tentang film ini dapat dilihat pada berita utama 14 September 2012 yang bertajuk “Pengakuan Awak Film *Innocence of Muslims*”, sebagai berikut:

Dalam pengakuan, para kru dan pemain mengatakan mereka dibayar untuk film berjudul Desert Warrior, bukannya The Innocence of Muslims. “Seluruh pemain dan kru sangat kecewa dan merasa dimanfaatkan oleh produser. Kami 100 persen tidak mendukung film seperti ini dan kami merasa dikelabui. Kami juga terkejut oleh penulisan ulang naskah dan semua kebohongan yang terlihat dalam film ini,” demikian pernyataan pers yang dikutip dari CNN.

Cindy Lee Garcia, aktris Kalifornia yang mendapatkan peran kecil di film ini, mengaku tidak tahu menahu filmnya jadi alat propaganda menyerang Islam. cindy mengatakan sutradara memberitahu filmnya berjudul Desert Warrior mengisahkan kehidupan rakyat Mesir 2.000 tahun lalu.

Sementara itu, Kompas menempatkan enam dari sembilan beritanya pada halaman internasional, satu berita pada halaman umum, serta dua berita lainnya dalam halaman politik dan hukum. Kompas lebih memandang beredarnya film ini sebagai suatu masalah multilateral antara negara AS, Libya dan Mesir yang tidak

memiliki sangkut paut secara kuat dengan masyarakat Indonesia. Kompas pun meletakkan dua beritanya dalam halaman politik dan hukum, menunjukkan bahwa peristiwa tersebut termasuk dalam ranah politik dan hukum, karena respon penolakan terhadap film berujung pada jatuhnya korban jiwa dan merusak sejumlah fasilitas kenegaraan milik AS di negara Mesir atau pun Libya.

Hal itu pun diperkuat dengan satu berita yang ditempatkan Kompas pada halaman umum beritanya. Berita pada tanggal 14 September 2012 yang diletakkan pada halaman umum dan berjudul "AS Janjikan Investigasi Menyeluruh: Serangan di Benghazi Terencana" itu sebagai berikut:

Pemerintah Amerika Serikat, Kamis (13/9), bertekad melakukan investigasi menyeluruh atas insiden serangan pada fasilitas diplomatiknya di Benghazi, Libya. Serangan yang terjadi pada Selasa malam itu menewaskan Duta Besar untuk Libya Christopher Stevens dan tiga anggota staf kedutaan besar.

Presiden Barack Obama dan Presiden Majelis Nasional Libya Mohamed el-Magariaf, Rabu malam, sepakat menggelar investigasi terkait serangan itu. Stevens dan tiga anggota staf kedubes tewas akibat diserang massa pengunjuk rasa di depan kantor Konsulat AS di Benghazi.

Stevens tewas dalam kunjungan singkat ke kantor Konsulat AS di Benghazi. Pria yang baru 4 bulan jadi Dubes AS untuk Libya itu berlindung bersama anggota staf informasi Sean Smith ketika tempat mereka berlindung turut terbakar diserang massa yang membawa senjata otomatis dan roket peluncur granat.

Massa memprotes beredarnya film berisi penghujatan terhadap nabi di AS dan situs sosial Youtube. Smith ditemukan tewas di lokasi, sedangkan Stevens diketahui tewas di rumah sakit.

Dari sini terlihat jelas bahwa Kompas melupakan nabi siapakah yang mendapat penghinaan dari film yang dimaksudkan. Kompas juga tidak menyebutkan judul film yang berisi penghujatan terhadap nabi tersebut. Kompas lebih banyak membahas permasalahan mengenai tewasnya Duta Besar AS untuk

Libya serta tiga anggota staf kedubesnya, baik itu pada *headline* atau pun *lead* beritanya.

Perbedaan ketiga terletak pada *headline* yang diambil oleh Republika dan Kompas. Judul atau *headline* berita merupakan aspek sintaksis dari wacana berita yang memiliki tingkat kemenonjolan tinggi, dan menunjukkan kecenderungan berita. *Headline* inilah yang mempunyai fungsi framing yang kuat, sebab ia dapat mempengaruhi bagaimana suatu kisah dimengerti (Eriyanto, 2005: 257).

Republika banyak mengambil *headline* yang menonjolkan bahwa film *Innocence of Muslims* telah menghina Nabi Muhammad SAW dan Islam. Selain itu, pada terbitan pertama mengenai film ini, Republika juga menampilkan berita tentang asal mula film itu ada. Hal ini untuk menguak kebenaran dari film tersebut. Sehingga, berita-berita yang muncul berikutnya menunjukkan bahwa film itu memang sengaja dibuat untuk menghina atau memojokkan Islam.

Sementara itu, Kompas lebih memilih *headline* berita yang bersifat umum atau netral. Kompas lebih banyak menampilkan beritanya dengan *headline* yang mengarah pada aksi unjuk rasa yang terjadi. Namun, hal tersebut justru membuat pembaca tidak bisa langsung mengerti kemana arah berita akan dibawa, jika sekilas membaca *headline* berita yang disajikan. *Headline* yang diambil tidak banyak mencerminkan pada peristiwa beredarnya film *Innocence of Muslims*, dan isi filmnya yang mengandung penghinaan pada Islam dan Nabi Muhammad. Untuk itu, pembaca diharuskan untuk mengikuti setiap perkembangan berita

Kompas yang memberitakan peristiwa tersebut, agar mengetahui maksud dari judul berita selanjutnya.

Pengutipan sumber berita atau pemilihan sumber berita, juga menjadi bagian penting pada elemen sintaksis model Pan dan Kosicki ini. Perbedaan keempat pada Republika dan Kompas dalam melihat film *Innocence of Muslims* ini terletak pada pemilihan sumber beritanya. Republika tidak hanya mengambil sumber berita dari media mainstream Barat seperti Reuters ataupun Associated Press (AP), tapi Republika juga mengutip Aljazirah atau Alarabiya yang mengungkapkan sisi berbeda dari film *Innocence of Muslims* ini. Selain itu, Republika juga mengutip sumber lain baik dari Presiden Republik Indonesia sendiri, tokoh-tokoh agama di Indonesia, ataupun Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS), bahkan melakukan wawancara langsung dengan Duta Besar AS untuk Indonesia.

Pemilihan sumber yang dilakukan Republika, sekalipun sekilas terlihat imbang dan proporsioanal antara sumber dari Barat maupun Islam (dalam hal ini diwakili oleh media Islam seperti Aljazirah dan Alarabiya, serta tokoh-tokoh Muslim Indonesia), Republika tetap menunjukkan keberpihakannya pada Islam. Hampir pada setiap pernyataan dari sumber berita yang menunjukkan bahwa film *Innocence of Muslims* tidak melanggar hak beragama serta sikap saling menghormati antar pemeluk agama, Republika menyertakan pula pernyataan lain yang seolah mematahkan argumen sebelumnya. Hal tersebut dapat tercermin dalam salah satu beritanya yang berjudul "Hillary Clinton Harapkan Toleransi" :

New York – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton berharap, Muslim menunjukkan kehormatannya dan tak melakukan kekerasan dalam memprotes film yang dianggap menghina. Ia menekankan toleransi diantara perbedaan. Namun, umat Islam mempertanyakan bagaimana toleransi bisa tercapai jika satu pihak telah melanggar batas.

Kemudian pada alinea ke lima, Republika menuliskan pernyataan dari Ulama Gaza yang berbunyi:

Ulama dari Gaza, Palestina, Syekh Hisham Akram mengatakan, toleransi merupakan tujuan, sayangnya tak semua orang berjalan ke arah sana. "Garis batas diterabas oleh siapa pun yang menistakan agama kami," katanya menegaskan.

Sementara itu, Kompas yang lebih banyak menonjolkan mengenai fakta demonstrasi yang terjadi memprotes film *Innocence of Muslims*, memilih sumber beritanya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh-tokoh agama di Indonesia dan ahli hukum Mahfud MD. Kompas juga memilih sumber beritanya dari media mainstream Barat seperti AP, AFP, Reuters, BBC, DI dan CAL. Namun dari beberapa sumber berita yang dipilih oleh Kompas memang menunjukkan bahwa hal terpenting yang dijadikan fokus utama, di samping mengenai film *Innocence of Muslims* itu sendiri, tapi juga mengenai aksi unjuk rasa serta akibat yang ditimbulkannya. Hal ini karena menurut Kompas, aksi unjuk rasa menentang film itu telah melampaui batas dan mengarah pada perpecahan bangsa. Karena itulah, Kompas memilih menampilkan sumber berita itu demi menjaga persatuan nasional.

Ringkasan penjelasan di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perangkat framing	Republika	Kompas
Headline	Judul-judul berita menonjolkan bahwa film <i>Innocence of Muslims</i> telah menghina Nabi Muhammad SAW dan Islam. 10 buah berita ditempatkan pada halaman pertama surat kabar dan menjadi <i>headline</i> atau berita utama pada hari itu.	Judul-judul berita menonjolkan aksi unjuk rasa yang terjadi serta akibat yang ditimbulkan oleh aksi tersebut. 6 buah berita ditempatkan pada halaman internasional, serta dua berita lainnya pada halaman umum dan halaman politik dan hukum.
Sumber berita	Reuters, Associated Press (AP), Aljazirah, Alarabiya, Presiden Republik Indonesia sendiri, tokoh-tokoh agama di Indonesia, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS), serta Duta Besar AS untuk Indonesia.	Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh-tokoh agama di Indonesia dan ahli hukum Mahfud MD. Kompas juga memilih sumber beritanya dari media mainstream Barat seperti AP, AFP, Reuters, BBC, DI dan CAL.
Intensitas berita	Selama 18 hari dalam kurun waktu 14 September 2012 hingga 1 Oktober 2012 Republika menerbitkan 27 berita mengenai film <i>Innocence of Muslims</i> . Berita diturunkan secara berkala hampir pada setiap harinya.	Selama 16 hari dalam kurun waktu 14 September 2012 sampai 29 September 2012, Kompas menerbitkan 9 berita mengenai film <i>Innocence of Muslims</i> . Berita tidak diturunkan secara berkala dan kontinyu.

b. Elemen Skrip

Elemen skrip merupakan elemen yang berhubungan dengan cara atau strategi berkisah wartawan dalam menyajikan sebuah informasi atau peristiwa, yang kemudian dikemas dalam bentuk berita. Umumnya, bentuk dari struktur skrip ini adalah pola 5 W 1 H, what (apa), who (siapa), why (mengapa), when (kapan), where (dimana), dan how (bagaimana). Unsur kelengkapan berita dari elemen skrip ini juga dapat menjadi penanda framing yang penting.

Perbedaan yang paling terlihat menonjol pada pemberitaan Republika dan Kompas mengenai film *Innocence of Muslims* ini terletak pada unsur *why* dan *how*. Republika lebih menitikberatkan pada unsur *why*, sedang unsur *how* lebih ditekankan pada pemberitaan Kompas. Sementara untuk keempat unsur skrip lainnya, Republika dan Kompas tidak banyak memiliki perbedaan. Keduanya sama-sama melihat demonstrasi di beberapa negara yang mayoritas berpenduduk Islam, sudah terjadi sejak 12 September 2012 dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta rusaknya beberapa fasilitas milik AS.

Republika membingkai beritanya dengan lebih menitikberatkan pada unsur *why*, mengapa terjadi aksi unjuk rasa atau demonstrasi dengan kekerasan, mengapa ada penolakan dari umat Muslims, dan mengapa pemerintah AS diminta untuk bersikap tegas serta lebih menghormati umat Muslim. Semuanya itu tidak lain karena beredarnya film *Innocence of Muslims* pada media sosial *youtube*. Republika memandang, film inilah yang menjadi sebab terjadinya aksi kekerasan dan desakan pada pemerintah AS. Hal ini juga dikarenakan, konten film yang dinilai menyimpang dari keyakinan umat Muslim dan ajaran Islam.

Dalam setiap pemberitaannya, Republika selalu memberikan penjelasan bahwa aksi kekerasan, protes, desakan, dan permintaan pada pemerintah AS itu lantaran sebelumnya telah beredar film *Innocence of Muslims*. Film ini menurut Republika telah menyakiti hati umat Muslim seluruh dunia, karena dalam film itu ada penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW.

Karena itulah, Republika menempatkan frame atas film *Innocence of Muslims* ini pada peta ideologi *sphere of deviance* (bidang penyimpangan) karena telah menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, Republika menempatkan Islam, Nabi Muhammad SAW dan umat Muslim dalam *sphere of consensus* (bidang konsensus), karena dianggap sebagai pihak yang tersakiti dan dihina. Dengan kata lain, Republika menempatkan film *Innocence of Muslims* serta produser dan sutradaranya, bahkan pemerintah AS sebagai pihak “Mereka”, sedang Islam, Nabi Muhammad SAW, serta umat Muslim dalam pihak “Kami”.

Berbeda dengan Republika, dalam elemen skrip ini Kompas lebih menitikberatkan beritanya pada unsur *how*. Kompas lebih banyak menyajikan pemberitaan mengenai kronologi dari aksi protes terhadap film *Innocence of Muslims*, serta bagaimana pemerintah AS dan umat Muslim di Indonesia menyikapi beredarnya film ini. Sementara untuk unsur *why* hanya ditemukan pada dua berita. Unsur *why* ini menjawab pertanyaan dari mengapa unjuk rasa di Mesir dipolitisasi dan mengapa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, mengusulkan dibentuknya instrumen atau protokol internasional.

Berbeda dengan Republika, unsur *why* sedikit ditekankan oleh Kompas, dan hanya ditemukan pada dua berita saja. Unsur *why* pada pemberitaan Kompas ini menjawab pertanyaan dari, mengapa unjuk rasa di Mesir dipolitisasi dan mengapa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, mengusulkan dibentuknya instrumen atau protokol internasional. Salah satu dari berita itu, barulah ditemukan unsur *why* pada pemberitaannya yang mengarah pada film *Innocence of Muslims*. Sementara itu, tujuh berita lainnya lebih menitikberatkan pada unsur *how*. Pada tujuh berita itu, Kompas lebih dominan menjelaskan mengenai kronologi terjadinya aksi protes terhadap film *Innocence of Muslims*, serta bagaimana pemerintah AS dan umat Muslims menyikapi beredarnya film ini.

Namun, walau ketujuh berita itu lebih banyak menyajikan unsur *how*, setiap pemberitaan mengenai kronologi terjadinya unjuk rasa atau demonstrasi itu, kurang dijelaskan secara gamblang mengenai penyebab terjadinya aksi tersebut. Selain itu, unsur *how* tersebut dominan disajikan pada *headline* beritanya. Hal ini juga yang kemudian membuat pembaca Kompas masih akan menduga-duga sebab terjadinya unjuk rasa. Jika pembacanya hanya membaca pada bagian *headline* beritanya saja.

Karena itulah, di sini dapat terlihat bahwa Kompas menempatkan frame atas film *Innocence of Muslims* ini pada peta ideologi *Sphere of Legitimate Controversy* (bidang kontroversi), selain penekanan berita yang tidak banyak tertuju pada film ini, film *Innocence of Muslims* ini juga masih diperdebatkan dan banyak perbedaan pendapat dalam menyikapi film ini. Sementara itu, orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa, khususnya dengan anarkis ditempatkan pada

peta ideologi *sphere of deviance* (bidang penyimpangan), karena menyebabkan korban jiwa dan menimbulkan kerusakan. Dengan kata lain, Kompas menempatkan para pengunjung rasa sebagai pihak “Mereka”.

Berikut ini ringkasan dari penjelasan mengenai elemen skrip di atas:

Perangkat framing	5 W + 1 H
Republika	Unsur <i>why</i> (mengapa) lebih ditekankan pada pemberitaannya. Penekanan pada aspek ini menguatkan <i>frame</i> mengapa ada atau terjadi demokrasi dengan kekerasan, dan mengapa serta pemerintah AS diminta untuk lebih bersikap tegas dalam menangani film <i>Innocence of Muslims</i> ini. Terjadinya kekerasan dan desakan pada pemerintah AS itu tidak lain karena beredarnya film <i>Innocence of Muslims</i> yang telah menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, karena film ini juga dianggap menyerang agama dan umat Islam.
Kompas	Lebih menekankan pada unsur <i>how</i> (bagaimana). Penekanan pada aspek ini terlihat lebih menonjol pada berita-beritanya. Hal ini karena berita yang ditampilkan lebih banyak mengangkat mengenai aksi unjuk rasa atau protes terhadap film <i>Innocence of Muslims</i> , yang banyak terjadi di hampir seluruh penjuru dunia dan negara yang mayoritas penduduknya Islam.

c. Elemen Tematik

Elemen tematik ini berhubungan dengan bagaimana suatu fakta ditulis oleh media. Secara detail, narasi pemberitaan Republika atas beredarnya film *Innocence of Muslims*, ditulis sebagai berikut :

- 1) Penjelasan awal mengenai film *Innocence of Muslims* sebagai film yang memprovokasi, film yang menghina Nabi Muhammad, film yang mengadu domba dan sebagai ajang mendiskreditkan umat Muslim di seluruh dunia.
- 2) Pengakuan dari awak film *Innocence of Muslims*, yang semakin memperjelas bahwa film *Innocence of Muslims* memang sengaja diproduksi untuk menghina atau memprovokasi umat Muslim di seluruh dunia.
- 3) Terjadinya aksi unjuk rasa dengan kekerasan. Unjuk rasa terjadi karena beredarnya film *Innocence of Muslims*, umat Muslim tidak menerima agama dan Nabinya dihina dan dilecehkan melalui film tersebut. Aksi unjuk rasa menelan korban jiwa dan beberapa fasilitas milik AS rusak.
- 4) AS mulai menarik staf kedutaan besarnya di beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim.
- 5) Pernyataan Obama yang mengatakan AS tidak menyetujui adanya upaya menghina Islam melalui film *Innocence of Muslims*.
- 6) Pembuat film *Innocence of Muslims* mulai diinvestigasi, namun bukan tentang film itu, meskipun dampaknya secara jelas memicu kerusuhan. Pembuat film diinvestigasi karena melanggar klausul masa percobaan tahanannya.
- 7) Desakan dan permintaan pada pemerintah AS untuk mengusut dan bersikap tegas pada pembuat film *Innocence of Muslims*. Karena film itu masuk dalam ranah isu sensitif penodaan agama.

- 8) Tokoh-tokoh agama, baik dari kalangan umat Muslim, Kristiani, Katolik, dan Buddha mengecam film *Innocence of Muslims* yang dinilai memprovokasi.
- 9) Himbauan pada umat Muslim di dunia pada umumnya, dan khususnya di Indonesia, untuk tidak berbuat anarkis dalam memprotes film *Innocence of Muslims*.
- 10) Dicetuskannya usulan penyusunan protokol atau aturan antipenistaan agama oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Umat Islam di Indonesia dan negara-negara anggota OKI menyetujui usulan tersebut, namun AS dan negara anggota PBB lainnya belum menyetujui, karena masih mempertimbangkan adanya kebebasan berekspresi dalam konstitusi AS.

Adapun detail berita yang dituliskan oleh Kompas adalah sebagai berikut :

- 1) AS akan melakukan investigasi dan mengidentifikasi pelaku terkait insiden serangan di kantor konsulat Benghazi, Libya yang menewaskan seorang Duta Besarnya dan tiga staf konsulatnya. Serangan di Benghazi ini juga dinilai sebagai serangan yang terencana.
- 2) Aksi unjuk rasa dan demonstrasi di beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim yang memprotes beredarnya film *Innocence of Muslims*. Namun aksi itu dinilai sebagai aksi yang dipolitisasi dan ada demonstran bayarannya.
- 3) Respon terhadap film *Innocence of Muslims* dari berbagai kalangan seperti akademisi, aktivis, peneliti, tokoh agama, ahli hukum, dan hubungan luar

negeri, serta salah satu surat kabar di Mesir. Semuanya menolak dan tidak menyetujui adanya film itu, namun penolakan tetap harus dilakukan secara baik dan damai. Sementara untuk surat kabar Mesir lebih memilih menyampaikan protesnya dengan cara menerbitkan karikatur untuk melawan film *Innocence of Muslims* dan karikatur di majalah Charlie Hebdo.

- 4) Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan pembuatan protokol internasional untuk mencegah kekerasan berlatar agama.
- 5) Pembuat film ditahan.

Ringkasnya, rentetan fakta dari pemberitaan film *Innocence of Muslims* pada kedua surat kabar tersebut adalah:

Perangkat framing	Tematik
Republika	Runtutan penyusunan fakta pada Republika dimulai dengan penjelasan mengenai film <i>Innocence of Muslims</i> , baik tentang alur ceritanya, sutradara, ataupun pengakuan dari para pemainnya. Berlanjut pada fakta tentang terjadinya aksi protes terhadap film dan seseorang yang diduga sebagai sutradara film <i>Innocence of Muslims</i> mulai diinvestigasi. Namun, sikap tegas dari Pemerintah AS tak kunjung datang juga, hingga pemerintah Indonesia dan umat Islam mulai mendesak pemerintah AS agar segera mengambil sikap tegas untuk menghukum pembuat film. Kemudian adanya usulan untuk membuat instrumen antipenistaan agama. Instrumen dibuat agar ada batasan yang jelas mengenai kebebasan berekspresi atau berpendapat yang tidak menyudutkan atau menghina suatu agama tertentu.

Kompas	Fakta pertama yang disampaikan pada pembaca adalah adanya insiden yang menewaskan Duta Besar AS untuk Libya. Setelah berita mengenai insiden ini diturunkan, keesokan harinya Kompas menerbitkan berita mengenai fakta beredarnya film <i>Innocence of Muslims</i> yang diduga menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang respon penolakan terhadap film dan aksi protes terhadap film dari berbagai kalangan seperti akademisi, aktivis, peneliti, tokoh agama, ahli hukum dan hubungan luar negeri, serta dari salah satu majalah di Mesir. Lalu adanya usulan dari Presiden RI untuk menyusun protokol atau instrumen antipenistaan agama. Barulah kemudian fakta terakhir yang dituliskan yaitu mengenai ditahannya pembuat film <i>Innocence of Muslims</i> .
---------------	---

d. Elemen Retoris

Elemen retorik ini merupakan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan. Elemen ini juga menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan oleh media, itulah kebenaran yang terjadi. Beberapa struktur yang biasa dipakai pada elemen ini seperti leksikon, unsur grafis, pemilihan dan pemakaian kata-kata tertentu untuk menandai atau menggambarkan suatu peristiwa. Perbedaan yang ditemui pada pemberitaan Republika dan Kompas, tidak hanya mencakup tentang anggapan mengenai film *Innocence of Muslims*, tetapi keduanya juga memiliki perbedaan dalam hal siapa yang diposisikan pada bidang *sphere of deviance* (bidang penyimpangan).

Republika sebagai surat kabar harian muslim pertama di Indonesia, memiliki banyak istilah untuk menggambarkan film *Innocence of Muslims* ini. Namun dari banyaknya istilah yang digunakan itu, ada pula yang mempunyai titik

tekan tinggi. Penekanan pada istilah itu ditandai dengan intensitas istilah yang muncul pada pemberitaanya. Republika lebih banyak menggunakan kata atau istilah menistakan atau menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW, sebagai representasi dari film *Innocence of Muslims*. Penggunaan istilah tersebut, sedikitnya diulang sebanyak dua puluh satu kali. Bahkan tiga diantaranya dijadikan sebagai judul berita, dan satu kali penyebutan kata “menistakan” itu ditempatkan pada bagian *caption* foto.

Pemilihan istilah “menistakan” atau “menghina” itu tidak hanya berasal dari wartawan Republika sendiri saja, namun juga dikuatkan dengan pernyataan dari beberapa tokoh besar Islam, baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya seperti Mufti Arab Saudi, dan Pemimpin Spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei. Selain itu, Republika juga menurunkan berita dalam bentuk *soft news* atau sejenis *feature* (berita kisah), yang mengangkat tentang sikap yang semestinya ditunjukkan oleh umat Islam dalam menanggapi beredarnya film *Innocence of Muslims*, serta penjelasan tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. Dalam berita ini pun dituliskan beberapa istilah untuk menggambarkan akhlak atau pribadi Rasulullah SAW. Salah satu kutipan kalimat dalam berita ini adalah sebagai berikut :

“Semoga festival ini dapat memberikan sumbangan dalam meng-counter aksi-aksi penghinaan dan menarik simpati masyarakat di luar Islam terhadap sosok sang manusia paripurna, pembawa kasih sayang dan perdamaian, pemimpin umat manusia di akhir zaman, Muhammad, putra Abdullah.”

Pada akhir berita *feature* inilah terlihat bagaimana Republika memainkan perannya sebagai surat kabar harian yang memiliki segmen pembaca umat Islam.

Republika memilih untuk tetap menampilkan istilah-istilah tersebut, walaupun diletakkan pada akhir paragraf. Hal ini karena, itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Republika kepada pembacanya. Meski banyak orang yang tidak suka, atau menistakan, atau menghina Nabi Muhammad SAW, namun Nabi Muhammad tetaplah sosok manusia yang sempurna sifat dan akhlaknya.

Hal berbeda diterapkan Kompas dalam merepresentasikan film *Innocence of Muslims*. Kompas tidak menempatkan kata “menistakan” dalam pemberitaannya. Kompas lebih memilih menggunakan kata yang lebih halus dari kata “menistakan”, yaitu “menghina”. Istilah “menghina” ini sama halnya seperti Republika yang juga merupakan kata pilihan wartawannya dan juga dari pernyataan sumber berita. Namun yang menarik pada pemberitaan Kompas mengenai hal ini, ada pada salah satu beritanya.

Pada 20 September 2012 Kompas menurunkan berita yang berjudul “Film Kontroversial, Mahfud: Tidak Perlu Ditanggapi”, Kompas menyertakan pendapat dari pendeta Albertus Patti dalam menanggapi munculnya film “*Innocence of Muslims*”. Albertus yang mengaku dirinya sebagai orang kristen, dalam berita ini, ia memberikan pernyataannya bahwa dirinya juga merasa marah dengan munculnya film *Innocence of Muslims* yang menghina umat Islam. Pada berita ini dituliskan :

Albertus memahami kemarahan umat Islam terhadap pembuatan film tersebut. “Sebagai orang Kristen, saya pun marah dengan film yang menghina umat Islam,” katanya.

Melihat latar belakang berdirinya Kompas, bukan menjadi hal mustahil jika Kompas juga mengambil pernyataan dari umat Kristiani. Hal itu pun juga

dapat terlihat pada pemberitaan Kompas dalam memberitakan film *Innocence of Muslims* ini. Adanya pernyataan dari pendeta Kristiani ini cukup mewakili bahwa sekalipun pembuat film *Innocence of Muslims* adalah seseorang yang beragama Kristen Koptik, namun bukan berarti semua umat Kristiani yang bersalah. Karena film itu hanyalah perbuatan individu, bukan secara keseluruhan atau yang mewakili umat Kristiani.

Selain itu, Kompas juga lebih menekankan istilah “kontroversial” untuk menggambarkan film *Innocence of Muslims* ini. Bahkan kata ini juga ditemukan pada dua judul berita yang diturunkan Kompas. Hal ini tentunya juga akan menarik perhatian pembacanya. Sehingga citra yang akan ditangkap khalayak dalam melihat film *Innocence of Muslims* ini adalah kontroversial. Film *Innocence of Muslims* ini akan dilihat sebagai film kontroversial. Karenanya, khalayak pun akan menerima pesan bahwa reaksi Kompas pada pemberitaan film *Innocence of Muslims* ini adalah memberikan saran agar tidak menyikapinya dengan aksi anarkis. Karena film *Innocence of Muslims* ini masih dianggap sebagai film yang kontroversial.

Perbedaan kedua yang cukup menonjol dari Republika dan Kompas terletak pada, siapakah yang diposisikan pada *sphere of deviance* (bidang penyimpangan). Merujuk pada kebijakan Republika yang salah satunya menjadikan Republika sebagai *musaddid* (pelurus informasi), yaitu meluruskan informasi mengenai Islam, ajarannya, dan juga Nabi Muhammad SAW dari segala hal yang menghinakan Islam atau Nabi Muhammad SAW, Republika menempatkan pembuat atau sutradara film *Innocence of Muslims* serta produser,

dan Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada bidang penyimpangan ini. Republika menilai, film *Innocence of Muslims* telah memberikan informasi yang salah mengenai Islam dan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dengan produser atau orang-orang yang mendukung film ini, juga telah memberikan pemahaman yang keliru kepada khalayak.

Tak berhenti pada hal itu saja, Republika juga menampilkan berita yang menjelaskan tentang asal muasal film *Innocence of Muslims* ini muncul. Pada berita itu juga secara jelas dikatakan bahwa pembuat film ini adalah seorang beragama Kristen Koptik warga negara asal Amerika Serikat yang menetap di Mesir. Akan tetapi, pada pemberitaannya, Republika menyebutkan bahwa AS tidak bisa menghukum pembuat film, karena film itu adalah salah satu bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sementara kebebasan berekspresi dan berpendapat itu dilindungi oleh konstitusi. Hal inilah yang kemudian menjadikan Republika menilai AS sebagai pihak yang berada pada bidang *sphere of deviance*. Hal ini dapat dipahami karena Republika memang memiliki peran sebagai media Muslim yang harus meluruskan semua informasi mengenai Islam.

Republika menilai Pemerintah AS gagal mempertahankan sikap toleransi antar pemeluk agama, dan juga dianggap masih menerapkan standar ganda, khususnya kepada umat Muslim. Presiden Obama dan Pemerintah AS dinilai cenderung lebih berpihak pada pembuat film, yang secara nyata telah menyakiti hati umat Islam dengan munculnya film *Innocence of Muslims* ini. Karena itulah, dalam pemberitaannya, Republika juga memberikan desakan pada Pemerintah AS untuk menghukum pembuat film *Innocence of Muslims* yang telah menistakan

Islam dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Republika melakukan wawancara eksklusif dengan Duta Besar AS untuk Indonesia, agar ikut menemukan solusi dan melakukan tindakan yang tepat pada pembuat film.

Frame pemberitaan Republika yang mengarahkan pemahaman khalayak bahwa Islam dan Nabi Muhammad SAW tidak boleh dihina atau dinistakan ini, sesuai dengan posisi Republika yang menempatkan dirinya sebagai media dakwah. Sebagai media dakwah, misi Republika adalah menyampaikan kebenaran tentang Islam dan meluruskan informasi mengenai ajaran Islam yang sebenarnya. Dalam pemberitaannya, Republika menyajikan berita yang cukup banyak pada umat Islam agar tidak terbuai dan terlena atau bahkan tertipu dengan media Barat, yang menyajikan informasi yang keliru mengenai Islam.

Itulah sebabnya, terkait beredarnya film *Innocence of Muslims* beberapa bulan lalu, Republika dengan gencar menyajikan berita mengenai film ini serta perkembangan dari desakan kepada Pemerintah AS untuk menghukum pembuat film, dan juga dukungan untuk dibuatnya peraturan antipenistaan agama. Hal ini tidak lain adalah, agar tidak ada lagi penghinaan yang dilakukan oleh segelintir orang terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW.

Sementara itu, yang ditempatkan pada bidang penyimpangan oleh Kompas adalah para pengunjuk rasa yang melakukan aksinya dengan anarkis. Perbuatan anarkis yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa itu menimbulkan kerugian pada pihak tertentu. Dalam hal ini, Kompas memposisikan AS sebagai pihak yang cenderung dirugikan. Kompas juga lebih banyak memuat berita-berita yang

menjelaskan tentang kerugian yang diderita oleh AS, dengan adanya aksi kekerasan menolak film *Innocence of Muslims* ini. Selain itu, Kompas juga menjelaskan kronologi dari terjadinya aksi anarkis itu, dan apa saja yang menjadi sasaran dari para pengunjuk rasa tersebut.

Pada salah satu beritanya, Kompas juga menyertakan gambar atau foto dari para pengunjuk rasa yang sedang melakukan aksinya di Mesir. Dalam *caption* foto itu dituliskan bahwa, polisi Mesir menembakkan gas air mata ke arah para pengunjuk rasa saat bentrokan terjadi di dekat kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kairo, Mesir. Pada berita ini dituliskan mengenai protes umat Islam terhadap film *Innocence of Muslims*. Adapun kutipan beritanya adalah sebagai berikut :

“KAIRO, KOMPAS – Ratusan pengunjuk rasa, Kamis (13/9), kembali mencoba masuk Kedutaan Besar Amerika Serikat di distrik Garden City, Kairo. Mereka melempari petugas keamanan yang mencoba menghadang dengan bom molotov dan batu. Petugas keamanan membalas dan melontarkan gas air mata untuk membubarkan demonstran.

Saling dorong dan lempar batu terjadi antar pengunjuk rasa dan petugas keamanan. Sedikitnya 20 demonstran dan 11 petugas luka-luka dalam bentrokan itu. Dua kendaraan petugas juga terbakar akibat lemparan bom molotov itu, seperti dilaporkan wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, dari Kairo.

...Pengunjuk rasa di kota Sana'a, Yaman, mendobrak gedung Kedubes AS setelah berhasil menjebol pintu gerbang masuk gedung tersebut. Mereka kemudian membakar mobil yang terparkir di halaman dalam. Terjadi bentrokan dengan petugas keamanan yang melepas tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan pengunjuk rasa.”

Dari cara bercerita wartawan Kompas ini dapat dilihat bahwa Kompas bersikap kontra dengan adanya aksi unjuk rasa tersebut. Kompas memandang protes dengan aksi kekerasan itu banyak memberikan efek negatif dan

menimbulkan kekerasan, bahkan juga korban jiwa seperti yang terjadi sebelumnya di kantor Kedubes AS untuk Libya.

Untuk itulah, Kompas menyarankan agar protes dilakukan dengan baik dan bermartabat. Pada setiap pemberitaan mengenai aksi unjuk rasa yang terjadi, Kompas juga selalu menyertakan saran tindakan yang dilakukan dalam menanggapi beredarnya film *Innocence of Muslims* ini. Saran itu pun semuanya menuju pada protes bermartabat yang tetap memegang nilai-nilai Islam dan etika atau norma yang berlaku di tempat itu. Karena itulah Kompas menempatkan pengunjuk rasa tersebut pada bidang *sphere of deviance*, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang jauh dari kekerasan.

Dari perbedaan frame ini dapat dilihat bahwa Kompas cenderung lebih bersikap netral dalam memberitakan film *Innocence of Muslims*. Kompas tidak banyak menonjolkan pemberitaan mengenai apa itu film *Innocence of Muslims*, atau siapa yang berada dibalik pembuatan film ini, dan bertanggungjawab atas munculnya film ini. Sikap netralnya ini Kompas tunjukkan dengan menyebut film *Innocence of Muslims* sebagai film kontroversial, karena ada pernyataan dari Pemerintah AS yang mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah berupaya untuk menghina Islam. Sikap netral yang lain ditunjukkan Kompas dengan penonjolan beritanya pada terjadinya aksi unjuk rasa, baik dari kronologi terjadinya, ataupun akibat yang ditimbulkannya.

Sikap netral Kompas ini jelas memberikan keuntungan tersendiri bagi Kompas. Umat Islam tidak merasa dirugikan karena Kompas juga mengatakan

bahwa film *Innocence of Muslims* itu menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW, pihak pemerintah AS pun tidak dirugikan. Karena Kompas lebih banyak mengangkat masalah aksi unjuk rasa, yang kemudian akan diinvestigasi siapa dalang dari aksi anarkis tersebut. Sehingga hubungan Kompas dengan mitra strategisnya, yaitu Amerika Serikat, akan tetap berjalan baik. Karena Kompas juga tidak menunjukkan bahwa Pemerintah AS bertanggungjawab atas beredarnya film ini.

Namun, jika kita perhatikan secara seksama, Republika secara jelas dapat terlihat bahwa ia memihak pada Islam. Sementara Kompas, sekalipun ia terlihat lebih memilih bersikap netral terhadap film *Innocence of Muslims*, keperbihakan Kompas ternyata bisa dilihat pada sisi lain. Posisi Kompas yang memilih netral terhadap film itu, membuatnya berpihak pada pemegang kebijakan atau pemilik media. Pemegang kebijakan atau pemilik media adalah yang kemudian menentukan fakta yang diambil adalah seputar kejadian dan kerugian dari aksi unjuk rasa yang terjadi, sehingga hubungan baik antara Kompas dengan mitra strategisnya tetap bisa berjalan dengan baik dan aman.

Perbedaan antara Republika dan Kompas dalam hal tersebut bisa dipahami karena ideologi politik media diantara keduanya yang memang berbeda. Dan hal ini pun menjadi sangat rasionalitas jika merujuk pada teori netralitas media yang dijelaskan pada bab III penelitian ini. Sebagaimana pendapat Noam Chomsky mengenai netralitas media, bahwa pada akhirnya, media akan sulit untuk bersifat netral dan *cover both side*. Karena pada sebuah media massa akan banyak ditemui berbagai macam kepentingan yang terselubung di dalamnya, baik itu kepentingan

yang datang dari dalam media itu sendiri atau pun dari luar, terutama kepentingan yang berhubungan erat dengan informasi yang disajikan. Namun diantara kepentingan-kepentingan tersebut, terdapat kepentingan utama yang hampir selalu disembunyikan oleh media.

Kepentingan utama pada media massa yang selalu terbungkus rapi itu adalah kepentingan ekonomi dan kepentingan kekuasaan. Siapa yang punya modal dan siapa yang berkuasa, atau siapa yang punya modal dialah yang berkuasa, itulah yang menjadi kepentingan utama pada hampir semua media massa saat ini. Sistem ekonomi kapitalis itu yang saat ini juga telah menjalar ke dalam tubuh media massa itu sendiri. Karena itu, kuatnya dua kepentingan (*economy interest and power interest*) ini yang kemudian membuat media massa menjadi tidak sepenuhnya netral dan *cover both side*. Bahkan fakta yang disajikan pun selalu dipolitisir.

Sederhananya, penjelasan mengenai perbandingan framing Republika dan Kompas dari elemen retorik ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perangkat framing	Retoris
Republika	Penggunaan kata-kata tertentu yang menunjukkan bahwa film <i>Innocence of Muslims</i> sebagai film yang menistakan Islam dan Nabi Muhammad SAW. Republika menempatkan film <i>Innocence of Muslims</i> dan sutradaranya, serta pemerintah AS dalam bidang penyimpangan (<i>sphere of deviance</i>) karena bertentangan dengan keyakinan umat Islam. Republika memilih berpihak pada Islam.
Kompas	Penggunaan kata-kata tertentu yang menunjukkan bahwa film

Innocence of Muslims adalah film kontroversial yang tidak perlu menimbulkan kekerasan atau bahkan korban jiwa. Kompas menempatkan para pengunjung rasa yang melakukan aksinya secara anarkis dalam bidang penyimpangan (*sphere of deviance*), karena menimbulkan kerugian pihak tertentu, baik yang bersifat materil ataupun psikis. Kompas memilih berpihak pada pemegang kebijakan atau pemilik media.

Adapun perbandingan *framing* antara Republika dengan Kompas dalam pemberitaan film *Innocence of Muslims* ini, jika dilihat melalui tabel perbandingannya adalah sebagai berikut:

Elemen	Republika	Kompas
Frame	Film Innocence of Muslims Menistakan Islam dan Nabi Muhammad SAW	Film Innocence of Muslims Kontroversial
Sintaksis/skematis	27 berita yang diturunkan, 10 diantaranya menjadi berita utama pada halaman pertama surat kabarnya. Judul-judul berita banyak yang menunjukkan film <i>Innocence of Muslims</i> sebagai film yang menistakan Islam dan Nabi Muhammad SAW. Sumber berita yang diambil lebih banyak dari Aljazirah, Alarabiya, dan pemuka-pemuka agama Islam di Indonesia maupun luar negeri, yang mendukung <i>frame</i> Republika	9 berita yang diturunkan, tidak ada satupun yang menjadi berita utama pada halaman pertama surat kabar. 6 berita ditempatkan pada halaman internasional, dan dua lainnya pada halaman umum serta politik dan hukum. Judul-judul berita mengenai aksi unjuk rasa memprotes film <i>Innocence of Muslims</i> . Sumber berita lebih banyak yang datang dari media Barat.

	terhadap film.	
Skrip	Penekanan pada aspek <i>why</i> (mengapa). Peliputan banyak menyajikan informasi yang menjelaskan mengenai alasan terjadinya demonstrasi dan desakan pada pemerintah AS untuk bersikap tegas.	Penekanan pada aspek <i>how</i> (bagaimana) aksi protes terhadap film terjadi. Sementara untuk aspek <i>why</i> (mengapa) untuk memberi penjelasan mengenai alasan terjadinya unjuk rasa, kurang mendapat sentuhan.
Tematik	(1) penjelasan mengenai film <i>Innocence of Muslims</i> , baik tentang alur ceritanya, sutradara, ataupun pengakuan dari para pemainnya. (2) Terjadinya aksi protes terhadap film. (3) Seseorang yang diduga sebagai sutradara film <i>Innocence of</i> (4) desakan pada pemerintah AS agar segera mengambil sikap tegas untuk menghukum pembuat film. (5) Usulan untuk membuat instrumen antipenistaan agama.	(1) Terjadinya insiden yang menewaskan Duta Besar AS untuk Libya. (2) Beredarnya film <i>Innocence of Muslims</i> yang diduga menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW. (3) Penolakan terhadap film dari berbagai kalangan seperti akademisi, aktivis, peneliti, tokoh agama, ahli hukum dan hubungan luar negeri, serta dari salah satu majalah di Mesir. (4) Usulan dari Presiden RI untuk menyusun protokol atau instrumen antipenistaan agama. (5) Ditahannya pembuat film <i>Innocence of Muslims</i> .
Retoris	Penggunaan kata-kata tertentu yang menunjukkan bahwa film <i>Innocence of Muslims</i> sebagai film yang menistakan Islam dan	Penggunaan kata-kata tertentu yang menunjukkan bahwa film <i>Innocence of Muslims</i> adalah film kontroversial yang tidak

<p>Nabi Muhammad SAW. Republika menempatkan film <i>Innocence of Muslims</i> dan sutradaranya, serta pemerintas AS dalam bidang penyimpangan (<i>sphere of deviance</i>) karena bertentangan dengan keyakinan umat Islam.</p>	<p>perlu menimbulkan kekerasan atau bahkan korban jiwa. Kompas menempatkan para pengunjuk rasa yang melakukan aksinya secara anarkis dalam bidang penyimpangan (<i>sphere of deviance</i>), karena menimbulkan kerugian pihak tertentu, baik yang bersifat materil ataupun psikis.</p>
---	--